

LAPORAN KINERJA

BPS KOTA SURABAYA
TAHUN 2023



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SURABAYA



LAPORAN KINERJA

BPS KOTA SURABAYA
TAHUN 2023

LAPORAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURABAYA TAHUN 2023

No. Katalog : 1202059.3578
No. Publikasi : 35780.24001
Ukuran Buku : A4 (21 cm x 29,7 cm)
Jumlah Halaman : xvi + 133 Halaman

Naskah:
Tim SAKIP BPS Kota Surabaya

Gambar Sampul:
Tim Humas BPS Kota Surabaya

Sumber gambar:
canva.com

Diterbitkan oleh:
Badan Pusat Statistik Kota Surabaya
Januari 2024

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin
tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURABAYA
TAHUN 2023

Pengarah:
Arrief Chandra Setiawan

Penanggung Jawab Teknis:
Ali Subagiyo

Penyusun:
Akhmad Dardiri
Fitri Kusumowardhani
Nurcholis
Septa Noor Pradhani

Penyunting:
Wahyuningsih
Nurcholis
Septa Noor Pradhani

Gambar Kulit:
Yusril Yuma Alfana

Tata Letak:
Fitri Kusumowardhani
Nurcholis

Infografis:
Yusril Yuma Alfana

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja BPS Kota Surabaya 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Kota Surabaya sebagai penyelenggara negara atas penggunaan anggaran selama Tahun 2023. Di dalam laporan kinerja BPS Kota Surabaya 2023 tertuang hasil capaian kinerja, evaluasi dan pengungkapan (*disclosure*) terhadap kinerja BPS Kota Surabaya sepanjang Tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua BPS melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran baru yang selaras dengan arah dan tujuan RPJMN 2020-2024. Visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut dirangkum dan dituangkan dalam Rencana Strategis BPS Kota

Surabaya 2020-2024. Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada Tahun 2023, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Surabaya Tahun 2023. Hasil laporan ini diharapkan menjadi masukan sebagai bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Seluruh pimpinan BPS Kota Surabaya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Surabaya, 31 Januari 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Surabaya,



Dr. Arrief Chandra Setiawan, S.ST, M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kota Surabaya	4
1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran	6
1.4. Potensi dan Permasalahan	7
1.4.1. Potensi.....	7
1.4.2. Permasalahan	10
1.5. Sistematika Penyajian Laporan	11
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPS Kota Surabaya	15
2.1.1. Visi BPS Kota Surabaya	15
2.1.2. Misi BPS Kota Surabaya.....	16
2.1.3. Tujuan BPS Kota Surabaya.....	18
2.1.4. Sasaran Strategis BPS Kota Surabaya	19
2.2. Renstra BPS Kota Surabaya 2020-2024.....	20
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Surabaya 2023	27
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Analisis Capaian Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2023	31
3.1.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Pertama	33
3.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Kedua.....	45
3.1.3. Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Ketiga	55
3.1.4. Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Keempat.....	59
3.1.5. Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2020 - 2023.....	66

3.1.6.	Realisasi Kinerja BPS Kota Surabaya dari Tahun 2023 sampai dengan tahun 2020.....	69
3.1.7.	Realisasi Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2023 Menurut IKU Terhadap Target Reviu Renstra Tahun 2023	700
3.1.8.	Realisasi Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2023 Menurut IKU Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2020-2024.....	800
3.1.9.	Analisis Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja	889
3.2.	Prestasi dan Inovasi BPS Kota Surabaya Tahun 2023	1000
3.2.1.	Prestasi BPS Kota Surabaya Tahun 2023	1000
3.2.2.	Inovasi BPS Kota Surabaya Tahun 2023	1022
3.3.	Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023	1066
3.3.1.	Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program	1066
3.3.2.	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Program dan Sasaran	1077
3.3.3.	Upaya Efisiensi Anggaran dan Nilai Efisiensi Anggaran	10909
BAB 4. PENUTUP		1177
4.1.	Kesimpulan.....	11919
4.2.	Rencana Tindak Lanjut.....	11919
LAMPIRAN		1211

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pagu Anggaran Belanja BPS Kota Surabaya Tahun 2023	7
Tabel 2. Visi dan Misi BPS Kota Surabaya 2020-2024	16
Tabel 3. Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kota Surabaya 2020 - 2024.....	18
Tabel 4. Tujuan Dan Sasaran BPS Kota Surabaya 2020-2024.....	20
Tabel 5. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPS Kota Surabaya	23
Tabel 6. Reviu Rencana Strategis 2020- 2024	26
Tabel 7. Perjanjian Kinerja 2023.....	27
Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kota Surabaya Tahun 2022 dan 2023	31
Tabel 9. Capaian Kinerja Tujuan Pertama : Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan	33
Tabel 10. Publikasi Statistik BPS Kota Surabaya yang Terbit Tepat Waktu Tahun 2023.....	36
Tabel 11. Tabel Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Kota Surabaya yang Terbit Tepat Waktu Tahun 2023.....	37
Tabel 12. Capaian Kinerja Tujuan Kedua : Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan SSN	45
Tabel 13. Jumlah Rekomendasi Statistik yang Telah Disampaikan OPD	48
Tabel 14. Daftar Nama LO Pembinaan Statistik Sektoral pada Setiap OPD	49
Tabel 15. Jumlah Metadata Statistik sesuai standar yang Telah Disampaikan OPD	53
Tabel 16. Capaian Kinerja Tujuan Ketiga: Meningkatnya Pelayanan Prima Dalam Penyelenggaraan SSN	55
Tabel 17. Daftar OPD yang Mendapatkan Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2023 ..	57
Tabel 18. Capaian Kinerja Tujuan Keempat: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi	59
Tabel 19. Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2020 - 2023	66
Tabel 20. Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2020,2021, 2022, dan 2023	67
Tabel 21. Realisasi Kinerja BPS Kota Surabaya dari Tahun 2023 sampai dengan tahun 2020.....	69

Tabel 22. Capaian Kinerja 2023 terhadap Target Reviu Renstra 2023	71
Tabel 23. Capaian Kinerja 2023 terhadap Target Akhir Renstra 2024	800
Tabel 24. Kendala dan Solusi Kegiatan Desa Cantik Kota Surabaya Tahun 2023	99
Tabel 25. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program.....	1077
Tabel 26. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Program dan Sasaran	10808
Tabel 27. Riwayat Revisi DIPA BPS Kota Surabaya Selama Tahun 2023	1100
Tabel 28. Efisiensi Realisasi Anggaran Penggunaan Daya Jasa Tahun 2023	1144
Tabel 29. Perbandingan Efisiensi Realisasi Anggaran Penggunaan Daya Jasa Tahun 2023 terhadap Tahun 2022.....	1144
Tabel 30. Nilai Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja Dan Nilai Sasaran BPS Kota Surabaya Tahun 2023.....	1155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPS Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 8 Tahun 2020	5
Gambar 2. SDM BPS Kota Surabaya Menurut Tingkat Pendidikan.....	6
Gambar 3. Peta Strategi BPS Kota Surabaya 2020–2024	21
Gambar 4. Nilai-Nilai Inti Aparatur Sipil Negara (ASN)	24
Gambar 5. <i>Employer Branding</i> ASN.....	25
Gambar 6. <i>Flyer</i> Regsosek	41
Gambar 7. <i>Screenshot</i> Validasi PMT Regsosek	41
Gambar 8. <i>Screenshot</i> Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya 2023 pada Website BPS Kota Surabaya	433
Gambar 9. <i>Screenshot</i> Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya 2023 pada Website BPS Kota Surabaya.....	44
Gambar 10. Muatan Dalam Metadata Kegiatan	51
Gambar 11. Indikator Metadata.....	51
Gambar 12. Variabel Metadata.....	52
Gambar 13. LHE Atas Implementasi SAKIP BPS Kota Surabaya Tahun 2023	62
Gambar 14. <i>Screenshot</i> Pengusulan Belanja Barang Modal Melalui Web IPlan.....	65
Gambar 15. <i>Screenshot</i> Laporan Pengunjung Bulanan pada Aplikasi Pengunjung Tamu Online	66
Gambar 16. Tampilan Fisik Pojok Statistik di Universitas PGRI Adi Buana.....	911
Gambar 17. Pojok Statistik Universitas PGRI Adi Buana sudah terdaftar di PSV	911
Gambar 18. Aktivitas layanan konsultasi di Pojok Statistik UNIPA	922
Gambar 19. <i>Flyer</i> Edukasi Statistik Pemanfaatan Data Statistik untuk Pembuatan Infografis.....	933
Gambar 20. Pelaksanaan <i>Briefing</i> Agen Statistik.....	944
Gambar 21. Pelaksanaan Dosen Praktisi	955
Gambar 22. Pertemuan Kepala BPS Kota Surabaya dengan Sekda Kota Surabaya Terkait Kegiatan Desa Cantik Tahun 2023	977
Gambar 23. Pencanangan Kelurahan Mojo Sebagai Kelurahan Cantik Tahun 2023....	98

Gambar 24. Piagam Penghargaan Terbaik Pertama Pencacahan Lapangan Sensus Pertanian 2023 UTP Kategori Kecil RTUP kurang dari sama dengan 50.000.....	1000
Gambar 25. Penghargaan Terbaik Kedua dalam pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan Desa Cantik Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	1011
Gambar 26. Penghargaan atas kepatuhan penyampaian LHKPN dan SPT tahun 2022	1011
Gambar 27. Kegiatan Doa dan Briefing Pagi dan Sore di BPS Kota Surabaya	1022
Gambar 28. <i>Screenshot</i> Pelaksanaan <i>Sharing Knowledge</i> Antar Kita (SKAK).....	1033
Gambar 29. Seminar Inflasi dan Perekonomian pada FMIPA Unesa pada tanggal 6 Oktober 2023	1033
Gambar 30. Tampilan Aplikasi SIEVA.....	1044
Gambar 31. Tampilan Aplikasi SIMOVIE.....	1055
Gambar 32. Tampilan Aplikasi ASTABAYA.....	1066
Gambar 33. Himbauan Kampanye Hemat Energi	1133
Gambar 34. <i>Screenshot</i> Aplikasi SMART pada web monev.kemenkeu.go.id.....	1166

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2023	1233
Lampiran 2. Revisi Perjanjian Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2023	1288
Lampiran 3. Revisi Kedua Perjanjian Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2023.....	1311

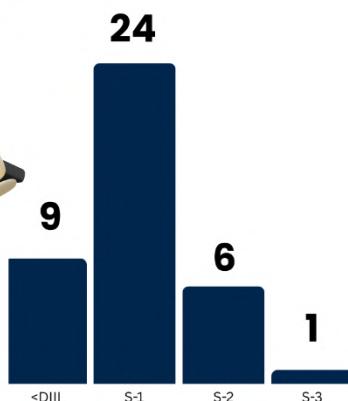


CAPAIAN KINERJA BPS KOTA SURABAYA

TAHUN 2023

Pendidikan Pegawai

BPS Kota Surabaya



Dari total **40** Pegawai BPS Kota Surabaya, **majoritas** memiliki pendidikan **S-1**, yaitu sebanyak **24** orang

Jumlah Pegawai

Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai **laki-laki** sebanyak **21** orang, sedangkan pegawai **perempuan** sejumlah **19** orang



Inovasi

1



Aplikasi Si-Eva (system evaluasi kinerja) dibuat agar kinerja pegawai bisa dipantau per hari atau secara real time, yang selama ini belum bisa diakomodir oleh aplikasi KipApp

2



Aplikasi SiMovie bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan akuntabilitas petugas di lapangan

3

ASTABAYA



Capaian Kinerja

Rata-rata

Capaian Kinerja 104,37%

T1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

Capaian 100%

T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN

110%

T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

107,69%

T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

101,45%

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja BPS Kota Surabaya disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Surabaya atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Visi yang telah ditetapkan: “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” (“*Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia*”) Untuk mewujudkan Visi dapat dicapai dengan Misi:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan Amanah.

Untuk mencapai sasaran pembangunan perstatistikian yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2023, BPS Kota Surabaya melaksanakan 2 (dua) program yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL).
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Laporan Kinerja BPS Kota Surabaya disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPS atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, 4 (empat) tujuan yang harus dicapai BPS Kota Surabaya pada tahun 2023 telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Reviu ke I Renstra BPS Kota Surabaya 2020-2024 yang meliputi:

- Tujuan I Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
Tujuan II Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN;
Tujuan III Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN;
Tujuan IV Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Keempat tujuan strategis ini bersinergi dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, dan pada periode tahun 2023 ditandai dengan terpenuhinya target dan tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Penyelenggaraan program-program tersebut dibiayai Pemerintah Republik Indonesia melalui APBN yang dituangkan ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPS

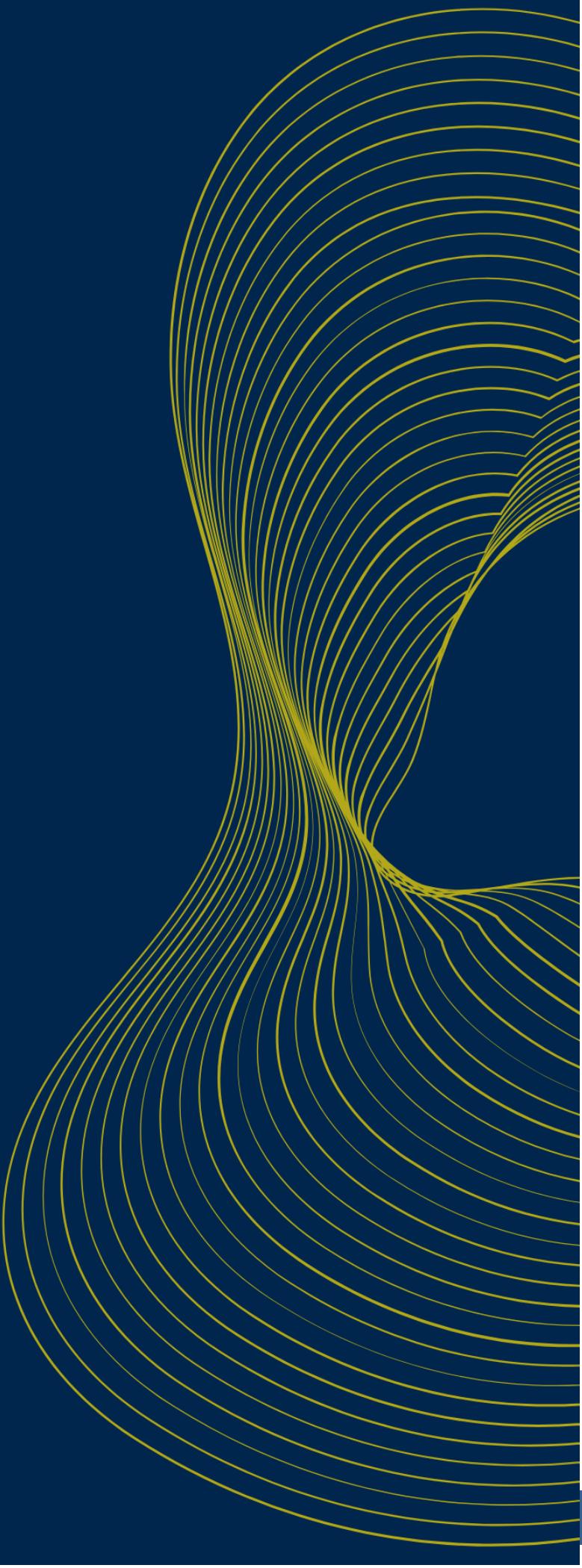
Kota Surabaya Tahun 2023, dengan nilai sebesar Rp. 20.075.123.000,- dan realisasi penggunaan sebesar Rp. 18.730.089.773,- atau mencapai 93,30% (persen). Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Surabaya untuk tahun 2023 mencapai 104,37 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan/ Sasaran Strategis/Indikator		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
T1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			100	
SS 1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	100	100	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi	100	100	100
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN			110	
SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	42,86	57,14	120
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	53,85	53,85	100
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			107,69	
SS 3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	92,85	100	107,69
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			101,45	
SS 4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	70,05	70,65	100,86
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Provinsi	98	100	102.04
Rata-rata capaian kinerja tujuan			104,37	

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan masih banyak kendala yang dihadapi, sehingga banyak target-target yang belum bisa dicapai. Untuk itu BPS Kota Surabaya akan terus meningkatkan kinerjanya, terutama yang berhubungan dengan kualitas data, pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan pembinaan statistik sektoral K/L/D/I.

BAB I

PENDAHULUAN





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Berdasarkan Peraturan Presiden PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pusat Statistik Kota Surabaya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPS Kota Surabaya Tahun 2023.

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya sesuai Amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat, data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari kementerian atau lembaga pemerintah lainnya sebagai data sekunder, membantu kegiatan statistik di kementerian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikian nasional, mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik,

membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kota Surabaya

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar. Sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 8 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota disebutkan, bahwa Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kota Surabaya sebagai berikut:

1) Kedudukan

BPS Kota Surabaya adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi Jawa Timur.

2) Tugas

Melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kota Surabaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan statistik dasar di Kota Surabaya;
- b. Pengkordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kota Surabaya;
- c. Pelancaran dan Pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Kota Surabaya; dan
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPS Kota Surabaya.

4) Susunan Organisasi

Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan penyederhanan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif dan efisien, maka Kepala Badan Pusat Statistik mengeluarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, yang ditetapkan tanggal 17 Desember 2020 dan diundangkan tanggal 22 Desember 2020, sehingga susunan Organisasi BPS Kota Surabaya berubah menjadi sebagai berikut:

a. Kepala BPS Kota Surabaya

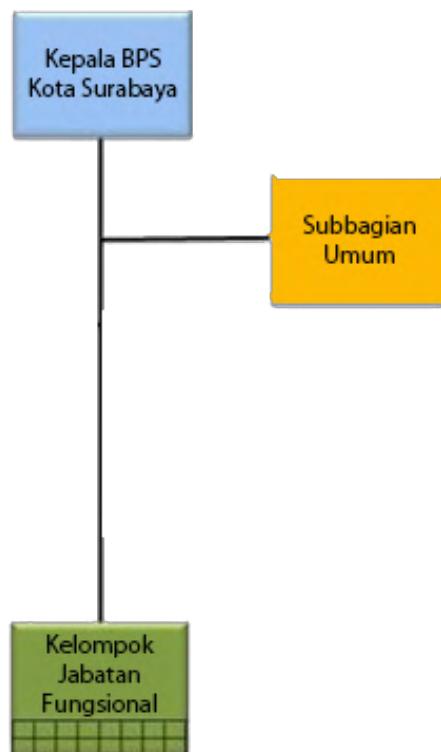
Kepala BPS Kota Surabaya mempunyai tugas memimpin BPS Kota Surabaya sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kota Surabaya, serta membina aparatur BPS Kota Surabaya agar berdaya guna dan berhasil guna.

b. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan dan rumah tangga.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

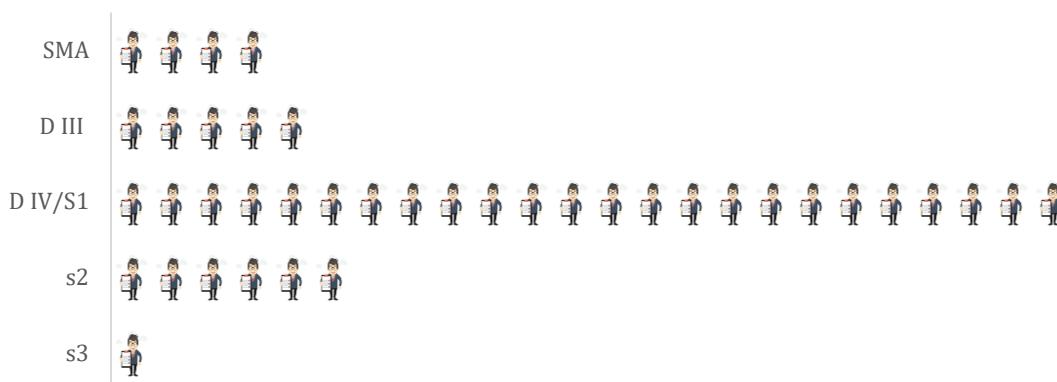
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Surabaya, sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan. Dalam melaksanakan tugasnya, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi pelayanan fungsional sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsi BPS Kota Surabaya. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPS Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 8 Tahun 2020

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

Untuk menjalankan tugasnya, BPS Kota Surabaya didukung SDM sebanyak 40 orang dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, untuk ditempatkan pada struktural maupun fungsional yang ada di BPS Kota Surabaya. Menurut jenjang pendidikan, pegawai yang berpendidikan S3 sebanyak 1 orang S2 sebanyak 6 orang, yang berpendidikan S1/D-IV berjumlah 24 orang, yang berpendidikan D-III berjumlah 5 orang dan 4 orang berpendidikan SMA.



Gambar 2. SDM BPS Kota Surabaya Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan gambar 2 terlihat komposisi pegawai BPS Kota Surabaya dengan pendidikan D-IV/S1 ke atas mencapai 60 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa mayoritas SDM BPS Kota Surabaya mempunyai kualitas yang baik. Aset besar ini sangat cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Surabaya.

Pencapaian target terhadap visi dan misi Badan Pusat Statistik Kota Surabaya didukung juga oleh penganggaran. Dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 2 (dua) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen (Dukman), (2) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Program Dukungan Manajemen (Dukman) BPS Kota Surabaya bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Sasaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas, dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS

Kota Surabaya secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis (PPIS) ini terdiri dari beberapa kegiatan: Pengembangan dan Analisis Statistik; Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik, Penyediaan dan pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran; Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi; Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei; Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi; Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga; Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi; Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat; Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial; Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata; Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data statistik sehingga lebih beragam, rinci dan akurat yang dapat dimanfaatkan sebagai indikator dalam perencanaan baik oleh pemerintah, dunia usaha, peneliti maupun masyarakat luas.

Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah anggaran BPS Kota Surabaya menurut program pada tahun 2023.

Tabel 1. Pagu Anggaran Belanja BPS Kota Surabaya Tahun 2023

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Program Dukungan Manajemen (Dukman)	7.045.380.000
2	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	13.029.743.000
	Jumlah	20.075.123.000

1.4. Potensi dan Permasalahan

1.4.1. Potensi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang bertanggung jawab

dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

BPS Kota Surabaya bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kota Surabaya. BPS telah memiliki payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikian. Hal tersebut menjadi kekuatan bagi BPS untuk mengembangkan kegiatan perstatistikian kedepannya.

Tingkat kebutuhan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS Kota Surabaya yang teridentifikasi melalui kegiatan Survei Kebutuhan Data Tahun 2023 menyatakan bahwa secara umum, persentase konsumen yang merasa puas terhadap pelayanan BPS Kota Surabaya mencapai 100 persen. Hal ini dapat menjadi potensi yang menguntungkan bagi BPS Kota Surabaya karena kepuasan konsumen merupakan indikator utama dalam mengukur capaian kinerja BPS Kota Surabaya.

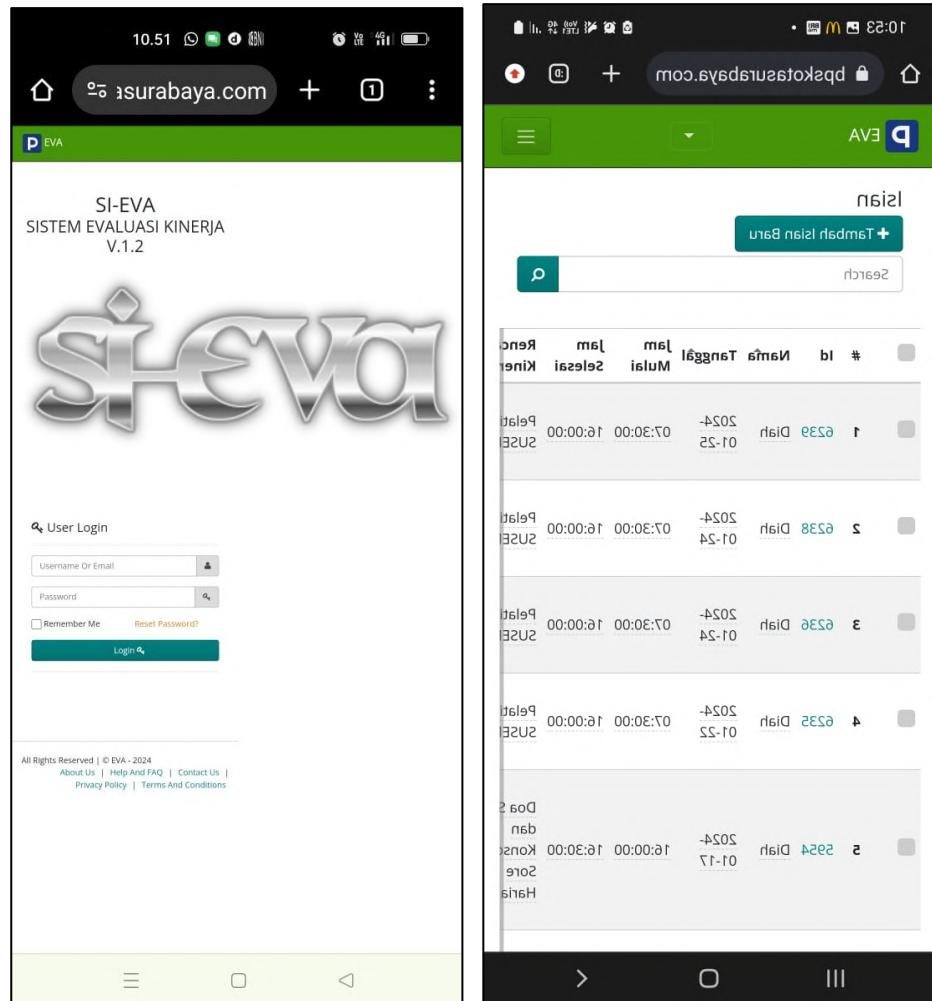
Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sangat potensial dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Kota Surabaya, merupakan salah satu potensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan serta pelayanan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh konsumen.

BPS Kota Surabaya juga ditunjang oleh kualitas SDM yang cukup baik dari segi pendidikannya yang didominasi oleh pegawai berpendidikan D-IV/S1. Perpaduan antara kedua potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi perencanaan, pengumpulan data, pengolahan maupun diseminasi.

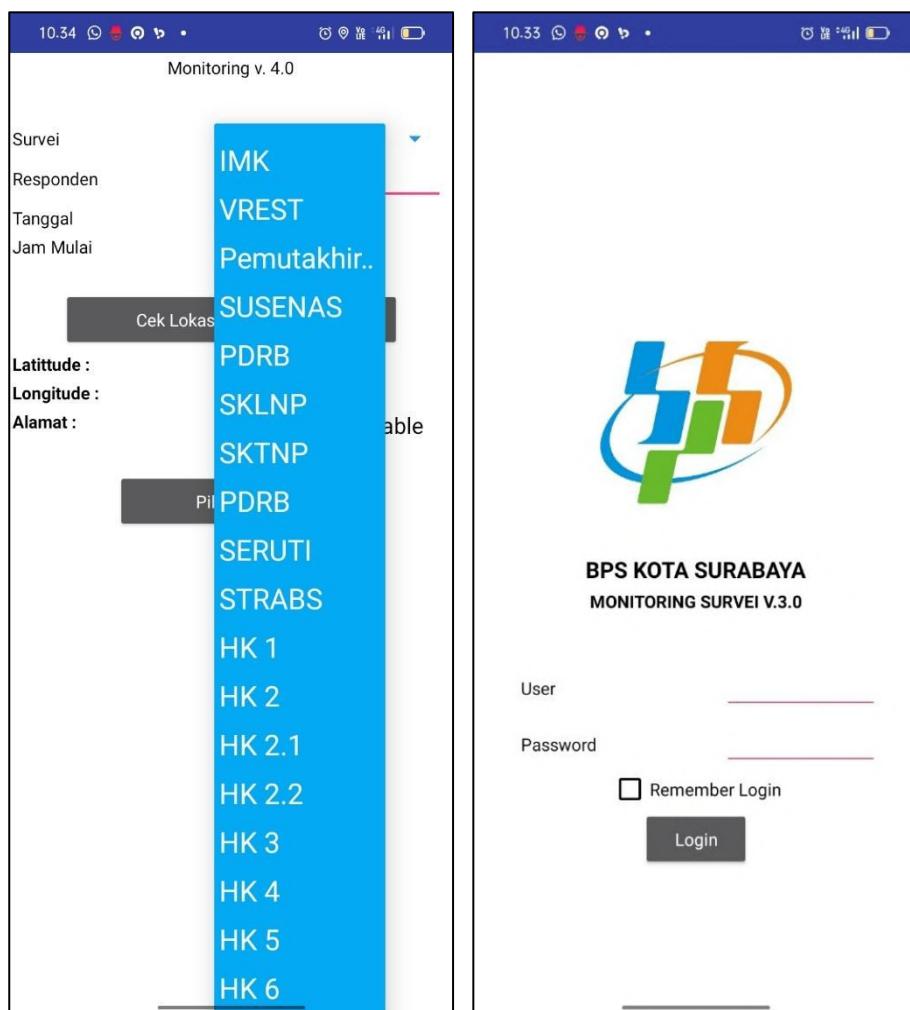
Di Tahun 2023 ini, dengan potensi yang dimiliki, BPS Kota Surabaya terus berupaya melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja baik secara internal ataupun eksternal dalam mempersiapkan diri untuk dapat kembali mengajukan usulan predikat WBK di Tahun 2023.

Kondisi eksternal menunjukkan bahwa BPS Kota Surabaya telah mendapat dukungan kuat dari Pemerintah Kota Surabaya di mana data dan informasi statistik telah menjadi rujukan penting dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan dengan terbentuknya forum Satu Data Indonesia dengan dikukuhkan dengan peraturan walikota nomor 126 Tahun 2021.

Kondisi internal telah menunjukkan tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai dan terus ditingkatkan, adanya semangat dan dedikasi yang tinggi di lingkungan pegawai serta terciptanya suasana kebersamaan dalam lembaga. Sehingga dikalangan Intern BPS Kota Surabaya membuat inovasi, yaitu SIEVA dan SIMOVIE.



Aplikasi Sieva (sistem evaluasi kinerja) dibuat agar kinerja pegawai bisa dipantau per hari atau secara *real time*, yang selama ini belum bisa diakomodir oleh aplikasi kipapp. Keunggulan aplikasi Sieva ialah memudahkan pegawai dalam pengisian kipapp. Aplikasi ini juga memudahkan Kepala dan ketua tim mengontrol kegiatan pegawai (anggota tim).



Sedangkan aplikasi SIMOVIE bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan akuntabilitas petugas di lapangan. Aplikasi SIMOVIE dapat merekam jejak keberadaan petugas saat melakukan pendataan, dan menghitung berapa lama petugas melakukan pendataan. Selain itu aplikasi ini juga dapat mendeteksi dini beberapa indikator survei.

1.4.2. Permasalahan

BPS Kota Surabaya harus lebih meningkatkan peran sebagai pembina statistik sektoral bagi kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah. BPS harus berkoordinasi, bekerja sama dengan berbagai pihak melalui forum satu data. Meskipun dalam pelaksanaan pembinaan statistik sektoral ini BPS Kota Surabaya mengalami kendala seperti narahubung (PIC) yang berganti akibat mutasi pegawai di level pemerintah daerah.

Selain peran tersebut permasalahan yang dihadapi BPS Kota Surabaya adalah bagaimana cara meningkatkan serta mempertahankan kualitas data yang dihasilkan sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pengguna data. Walaupun survei kepuasan pengguna data BPS Kota Surabaya sudah menunjukkan tingkat kepuasan 100 persen, namun BPS Kota Surabaya harus senantiasa memunculkan inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan mutakhir seiring dengan terjadinya perubahan masyarakat dan kemajuan teknologi.

Di sisi lain, semakin banyak survei yang dilakukan BPS konsekuensinya adalah responden yang enggan untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS. Belum semua *stakeholder* memahami dengan baik berbagai indikator yang dihasilkan oleh BPS dan pada sisi responden, kepedulian akan pentingnya data masih rendah yang menyebabkan *respon rate* masih dibawah target. Untuk itu BPS mengarah pada integrasi survei melalui program Statcap Cerdas yang bertujuan untuk menjadikan BPS yang lebih efektif, efisien dan ekonomis dengan hasil akhir yang semakin kredibel, andal dan memberi manfaat bagi semua user data.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS Kota Surabaya tahun 2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

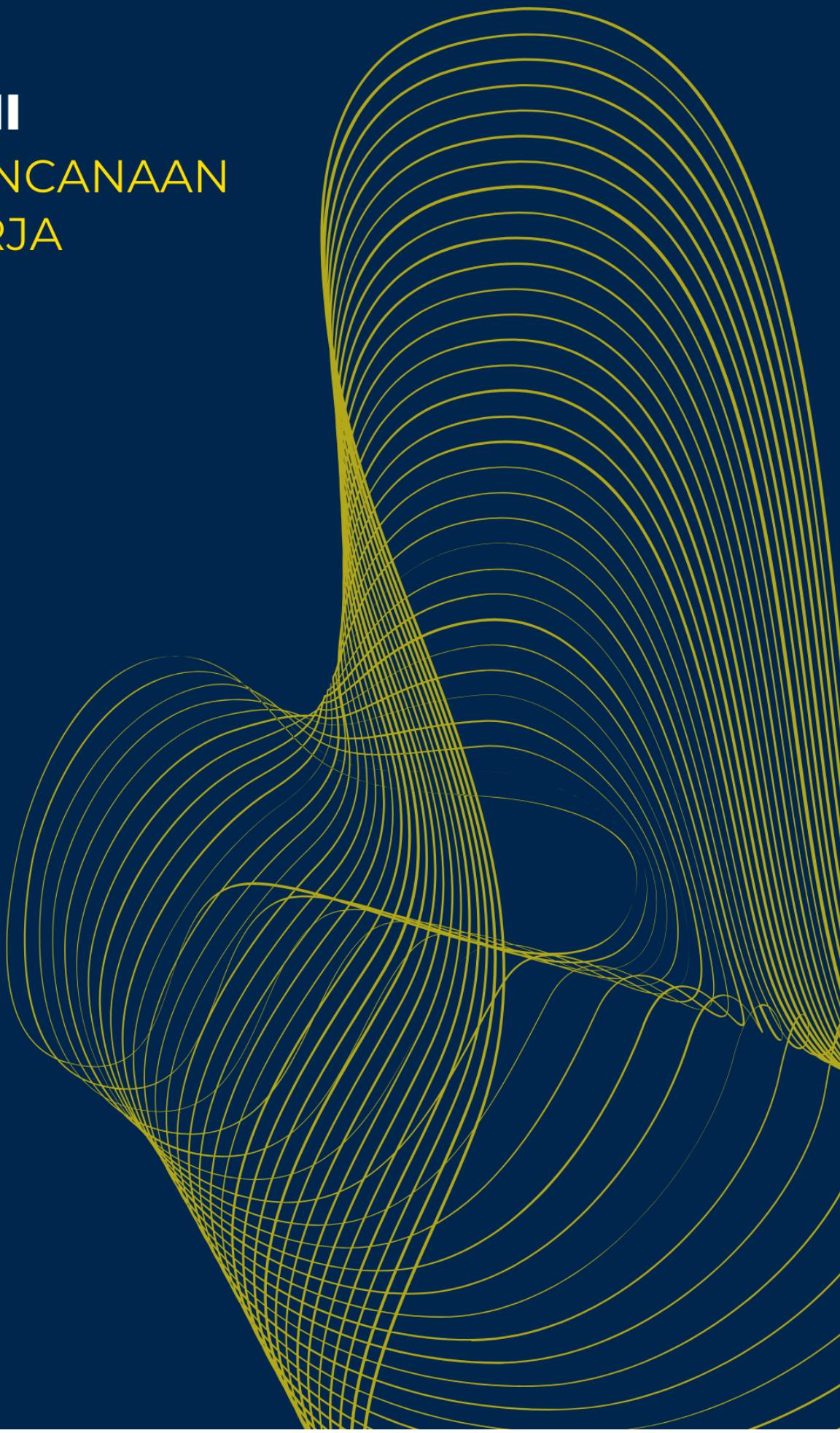
- Bab I. **Pendahuluan**, menyajikan latar belakang; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS Kota Surabaya; sumber daya manusia dan dukungan anggaran, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS Kota Surabaya; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II. **Perencanaan Kinerja**, berisi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPS Kota Surabaya, Reviu Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Surabaya 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Surabaya 2023.
- Bab III. **Akuntabilitas Kinerja**,
- Analisis capaian kinerja BPS Kota Surabaya meliputi evaluasi kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja, solusi yang telah dilakukan serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar capaian kinerja di tahun berikutnya meningkat. Poin-poin yang perlu dianalisis adalah sebagai berikut:
 - Realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 (analisis capaian total, capaian per sasaran, dan capaian per IKU);
 - Perbandingan capaian kinerja total tahun 2023 sampai dengan 2020;
 - Realisasi kinerja per IKU dari tahun 2023 sampai dengan tahun pertama periode Renstra;
 - Realisasi kinerja per IKU tahun 2023 terhadap target Renstra tahun 2023;
 - Realisasi kinerja per IKU tahun 2023 terhadap target akhir Renstra;
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

- Prestasi dan Inovasi Satker Tahun 2023.
- Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023.
 - Pagu dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Sasaran
 - Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Program dan Sasaran
 - Upaya Efisiensi Anggaran (penggunaan sumber daya) dan Nilai Efisiensi Anggaran

Bab IV. **Penutup**, berupa kesimpulan dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPS Kota Surabaya

2.1.1. Visi BPS Kota Surabaya

Visi BPS Kota Surabaya dengan mengacu Visi Badan Pusat Statistik 2020-2024 yaitu dibangun dengan memperhatikan berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan yang dihadapi melalui landasan pemikiran yang proaktif. Pembangunan nasional dibidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mendarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data berkualitas. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi BPS Kota Surabaya:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”
(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

BPS Kota Surabaya mempunyai tugas pokok menyediakan dan melakukan koordinasi ketersediaan data dan informasi statistik pada lingkup nasional maupun daerah. Kata “Penyelenggara Statistik Dasar” mempunyai makna bahwa BPS Kota Surabaya sebagai Penyelenggara Statistik Dasar yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara sensus, survei, kompilasi dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata “data statistik yang berkualitas” yaitu data statistik yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi saat ini, akurat artinya data tersebut mencerminkan keadaan dilapangan, tepat waktu dan mudah di akses oleh pengguna.

Dengan visi tersebut, eksistensi BPS Kota Surabaya sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan data statistik berkualitas.

Proses penyediaan data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS Kota Surabaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang disebarluaskan melalui berbagai

media dan berbagai cara agar pemanfaatannya bisa menjangkau secara luas, baik di dalam maupun diluar negeri.

2.1.2. Misi BPS Kota Surabaya

Misi BPS Kota Surabaya dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2020-2024, misi BPS dan tugas, fungsi dan kewenangan BPS Kota Surabaya. Perumusan misi BPS Kota Surabaya juga dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Rumusan tersebut dimaksudkan untuk mampu mencakup semua pesan yang tercakup dalam visi, memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, memberi petunjuk kelompok sasaran termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani dan memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Pernyataan Misi BPS Kota Surabaya yang dikaitkan dengan Visi BPS Kota Surabaya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Visi dan Misi BPS Kota Surabaya 2020-2024

Visi BPS Kota Surabaya 2020-2024	<i>Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju</i>	MISI BPS Kota Surabaya 2020-2024
		1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
		2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan Amanah

Misi BPS Kota Surabaya tahun 2020-2024 mengandung arti:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya merupakan penyelenggara statistik dasar di Kota Surabaya, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah ,maupun masyarakat (Perpres No. 86 Tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009: 187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS, meliputi *relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (aktualitas) &

punctuality (tepat waktu), *accessibility* (aksesibilitas), *coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan), *interpretability* (interpretabilitas).

“Setiap penyelenggaraan kegiatan, BPS akan berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Membina K/L/D/I Melalui Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997). BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan **Satu Data Indonesia**.

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesional, integritas, dan amanah

SDM statistik yang unggul dan adaptif tercermin pada Insan statistik yang profesionalisme, berintegritas, dan amanah,

... profesional...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

... integritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka(menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

Selain itu SDM statistik yang unggul dan adaptif tercermin pada Insan statistik yang BerAKHLAK sebagaimana *Core Values* untuk seluruh ASN berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara.

2.1.3. Tujuan BPS Kota Surabaya

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan tujuan BPS Kota Surabaya untuk dapat mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Kota Surabaya dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

Tabel 3. Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kota Surabaya 2020 - 2024

		MISI BPS Kota Surabaya 2020-2024
Visi BPS Kota Surabaya 2020- 2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	
		<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

**TUJUAN
2020-
2024**

1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.
2. Peningkatan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN.
3. Peningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN.
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Adapun keterkaitan tujuan BPS Kota Surabaya terhadap misi BPS Kota Surabaya dalam rangka mencapai visi BPS Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan:

Misi ke-1 : Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

2. Tujuan 2 : Peningkatan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:

Misi ke-2 : Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan

3. Tujuan 3 : Peningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:

Misi ke-3 : Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

4. Tujuan 4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Misi ke-4 : Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan Amanah

2.1.4. Sasaran Strategis BPS Kota Surabaya

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumberdaya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS Kota Surabaya yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari

satu atau beberapa program. Program BPS Kota Surabaya terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik yang merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS Kota Surabaya (pelayanan internal). Adapun tujuan dan sasaran strategis BPS Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Tujuan Dan Sasaran BPS Kota Surabaya 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
T1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas
T2. Peningkatan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS2. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN
T3. Peningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi	SS4. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

2.2. Renstra BPS Kota Surabaya 2020-2024

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Renstra BPS Kota Surabaya tahun 2020–2024 disusun dengan mengikuti arahan Presiden dengan mengikuti *money follow program*, yang artinya seluruh Program K/L harus mengikuti arahan visi misi yang ditetapkan Presiden, sehingga program-program antar K/L dapat disinergikan. Oleh karena itu, dalam Renstra BPS Kota Surabaya ini termasuk restrukturisasi program, sesuai dengan arahan Presiden tersebut yang ditujukan untuk

menunjukkan nomenklatur program yang dapat mengkan *outcome* dalam pencapaian sasaran pembangunan baik pencapaian yang dilakukan oleh satu Kementerian/Lembaga, maupun antar Kementerian/Lembaga (lintas K/L), sesuai dengan kesepakatan dalam *Trilateral Meeting* (TM) restrukturisasi program BPS yang terdiri dari: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan (2) Program Dukungan Manajemen.

Dalam penyusunannya, BPS menjabarkan 4 (empat) misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learning and growth*. Pendekatan ini untuk mempermudah implementasi dalam pencapaian sasaran strategis dari sistem penganggaran yang dikombinasikan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan *logic model framework* dalam penataan arsitektur kinerja program dan kegiatan.



Gambar 3. Peta Strategi BPS Kota Surabaya 2020–2024

Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 tanggal 12 Mei 2020. Sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 4 Januari 2023. BPS dalam menentukan arah kebijakan dan strateginya pada tahun 2020 – 2024 telah mempertimbangkan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS. Sehingga arah kebijakan dan strategi BPS Kota Surabaya akan mendukung arah kebijakan dan strategi BPS yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan di Kota Surabaya

Arah Kebijakan : Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas di Kota Surabaya

Strategi :

- a. Meningkatkan akurasi data melalui penjaminan kualitas di setiap tahap kegiatan statistik dasar dan pembinaan statistik sektoral
- b. Memastikan kemutakhiran data
- c. Melakukan *Risk Management* di setiap kegiatan statistik dasar dan pembinaan statistik sektoral
- d. Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator:

- a. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi.
 - b. Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN di Kota Surabaya

Arah Kebijakan : Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN di Kota Surabaya

Strategi :

- a. Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
- b. Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
- c. Memaksimalkan peran BPS Kota Surabaya sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator:

- a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik
 - b. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar
3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Arah Kebijakan : Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Strategi :

- a. Melakukan pembinaan statistik sektoral ke K/L/D/I di Kota Surabaya
- b. Penguatan Koordinasi dengan OPD

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik.

4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

Arah Kebijakan : SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Strategi :

- a. Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja
- b. Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja
- c. Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien
- d. Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima
- e. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator:

- a. Hasil penilaian implementasi SAKIP
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana.

Tabel 5. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPS Kota Surabaya

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	1.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)
3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)



Gambar 4. Nilai-Nilai Inti Aparatur Sipil Negara (ASN)

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *Core Values* ASN ini sebagai inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

Core Values ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo “ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai *core values* yang sama.”

Panduan Perilaku *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta Pemerintah yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- Bertindak proaktif.

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

ASN harus mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga ditetapkan *Employer Branding* ASN #banggamelayanibangsa



Gambar 5. *Employer Branding* ASN

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Reviu Rencana Strategis BPS Kota Surabaya Tahun 2020-2024 karena terbitnya Perban BPS No. 3 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Kepala badan Pusat Statistik Nomor 38 tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 dan Perka BPS No.4 Tahun 22 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik tahun 2020-2024. Berikut ditampilkan Reviu rencana Strategis BPS Kota Surabaya tahun 2020-2024 :

Tabel 6. Reviu Rencana Strategis 2020- 2024

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja berdasar IKU Perka BPS Nomor38 Tahun 2020	Target		Indikator Kinerja berdasar IKU Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022	Target			UIC
			2020	2021		2022	2023	2024	
1.	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan								
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	50	85,71	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	92*	93*	95*	IPDS
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN								
	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik(%)	-	-	Persentase Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	30,77*	38,48*	46,15*	IPDS
		Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	-	-	Persentase Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang menyampaikan metadata sektoralsesuai standar (%)	50*	53*	58*	IPDS

3.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandirisuai NSPK (%)	-	-	Persentase Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	92,31*	92,86*	93,33*	Sosial, Produksi, Distribusi, IPDS, dan Nerwilis
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
SDM Statistik yang unggul dna berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	64	65	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	66	68	70	Subbag Umum
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap saranandan prasarana pelayanan BPS (%)	100	100	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	93*	94*	95*	Subbag Umum

* Target pada tahun 2022-2024 berubah karena berubahnya metode perhitungan target kinerja indikator

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Surabaya 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun atau pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja ditetapkan pada awal tahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Target Perjanjian Kinerja 2023 BPS Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut:

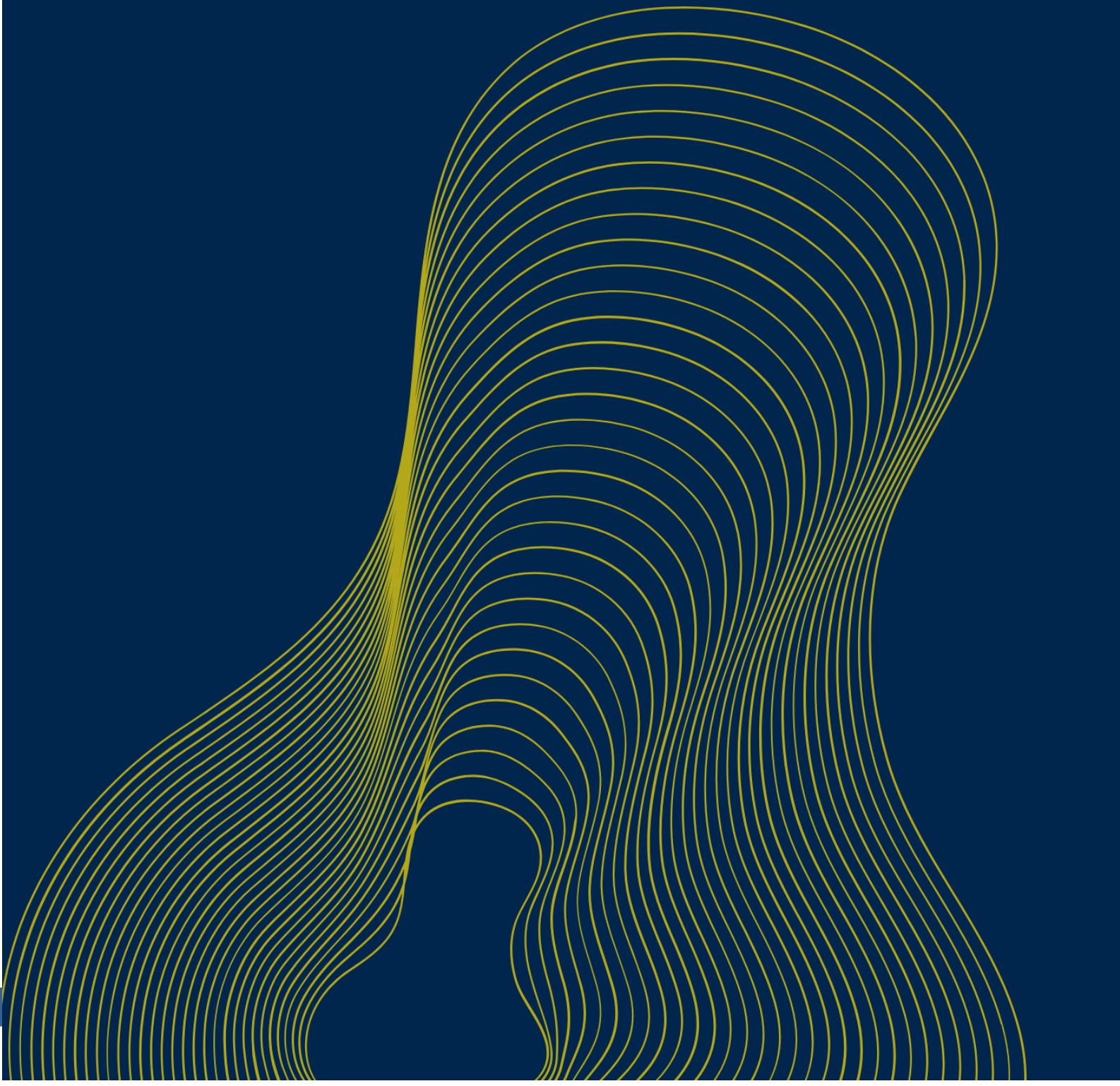
Tabel 7. Perjanjian Kinerja 2023

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	100	
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Persen	100	

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN				30.016.000
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	42,86	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	53,85	
3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				3.000.000
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	92,86	
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi				7.045.380.000
4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	70,05	
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	98	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2023

Capaian kinerja BPS Kota Surabaya 2023 merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2023. Capaian kinerja diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kota Surabaya Tahun 2022 dan 2023

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
T1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			85,60			100,00
SS 1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas			85,60			100,00
SS 1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	92	100	108,70	100,00	100,00
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi	100	62,50	62,50	100,00	100,00
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN			96,15			100,00

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN			96,15			100,00
SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Percentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	30,77	30,77	100,00	42,86	57,14
	Percentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	50	46,15	92,31	53,85	53,85
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			108,33			107,69
SS 3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I			108,33			107,69
SS 3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Percentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	92,31	100	108,33	92,85	100
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			106,79			101,45
SS 4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka			106,79			101,45

Tujuan / Sasaran Strategis/ Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SS 4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	65	70,05	107,77	70,05	70,65
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Provinsi	93	98,4	105,81	98	100
Rata-rata capaian kinerja tujuan				97,92		104,37

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2023 sebesar 104,37 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 97,92 persen. Nilai tahun 2023 sudah di atas 100 persen yang menunjukkan capaian yang diraih melebihi target yang sudah ditetapkan. Uraian capaian kinerja indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut.

3.1.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Tujuan Pertama “Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” dicapai dengan sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas. Pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis tersebut dilakukan dengan beberapa indikator dengan capaian seperti pada tabel berikut:

Tabel 9. Capaian Kinerja Tujuan Pertama: Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
T1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan						

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SS 1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas						
SS 1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Percentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	92	100	108,70	100,00	100,00
	Percentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi	100	62,50	62,50	100,00	100,00
Rata-rata capaian kinerja sasaran			85,60			100,00
Capaian kinerja tujuan pertama			85,60			100,00

1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)

Indikator pertama dari sasaran strategis pertama untuk tujuan pertama adalah Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%) dihitung dengan menggunakan formula :

$$\% \text{ pengguna data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan}_1 = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

x = Jumlah pengguna data yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi Pembangunan Nasional.

y = Jumlah pengguna data yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data BPS

Catatan: Untuk indikator ini hanya ditanyakan pada responden yang berasal dari OPD yang pernah menerima layanan BPS Kota Surabaya.

BPS Kota Surabaya sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menghasilkan data statistik, sudah sewajarnya jika BPS Kota Surabaya dijadikan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Hal tersebut tercermin dari hasil SKD sebesar 100 persen. Jika dibandingkan dengan target sebesar 100 persen, maka menunjukkan telah tercapainya kinerja dari yang telah ditargetkan.

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	100	100	100

Nilai sebesar 100 persen pada tahun 2023 mengindikasikan bahwa telah terbangun kerja sama dan komunikasi yang cukup baik antara BPS Kota Surabaya dengan OPD. Dinas di lingkup Kota Surabaya sudah cukup intens menggunakan data BPS untuk tujuan perencanaan, monitoring, dan evaluasi Pembangunan.

Sementara itu, capaian indikator penunjang “persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan manusia” sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Jumlah publikasi statistik yang terbit tepat waktu	Publikasi	9	9	100,00
Jumlah rilis data statistik yang dilaksanakan tepat waktu	Rilis	14	14	100,00
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	Pengunjung (unik)	120.000	136.282	113,57

Indikator penunjang yang pertama adalah jumlah publikasi statistik yang terbit tepat waktu. BPS Kota Surabaya dapat memenuhi jumlah target publikasi yang harus terbit tepat waktu. Daftar publikasi yang diterbitkan tepat waktu oleh BPS Kota Surabaya ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 10. Publikasi Statistik BPS Kota Surabaya yang Terbit Tepat Waktu Tahun 2023

Tim	No	Judul	Realisasi rilis pada triwulan			
			1	2	3	4
Sosial	1	Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023				1
	2	Statistik Ketenagakerjaan 2022				1
Distribusi	1	Statistik Keuangan Daerah 2023				1
Produksi	1	Direktori Industri Manufaktur 2023				1
Nerwilis	1	PDRB menurut Pengeluaran 2018-2022		1		
	2	PDRB menurut Lapangan Usaha 2018-2022		1		
	3	Statistik Daerah 2023				1
	4	Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023				1
	5	Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya Tahun 2022		1		
IPDS	1	Kota Surabaya Dalam Angka 2023	1			
Jumlah per triwulan			1	3	0	5
Jumlah kumulatif			1	4	4	9

Indikator penunjang yang kedua adalah jumlah rilis data statistik yang dilaksanakan tepat waktu. BPS Kota Surabaya dapat memenuhi jumlah target rilis data statistik yang dilaksanakan tepat waktu. Daftar rilis data yang dilaksanakan tepat waktu oleh BPS Kota Surabaya ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 11. Tabel Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Kota Surabaya yang Terbit Tepat Waktu
Tahun 2023

No	Judul	Realisasi RILIS pada triwulan			
		1	2	3	4
1	BRS Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022	1			
2	BRS IPM 2023				1
3	BRS Inflasi Bulan Januari 2023	1			
4	BRS Inflasi Bulan Februari 2023	1			
5	BRS Inflasi Bulan Maret 2023		1		
6	BRS Inflasi Bulan April 2023		1		
7	BRS Inflasi Bulan Mei 2023		1		
8	BRS Inflasi Bulan Juni 2023			1	
9	BRS Inflasi Bulan Juli 2023			1	
10	BRS Inflasi Bulan Agustus 2023			1	
11	BRS Inflasi Bulan September 2023				1
12	BRS Inflasi Bulan Oktober 2023				1
13	BRS Inflasi Bulan November 2023				1
14	BRS Inflasi Bulan Desember 2022	1			
	Jumlah per triwulan	4	3	3	4
	Jumlah kumulatif	4	7	10	14

Dari ketiga indikator penunjang tersebut, terdapat satu indikator yang melebihi 100 persen, yakni jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website* BPS yakni sebesar 113,57 persen. Hal ini menunjukkan antusiasme dalam memanfaatkan pelayanan BPS Kota Surabaya yang tersedia di *website* BPS Kota Surabaya.

Kendala :

1. Respon target sampel survei SKD cenderung kurang responsif, dikarenakan kurangnya infomasi mengenai pelaksanaan SKD.
2. Belum semua stakeholder memahami dengan baik berbagai indikator yang dihasilkan oleh BPS dan pada sisi respon rate masih dibawah target.
3. Angka final perhitungan IHK yang dikirimkan BPS RI terlalu dekat dengan jadwal rillis. Selain itu, inflasi ini menjadi target sasaran oleh pemerintah kota lewat tim pengendali inflasi daerah.
4. Dalam pelaksanaan FKP Regsosèk, karakteristik masyarakat Surabaya yg heterogen, kritis, berpendidikan maju, namun memiliki waktu luang yang terbatas, sehingga informasi mengenai FKP tidak tersampaikan dengan baik yang menyebabkan kesalahpahaman dengan tokoh Masyarakat atau apparat lingkungan setempat.
5. Hasil PMT Pendataan Awal Regsosèk masih ditemukan ketidaksesuaian kriteria keluarga miskin yaitu hasil PMT menunjukkan keluarga kriteria tidak miskin namun penilaian dari Ketua SLS mengkategorikan sebagai keluarga miskin.
6. Adanya penurunan pengunjung *website* terutama di bulan Agustus dan September.

Solusi :

1. Menjaga hubungan baik dengan pengguna data serta memberikan layanan responsif kepada pengguna data, baik secara *offline* pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) maupun *online* melalui media sosial. Sekaligus mendekati secara personal dalam survei SKD. (kendala 1)
2. Pada saat pelaksanaan SKD dilakukan sosialisasi secara masif, baik dengan menghubungi pengguna data, *broadcast* dengan media sosial agar target responden tercapai (kendala 1)
3. Kontak layanan permintaan data telah dioptimalkan. Dengan layanan *whatsapp* pengguna data dapat melakukan interaksi dua arah untuk mengkonsultasikan data tanpa harus berkunjung ke BPS Kota Surabaya. (kendala 1)
4. Untuk menjawab tantangan keraguan *stakeholder* serta *respon rate* yang rendah. BPS kota Surabaya melakukan sosialisasi kegiatan mulai dari perekrutan mitra, pendataan, koordinasi, hingga diseminasi data dengan menggunakan media sosial.

Media sosial BPS Kota Surabaya yang selalu *update* untuk memberikan informasi kepada publik setiap harinya.(kendala 2)

Facebook: https://www.facebook.com/bpssurabayakota/?locale=id_ID

Instagram : <https://www.instagram.com/bpskotasurabaya/>

Tiktok : <https://www.tiktok.com/@bpskotasurabaya>

Whatsapp: wa.me/6282140103578

https://api.whatsapp.com/send/?phone=6282140103578&text&type=phone_number&app_absent=0

Website : <https://surabayakota.bps.go.id/>

Email : bps3578@bps.go.id

Melalui media sosial, BPS Kota Surabaya menyampaikan aktivitas yang sedang dilakukan sehingga diharapkan mampu memberikan kepercayaan kepada pengguna data dan responden, bahwa kegiatan memang dilaksanakan secara resmi oleh BPS.

5. BPS Kota Surabaya membuat video yang menarik dalam rangka diseminasi data yang dipublish maupun kegiatan yang dilakukan oleh BPS, sehingga diharapkan masyarakat tertarik dengan proses maupun output yang dihasilkan oleh BPS Kota Surabaya. (kendala 2)
6. Melakukan pembagian tugas ke anggota tim statistik harga meliputi pembuatan *Power Point*, BRS, Infografis dan *Upload Data BRS*. (kendala 3)
7. Sosialisasi FKP dilaksanakan dengan mengadakan rekonsiliasi awal dengan tokoh masyarakat yang dijembatani oleh aparat kelurahan, kemudian membuat *leaflet* yang dapat disebarluaskan ke tokoh masyarakat dan aparat lingkungan setempat, sehingga anggota FKP mengerti tujuan dari diselenggarkannya kegiatan FKP tersebut. (kendala 4)
8. Melakukan *Groundcheck* (pengecekan awal terhadap hasil PMT pendataan awal Regsosek) untuk memastikan data hasil pendataan awal regsosek sudah sesuai dengan keadaan di lapangan.(kendala 5)
9. Strategi yang dilakukan yaitu dengan menepati publikasi terbit tepat waktu, rilis data tepat waktu dan menjaga data *website* ter-update sekaligus memberikan keberagaman data pada *website* BPS. (kendala 6)
10. Untuk mendongkrak pengunjung *website*, pengumuman yang bersifat penting juga ditautkan pada *website* BPS Kota Surabaya.(kendala 6)
11. Seluruh pegawai BPS Kota Surabaya diwajibkan mempromosikan *website* dan media sosial BPS Kota Surabaya.(kendala 6)

Rekomendasi Tahun Selanjutnya:

1. Meningkatkan pelayanan statistik secara lebih dekat dan intensif melalui pembangunan Aplikasi layanan statistik yang mudah diakses oleh pengguna data.
2. Menambah jumlah publikasi yang dihasilkan oleh BPS Kota Surabaya agar menjangkau pengguna data yang lebih luas.

Terkait penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Reformasi Birokrasi Tematik memiliki tujuan untuk mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, harus bisa berkontribusi langsung pada program prioritas presiden, serta mempercepat penyelesaian permasalahan utama di masyarakat. Dari tujuan tersebut, lahirlah fokus untuk melakukan pengentasan kemiskinan, meningkatkan investasi, melakukan digitalisasi administrasi pemerintah, serta percepatan prioritas presiden. Salah satu fokus dari reformasi birokrasi yakni pengentasan kemiskinan ekstrem yang bertujuan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada telah menggunakan sumber daya yang besar sehingga dapat berdampak secara optimal terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem. Penghapusan kemiskinan menjadi salah satu target presiden pada tahun 2024, yakni menghapus kemiskinan ekstrem hingga angka nol persen. Dalam hal ini BPS berperan dengan melakukan kegiatan FKP Pendataan Awal Regsosiek. Selain itu, dalam menanggulangi kemiskinan juga diperlukan pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

FKP PENDATAAN AWAL REGSOSEK

Inovasi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di Kota Surabaya yang memiliki karakteristik heterogen, masyarakat yang kritis, berpendidikan maju, dan memiliki waktu luang yang terbatas yaitu dengan memberi penjelasan secara sederhana kepada ketua SLS dan tokoh masyarakat yang akan menjadi anggota rapat FKP Regsosiek dengan memberikan penjelasan tentang konsep dan definisi FKP regsosek dan alur pendataan FKP Regsosiek dengan menggunakan infografis sebagai langkah mitigasi resiko dalam pelaksanaan FKP regsosek.



Gambar 6. Flyer Regsosek

Flyer ini dikirimkan kepada aparat kelurahan dan meminta bantuan untuk disebarluaskan kepada masyarakat sebagai langkah untuk mensosialisasikan kegiatan.

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Berubah Tidak Miskin ke Miskin (Kode 4 -> 2)	Berubah Tidak Miskin ke Sangat Miskin (Kode 4 -> 1)	Total Perubahan Kode 4 ke 1 atau 2	Berubah Rentan Miskin ke Sangat Miskin (Kode 3 -> 2)	Berubah Rentan Miskin ke Sangat Miskin (Kode 3 -> 1)
1	[78] SURABAYA	[210] KENJERAN	[006] SIDOTopo Wetan	1225	70	1295	140	140
7913	[78] SURABAYA	[230] SEMAMPIR	[004] WONOKUSUMO	1174	92	1266	210	210
7914	[78] SURABAYA	[210] KENJERAN	[005] TANAH KALI KEDINDING	1068	48	1116	150	150
7915	[78] SURABAYA	[200] TAMBAKSARI	[002] PACAR KEMBANG	857	87	944	69	65
7916	[78] SURABAYA	[110] WONOKROMO	[002] WONOKROMO	907	14	921	87	82
7917	[78] SURABAYA	[260] KREMBANGAN	[002] MOROKREMBANGAN	748	143	891	245	245
7918	[78] SURABAYA	[170] SAWAHAN	[002] PUTAT JAYA	706	67	773	153	153
7919	[78] SURABAYA	[230] SEMAMPIR	[002] SIDOTopo	640	128	768	181	181
7920	[78] SURABAYA	[240] PABEAN CANTIAN	[005] PERAK UTARA	602	112	714	159	155
7921	[78] SURABAYA	[170] SAWAHAN	[001] PAKIS	572	85	657	34	34
7922	[78] SURABAYA	[250] BUBUTAN	[001] TEMBOK DUKUH	583	69	652	88	88
7923	[78] SURABAYA	[200] TAMBAKSARI	[007] KAPASMADYA BARU	621	17	638	67	67
7924	[78] SURABAYA	[170] SAWAHAN	[005] PETEMON	563	69	632	83	83
7925	[78] SURABAYA	[260] KREMBANGAN	[004] KEMAYORAN	508	83	591	76	76
7926	[78] SURABAYA	[150] TANDES	[010] MANUKAN KULON	464	84	548	98	98
7927	[78] SURABAYA	[160] SUKO MANUNGKAL	[006] SIMOMULYO BARU	509	34	543	45	45
7928	[78] SURABAYA	[200] TAMBAKSARI	[003] PLOSO	481	62	543	108	108
7929	[78] SURABAYA	[200] TAMBAKSARI	[006] GADING	464	45	519	67	67
7930	[78] SURABAYA							

Gambar 7. Screenshot Validasi PMT Regsosek

Berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan, PMT Pendataan Awal Regsosek masih ditemukan ketidaksesuaian kriteria keluarga tidak miskin namun penilaian dari Ketua SLS mengkategorikan sebagai keluarga miskin. Berdasarkan kondisi tersebut maka telah dilakukan :

1. *Groundcheck* (pengecekan awal) terhadap hasil PMT Pendataan Awal regsosek untuk memastikan data hasil pendataan awal regsosek sudah sesuai dengan keadaan di lapangan.
2. Tim Dsospro dan Tim Dilan melakukan perbaikan data tidak sesuai menggunakan data hasil *groundcheck* lapangan dan memastikan hasil pendataan awal regsosek siap digunakan sebagai bahan untuk Forum Komunikasi Publik bulan Mei 2023.

3. Melakukan supervisi lapangan dan memastikan pengolahan data hasil pendataan sesuai SOP dan juga memastikan pengolahan data hasil pendataan dengan baik dan benar.

INFLASI

BPS berperan sebagai penyedia data inflasi yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan juga perencanaan bagi tim pengendali inflasi daerah. Oleh karena itu, setiap bulannya BPS Kota Surabaya berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memantau harga komoditi dan juga berkolaborasi untuk memberikan masukan yang sangat berguna dalam menentukan kebijakan.

2. Persentase Publikasi Statistik yang Menerapkan Standard Akurasi (%)

Berdasarkan Undang-Undang No.16 tentang Statistik Tahun 1997, Badan Pusat Statistik (BPS) berkewajiban menyebarluaskan hasil kegiatannya kepada publik. Cara penyebarluasan bisa melalui *website*, publikasi, dan lain sebagainya. Hingga saat ini penyebarluasan data dan informasi statistik masih banyak dilakukan melalui media publikasi.

Publikasi diperlukan karena adanya suatu kebutuhan terhadap berbagai data dan informasi statistik dari para pengguna. Salah satu jenis yang dicari oleh para pengguna adalah data statistik atau informasi, khususnya bagi para pembuat keputusan. Keputusan-keputusan yang diambil hendaklah didasari pada informasi yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, BPS sebagai penyedia data statistik yang berkualitas dituntut agar mampu menyediakan data atau informasi yang akurat, berkesinambungan dan tepat waktu.

Persentase publikasi statistik yang menerapkan *standard* akurasi (%) dihitung dengan menggunakan formula

$$\text{Publikasi yang menerapkan standard akurasi} = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

x = Jumlah publikasi statistik yang dihasilkan yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi.

y = Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi yang ditargetkan terbit.

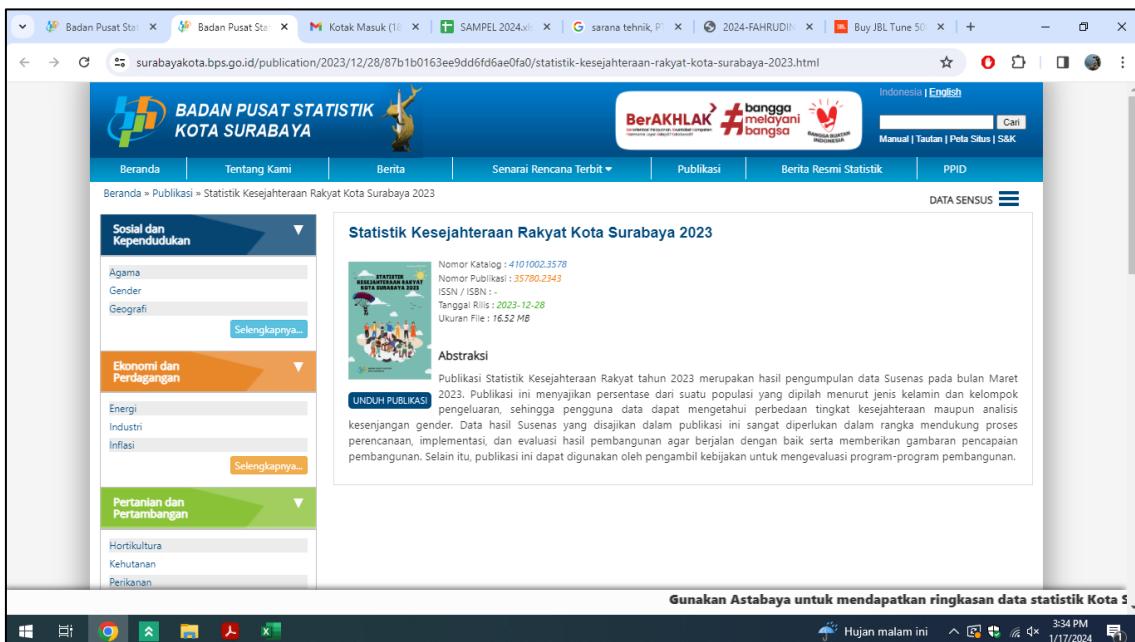
Publikasi yang dihitung adalah publikasi yang memuat indikator yang bersumber dari survei yang memenuhi standar akurasi oleh PMSS. Publikasi tidak harus menampilkan RSE, cukup memuat indikator yang bersumber dari survei yang memenuhi standar akurasi. Pada publikasi ini tidak membedakan ARC dan Non ARC.

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Persen	100	100	100

Dari target kinerja indikator sebesar 100 persen, seluruh publikasi berhasil diterbitkan tepat waktu sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi tahun 2023 lebih besar disebabkan seluruh target yang direncanakan dapat tercapai.

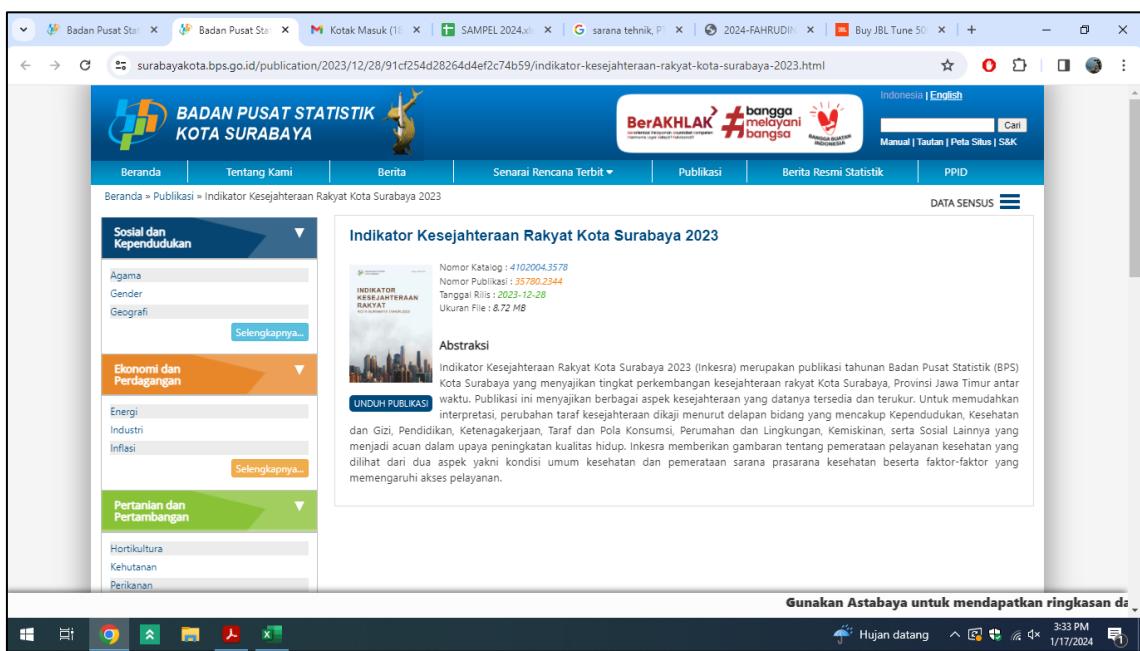
Pada tahun 2023 Publikasi yang telah disusun BPS Kota Surabaya yang menerapkan standar akurasi adalah:

- ✓ Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023 rilis pada tanggal 28 Desember 2023



Gambar 8. Screenshot Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya 2023 pada Website BPS Kota Surabaya

- ✓ Publikasi Indikator Kesejahteraan Kota Surabaya 2023 rilis pada tanggal 29 Desember 2023



Gambar 9. *Screenshot* Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya 2023 pada Website BPS Kota Surabaya

Kendala :

Proses pemeriksaan dan editing publikasi belum optimal, masih ditemukan beberapa kesalahan penulisan

Solusi :

1. Melibatkan pejabat fungsional statistisi pertama maupun muda untuk terlibat secara aktif dalam penyusunan publikasi sehingga publikasi bisa terbit tepat waktu.
 2. Melibatkan seluruh pegawai untuk memeriksa hasil *draft* publikasi yang akan diterbitkan.

Rekomendasi Tahun Selanjutnya :

Menambahkan jumlah publikasi yang menerapkan standar akurasi pada rencana penerbitan publikasi BPS Kota Surabaya tahun 2024.

3.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Kedua

Tujuan kedua “**Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN**” dicapai dengan sasaran strategis “Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN”. Pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis tersebut dilakukan dengan beberapa indikator dengan capaian seperti pada tabel berikut:

Tabel 12. Capaian Kinerja Tujuan Kedua: Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan SSN

Tujuan/ Sasaran Strategis/Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN						
SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN						
SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	30,77	30,77	100,00	42,86	57,14
						120,00

Tujuan/ Sasaran Strategis/Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	50	46,15	92,31	53,85	53,85	100,00
Rata-rata capaian kinerja sasaran			96,15			100,00
capaian kinerja tujuan kedua			96,15			100,00

Dari target kinerja indikator sebesar 100 persen, yang artinya seluruh publikasi berhasil diterbitkan secara tepat waktu sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi 2023 lebih tinggi.

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mendapatkan Rekomendasi Kegiatan Statistik (%)

Kegiatan statistik seperti survei tidak hanya dilakukan oleh BPS saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya. Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, instansi pemerintah yang akan melakukan kegiatan statistik diwajibkan melaporkan kegiatan statistik yang akan dilaksanakan kepada BPS. Setelah diteliti dan diproses oleh BPS akan dikeluarkan suatu rekomendasi yang menyatakan kegiatan yang bersangkutan layak atau tidak untuk dilanjutkan. Tujuan pelaporan kegiatan statistik adalah untuk melengkapi Sistem Statistik Nasional (SSN), agar dalam mengadakan kegiatan statistik tidak terjadi duplikasi kegiatan statistik.

Adanya pemberitahuan kegiatan statistik sektoral ke BPS diharapkan dapat membantu masyarakat umum dalam mencari data statistik yang diperlukan. Metadata base kegiatan statistik yang dikembangkan tidak hanya memuat kegiatan statistik dasar (kegiatan statistik yang dilaksanakan BPS) tetapi juga mencakup kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah selain BPS dan lembaga swasta. Peran aktif instansi pemerintah dalam melaporkan kegiatan statistik ke BPS sangat membantu BPS dalam mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien.

Pada prinsipnya, semua instansi pemerintah, baik kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian yang memperoleh dana dari APBN dan atau APBD wajib memberitahukan, mengikuti rekomendasi dari BPS, dan menyerahkan hasil penyelenggaraan survei mereka. Proses ini tidak berlaku untuk instansi pemerintah lain yang karena undang-undang tidak masuk UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik.

Capaian indikator tersebut diperoleh melalui rumusan Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi target pembinaan dikalikan dengan 100% dengan formula matematis sebagaimana berikut:

$$P\ LmRS = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

P LmRS : Persentase OPD produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.

x : Jumlah organisasi OPD yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.

y : Jumlah Organisasi OPD yang menjadi target pembinaan.

Pengukuran ini bermanfaat untuk mengukur tingkat capaian Badan Pusat Statistik dalam membina kegiatan statistik OPD melalui rekomendasi kegiatan statistik yang didapatkan oleh OPD diselenggarakan dengan periode tahunan.

Persentase OPD yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik diperoleh melalui perhitungan jumlah OPD sebagai produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS Kota Surabaya dibagi dengan jumlah OPD yang menjadi target pembinaan statistik sektoral dikalikan 100 persen.

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	42,86	57,14	120,00

OPD yang menjadi target pembinaan statistik sektoral sebanyak 14 OPD. Berdasarkan pencapaian pada tahun 2022 yaitu 30,77 persen, maka target minimal OPD yang mendapatkan rekomendasi statistik pada tahun 2023 adalah 6 OPD atau sekitar 42,86 persen. Namun dalam realisasinya kita mampu mendapatkan 8 OPD atau sekitar 57,14 persen atau dengan capaian

sebesar 120 persen. Hal ini dapat tercapai karena usaha yang dilakukan oleh Tim IPDS BPS Kota Surabaya yaitu dengan melakukan kunjungan secara personal ke setiap OPD sehingga OPD tersebut lebih memahami cara mengajukan rekomendasi statistik. Nama OPD-OPD yang telah menyampaikan rekomendasi statistik dapat di lihat di tabel berikut

Tabel 13. Jumlah Rekomendasi Statistik yang Telah Disampaikan OPD

No.	OPD yang Melakukan Kegiatan Statistik	Jumlah Rekomendasi Statistik yang Disampaikan
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	2
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan pengembangan Kota Surabaya	1
3	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Surabaya	1
4	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya	1
5	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Surabaya	1
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya	1
7	Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kota Surabaya	1
8	Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Surabaya	1

Kendala :

Sering terjadi pergantian atau perubahan PIC di instansi sektoral terutama yang menangani Satu Data Indonesia. Hal ini menghambat proses rekomendasi statistik selanjutnya karena PIC pengganti belum memahami proses bisnis penyelenggaraan statistik.

Solusi :

1. Membentuk Tim SDI yang menangani kegiatan pembinaan statistik sektoral, dimana satu orang menjadi *Liaison Officer* (LO) atau narahubung untuk 1 (satu) OPD tertentu. Koordinasi dilakukan dengan LO yang sama untuk beberapa kegiatan yang berkaitan dengan dinas, sehingga mempermudah koordinasi karena hanya menghubungi satu orang LO yang tidak berubah-ubah. Berikut daftar OPD beserta LO nya:

Tabel 14. Daftar Nama LO Pembinaan Statistik Sektoral pada Setiap OPD

No	OPD	STATUS	Nama LO
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	OPD	Bagus Wahyu Purnomo, S.M.
2	Dinas Sosial	OPD	Antonius Priyo Trikristiono, SE
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	OPD	Andy Asyarisupriyadi, SE
4	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	OPD	Alfian Rosyadi, SST
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	OPD	Bilal Ali Maghshar Sri Muljono, SST
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata	OPD	Anilur Rohman, A.Md.
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	OPD	Falah Hardiman, SE
8	Dinas Lingkungan Hidup	OPD	Diah Asri Nindyaswari, SST
9	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	OPD	Wulan Nuryulianingdyah, S.Si
10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	OPD	Iswanto, SST
11	Dinas Pendidikan	OPD	Fitri Kusumowardhani, SST
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	OPD	Paramitha Dian Linggani Putri, S.M.
13	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	OPD	Rizka Ayu Oktaviani, S.ST
14	Dinas Kesehatan	OPD	Nunung Datau, SST

2. BPS Kota Surabaya bersinergis dengan Diskominfo Kota Surabaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap OPD dalam mengisi pengajuan rekomendasi melalui romantik.web.bps.go.id.
3. BPS Kota Surabaya telah melaksanakan FGD Satu Data Indonesia terhadap 29 OPD pada tanggal 31 Oktober 2023. FGD ini bertujuan untuk mengenalkan kembali Satu Data Indonesia, peran BPS, peran pemerintah daerah dalam Satu data Indonesia, dan materi SDI lainnya. Pada acara ini, BPS Kota Surabaya melakukan pendampingan secara langsung kepada OPD untuk melaporkan kegiatan statistik sektoral yang dilakukan. BPS juga melakukan pendampingan terhadap OPD yang belum menyampaikan metadata statistik sektoral pada aplikasi Romantik dan Indah hub.

Rekomendasi Tahun Selanjutnya :

BPS Kota Surabaya selaku pembina statistik sektoral akan menambah jumlah OPD yang menjadi target pembinaan statistik. Pembinaan dan koordinasi akan dilakukan dengan lebih intens. Salah satunya dengan melaksanakan semacam sosialisasi, *workshop*, atau FGD untuk OPD. Di samping itu, BPS Kota Surabaya juga berencana memberikan pembinaan secara personal kepada OPD agar keberlanjutan pelaporan romantik dapat terus berlangsung.

2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menyampaikan Metadata Sektoral Sesuai Standar (%)

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Metadata mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file/data tersebut dalam suatu basis data. Dasar hukum penyusunan metadata statistik adalah:

- a. UU NO. 16 TAHUN 1997 tentang Statistik
- b. Peraturan Walikota Surabaya No. 126 Tahun 2021
- c. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
- d. MISI BPS untuk memperkuat SSN

Penyusunan metadata statistik yang tepat bermanfaat untuk:

1. Bagi Pengembang Data/Peneliti
 - Menghindari duplikasi
 - Sharing informasi
 - Publikasi output
 - Mengurangi beban kerja
 - Dokumentasi data dan informasi
2. Bagi Pengguna Data
 - Memudahkan pencarian maupun evaluasi informasi
 - Memudahkan dalam menggunakan data agar sesuai dengan yang diperlukan
 - Memudahkan dalam mengidentifikasi bagaimana data tersebut diperoleh, dihitung, dan diestimasi
3. Bagi Organisasi/Institusi

- Memudahkan pengelolaan data dan informasi sebagai investasi organisasi
- Dokumentasi tahapan pengolahan data, pengendalian mutu, definisi, penggunaan data, keterbatasan, dan sebagainya
- Memudahkan mengingat keberadaan data
- Membantu instansi lain yang berpotensi menggunakan data

Jenis-jenis metadata sektoral adalah:

a. Metadata Kegiatan:

Menjelaskan rencana kegiatan hingga publikasi hasil. Metadata Kegiatan memuat:



Gambar 10. Muatan Dalam Metadata Kegiatan

b. Metadata Indikator: Menjelaskan teknis memperoleh indikator



Gambar 11. Indikator Metadata

c. Metadata Variabel: Menjelaskan teknis memperoleh indikator



Gambar 12. Variabel Metadata

Capaian Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%) diperoleh melalui rumusan Jumlah OPD yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar dibagi dengan Jumlah OPD yang melakukan kegiatan statistik dikalikan 100% dengan formula matematis sebagaimana berikut:

$$P\ LmM = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

- P LmM : Persentase OPD yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar.
x : Jumlah OPD yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar
y : Jumlah OPD yang melakukan kegiatan statistik.

Pengukuran ini bermanfaat untuk mengukur tingkat capaian Badan Pusat Statistik dalam membina kegiatan statistik OPD melalui metadata statistik sektoral sesuai standar yang telah disampaikan oleh OPD dengan periode tahunan.

Persentase OPD yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar diperoleh melalui perhitungan jumlah OPD yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar dibagi dengan jumlah OPD yang melakukan kegiatan statistik dikalikan 100 persen.

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	53,85	53,85	100

BPS Kota Surabaya menargetkan 14 OPD yang melakukan pengisian metadata kegiatan statistik sektoral dari 26 OPD yang melakukan kegiatan statistik. Dari target awal 14 OPD BPS Kota Surabaya mampu merealisasikan seluruhnya dengan nilai realisasi 53,85 persen atau dengan capaian 100 persen.

Tabel 15. Jumlah Metadata Statistik sesuai standar yang Telah Disampaikan OPD

No.	OPD yang melakukan kegiatan statistik	Jumlah Metadata Statistik yang Disampaikan
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1
2	Dinas Sosial	1
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1
4	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	1
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata	1
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1
8	Dinas Lingkungan Hidup	1
9	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1
10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1
11	Dinas Pendidikan	1
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1
13	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	1
14	Dinas Kesehatan	1

Kendala :

1. OPD tidak langsung mengisi metadata sektoral karena kesibukan kegiatan pada instansi tersebut.
2. Kurangnya pengetahuan tentang cara pengisian metadata statistik sektoral yang sesuai standar.

Solusi :

1. Membentuk Tim SDI yang menangani kegiatan pembinaan statistik sektoral, dimana satu orang menjadi *Liaison Officer* (LO) atau narahubung untuk 1 (satu) OPD tertentu. Koordinasi dilakukan dengan LO yang sama untuk beberapa kegiatan yang berkaitan dengan dinas, sehingga mempermudah koordinasi karena hanya menghubungi satu orang LO yang tidak berubah-ubah. Berikut daftar OPD beserta LO nya:

Daftar Nama LO Pembinaan Statistik Sektoral pada Setiap OPD

No	OPD	STATUS	LO
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	OPD	Bagus Wahyu Purnomo, S.M.
2	Dinas Sosial	OPD	Antonius Priyo Trikristiono, SE
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	OPD	Andy Asyarisupriyadi, SE
4	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	OPD	Alfian Rosyadi, SST
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	OPD	Bilal Ali Maghshar Sri Muljono, SST
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata	OPD	Anilur Rohman, A.Md.
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	OPD	Falah Hardiman, SE
8	Dinas Lingkungan Hidup	OPD	Diah Asri Nindyaswari, SST
9	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	OPD	Wulan Nuryulianingdyah, S.Si
10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	OPD	Iswanto, SST
11	Dinas Pendidikan	OPD	Fitri Kusumowardhani, SST
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	OPD	Paramitha Dian Linggani Putri, S.M.
13	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	OPD	Rizka Ayu Oktaviani, S.ST
14	Dinas Kesehatan	OPD	Nunung Datau, SST

2. BPS Kota Surabaya telah melaksanakan FGD Satu Data Indonesia terhadap 29 OPD pada tanggal 31 Oktober 2023. FGD ini bertujuan untuk mengenalkan kembali Satu Data Indonesia, peran BPS, peran pemerintah daerah dalam Satu data Indonesia, dan materi SDI lainnya. Pada acara ini, BPS Kota Surabaya melakukan pendampingan

secara langsung kepada OPD untuk melaporkan kegiatan statistik sektoral yang dilakukan. BPS juga melakukan pendampingan terhadap OPD yang belum menyampaikan metadata statistik sektoral pada aplikasi Romantik dan Indah hub.

Rekomendasi Tahun Selanjutnya :

BPS Kota Surabaya selaku pembina statistik sektoral akan menambah jumlah OPD yang menjadi target pembinaan statistik. Pembinaan dan koordinasi akan dilakukan dengan lebih intens. Salah satunya dengan melaksanakan semacam sosialisasi, *workshop*, atau FGD untuk OPD. Di samping itu, BPS Kota Surabaya juga berencana memberikan pembinaan secara personal kepada OPD agar keberlanjutan pelaporan romantik dapat terus berlangsung.

3.1.3. Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Ketiga

Tujuan ketiga “**Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN**” dicapai dengan sasaran strategis “Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I”. Pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis tersebut dilakukan dengan beberapa indikator dengan capaian seperti pada tabel berikut:

Tabel 16. Capaian Kinerja Tujuan Ketiga: Meningkatnya Pelayanan Prima Dalam Penyelenggaraan SSN

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			108,33			107,69
SS 3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I			108,33			107,69
SS 3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	92,31	100	108,33	92,85	100
Rata-rata capaian kinerja Sasaran			108,33			107,69
capaian kinerja tujuan ketiga			108,33			107,69

Nilai capaian kinerja tujuan ini adalah sebesar 107,69 persen yang diperoleh dari nilai indikator sasaran strategis. Capaian kinerja tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Meskipun demikian, realisasi yang lebih dari 100 persen, mengindikasikan bahwa BPS Kota Surabaya telah mampu berusaha untuk mencapai pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN di tahun 2023. Sasaran strategis yang harus dicapai untuk terwujudnya tujuan ketiga yaitu penguatan statistik sektoral K/L/D/I. Sasaran strategis ini memiliki satu indikator kinerja yaitu Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik.

Untuk mengukurnya digunakan rumusan jumlah OPD yang mendapat pembinaan statistik dibagi dengan jumlah OPD yang menjadi target pembinaan dikalikan 100% dengan formula matematis:

$$P\ LmSS = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

P LmSS : Persentase OPD yang mendapat pembinaan statistik (%).

x : Jumlah OPD yang mendapat pembinaan statistik

y : Jumlah OPD yang menjadi target pembinaan statistik

Pengukuran ini bermanfaat untuk mengukur tingkat capaian Badan Pusat Statistik dalam membina kegiatan statistik OPD dalam periode tahunan. Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan statistik diperoleh melalui perhitungan jumlah OPD yang mendapat pembinaan statistik dibagi dengan jumlah OPD yang menjadi target pembinaan statistik dikalikan 100 persen.

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	92,86	100	107,69

Tahun 2023 BPS Kota Surabaya menargetkan 13 OPD yang mendapat pembinaan statistik. Dari target tersebut, realisasinya BPS Kota Surabaya mampu melakukan pembinaan statistik terhadap 14 OPD atau 100 persen dengan nilai capaian sebesar 107,69 persen. Berikut daftar OPD yang mendapatkan pembinaan statistik sektoral pada tahun 2023 :

Tabel 17. Daftar OPD yang Mendapatkan Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2023

No.	OPD Target Pembinaan	Mendapat Pembinaan
1	Dinas Pendidikan	Ya
2	Dinas Kesehatan	Ya
3	Dinas Sosial	Ya
4	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ya
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ya
6	Dinas Lingkungan Hidup	Ya
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ya
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ya
9	Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Ya
10	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Ya
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Ya
12	Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	Ya
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ya
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ya

Kendala :

1. Jadwal waktu pembinaan statistik sektoral antara BPS dan OPD yang belum selaras.
2. PIC Satu Data Indonesia pada OPD berubah karena adanya mutasi di lingkup pemerintah daerah sehingga diperlukan sosialisasi kembali mengenai pembinaan statistik sektoral.

Solusi :

1. Membentuk Tim SDI yang menangani kegiatan pembinaan statistik sektoral, dimana satu orang menjadi *Liaison Officer* (LO) atau narahubung untuk 1 (satu) OPD tertentu. Koordinasi dilakukan dengan LO yang sama untuk beberapa kegiatan yang berkaitan dengan dinas, sehingga mempermudah koordinasi karena hanya menghubungi satu

orang LO yang tidak berubah-ubah.

Berikut daftar OPD beserta LO nya:

Daftar Nama LO Pembinaan Statistik Sektoral pada Setiap OPD

No	OPD	STATUS	LO
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	OPD	Bagus Wahyu Purnomo, S.M.
2	Dinas Sosial	OPD	Antonius Priyo Trikristiono, SE
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	OPD	Andy Asyarisupriyadi, SE
4	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	OPD	Alfian Rosyadi, SST
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	OPD	Bilal Ali Maghshar Sri Muljono, SST
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata	OPD	Anilur Rohman, A.Md.
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	OPD	Falah Hardiman, SE
8	Dinas Lingkungan Hidup	OPD	Diah Asri Nindyaswari, SST
9	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	OPD	Wulan Nuryulianingdyah, S.Si
10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	OPD	Iswanto, SST
11	Dinas Pendidikan	OPD	Fitri Kusumowardhani, SST
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	OPD	Paramitha Dian Linggani Putri, S.M.
13	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	OPD	Rizka Ayu Oktaviani, S.ST
14	Dinas Kesehatan	OPD	Nunung Datau, SST

2. Melakukan kunjungan atau jemput bola ke beberapa OPD dalam melakukan pembinaan.
3. BPS Kota Surabaya telah melaksanakan FGD Satu Data Indonesia terhadap 29 OPD pada tanggal 31 Oktober 2023. FGD ini bertujuan untuk mengenalkan kembali Satu Data Indonesia, peran BPS, peran pemerintah daerah dalam Satu data Indonesia, dan materi SDI lainnya. Pada acara ini, BPS Kota Surabaya melakukan pendampingan

secara langsung kepada OPD untuk melaporkan kegiatan statistik sektoral yang dilakukan. BPS juga melakukan pendampingan terhadap OPD yang belum menyampaikan metadata statistik sektoral pada aplikasi Romantik dan Indah hub.

Rekomendasi Tahun Selanjutnya :

BPS Kota Surabaya selaku pembina statistik sektoral akan menambah jumlah OPD yang menjadi target pembinaan statistik. Pembinaan dan koordinasi akan dilakukan dengan lebih intens. Salah satunya dengan melaksanakan semacam sosialisasi, *workshop*, atau FGD untuk OPD. Di samping itu, BPS Kota Surabaya juga berencana memberikan pembinaan secara personal kepada OPD agar keberlanjutan pelaporan romantik dapat terus berlangsung.

3.1.4. Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Keempat

Tujuan keempat “**Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi**” dicapai dengan sasaran strategis yaitu SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan. Pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis tersebut dilakukan dengan beberapa indikator dengan capaian seperti pada tabel berikut:

Tabel 18. Capaian Kinerja Tujuan Keempat: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

Tujuan/ Sasaran Strategis/Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			106,79			101,45
SS 4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka			106,79			101,45
SS 4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	65	70,05	107,77	70,05	70,65
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Provinsi	93	98,4	105,81	98	100

Tujuan/ Sasaran Strategis/Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja sasaran			106,79			101,45
Capaian Kinerja Tujuan Keempat			106,79			101,45

Nilai capaian kinerja tujuan keempat mencapai 101,45 diperoleh dari rata-rata nilai capaian kinerja sasaran strategisnya. Nilai ini melampaui target, seperti halnya dengan realisasi kinerja tahun 2022.

1. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP

Salah satu hal yang menjadi inti dari reformasi birokrasi adalah akuntabilitas instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang akuntabel semakin penting keberadaannya mengingat semakin tingginya ekspektasi dan tuntutan masyarakat atas pelayanan pemerintah. BPS Kota Surabaya sebagai lembaga negara juga harus meningkatkan akuntabilitasnya, sebagaimana yang tertera pada Tujuan keempat Renstra BPS 2020-2024. Akuntabilitas dimaksud tidak hanya dari sisi keuangan saja melainkan juga dari sisi kinerja. Dengan penguatan akuntabilitas ini, diharapkan akan memberi efek peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat. Pengukuran indikator hasil penilaian SAKIP ini berdasarkan pada penilaian SAKIP oleh inspektorat.

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	70,05	70,65	100,86

Hasil penilaian SAKIP



BADAN PUSAT STATISTIK

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

Nomor : B-0759/08100/PW.110/12/2023

Jakarta, 28 Desember 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2023
BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur

Kepada Yang Terhormat,

1. Kepala BPS Provinsi Jawa Timur
2. Kepala BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

di-

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2023 di Lingkungan Badan Pusat Statistik se-Indonesia oleh Inspektorat Utama, bersama ini disampaikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil evaluasi tersebut sebagai salah satu indikator kinerja untuk pengisian Form Rencana Aksi/ FRA yang merupakan instrumen monitoring pencapaian target kinerja dalam Penjanjian Kinerja 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Inspektur Wilayah I,



Hanif Yahya

Tembusan,

1. Sekretaris Utama
2. Plt Inspektur Utama
3. Bagian Umum Inspektorat Utama

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Kotak Pos 1003 Telp (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax (021) 3857046
Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Sertifikasi Elektronik (DSE), BSN

* Printel kode QR di samping untuk memperoleh file asli

Lampiran 1
 Surat Nomor : B-0759/08100/PW.110/12/2023
 Tanggal : 28 Desember 2023

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota
 di Provinsi Jawa Timur

Kode Wilayah	Satuan Kerja	Nilai 2023	Predikat
3500	BPS Provinsi Jawa Timur	77,45	BB
3501	BPS Kabupaten Pacitan	72,80	BB
3502	BPS Kabupaten Ponorogo	72,35	BB
3503	BPS Kabupaten Trenggalek	73,15	BB
3504	BPS Kabupaten Tulungagung	71,40	BB
3505	BPS Kabupaten Blitar	72,65	BB
3506	BPS Kabupaten Kediri	70,15	BB
3507	BPS Kabupaten Malang	73,60	BB
3508	BPS Kabupaten Lumajang	72,20	BB
3509	BPS Kabupaten Jember	69,50	B
3510	BPS Kabupaten Banyuwangi	75,35	BB
3511	BPS Kabupaten Bondowoso	72,65	BB
3512	BPS Kabupaten Situbondo	74,90	BB
3513	BPS Kabupaten Probolinggo	70,25	BB
3514	BPS Kabupaten Pasuruan	70,10	BB
3515	BPS Kabupaten Sidoarjo	72,70	BB
3516	BPS Kabupaten Mojokerto	76,75	BB
3517	BPS Kabupaten Jombang	72,35	BB
3518	BPS Kabupaten Nganjuk	61,85	B
3519	BPS Kabupaten Madiun	65,90	B
3520	BPS Kabupaten Magetan	68,75	B
3521	BPS Kabupaten Ngawi	66,45	B
3522	BPS Kabupaten Bojonegoro	73,40	BB
3523	BPS Kabupaten Tuban	68,70	B
3524	BPS Kabupaten Lamongan	72,60	BB
3525	BPS Kabupaten Gresik	63,65	B
3526	BPS Kabupaten Bangkalan	68,30	B
3527	BPS Kabupaten Sampang	67,85	B
3528	BPS Kabupaten Pamekasan	73,40	BB
3529	BPS Kabupaten Sumenep	68,45	B
3571	BPS Kota Kediri	73,85	BB
3572	BPS Kota Blitar	77,05	BB
3573	BPS Kota Malang	71,65	BB
3574	BPS Kota Probolinggo	68,60	B
3575	BPS Kota Pasuruan	66,35	B

3576	BPS Kota Mojokerto	69,30	B
3577	BPS Kota Madiun	75,10	BB
3578	BPS Kota Surabaya	70,65	BB
3579	BPS Kota Batu	73,85	BB

Gambar 13. LHE Atas Implementasi SAKIP BPS Kota Surabaya Tahun 2023

Dengan demikian capaian pada indikator ini sudah tercapai dari target yang ditetapkan. Namun demikian perlu diambil langkah-langkah untuk memperbaiki masing-masing komponen penilaian SAKIP.

Kendala :

1. Batas waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan dokumen SAKIP terbatas.
2. Evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja belum seluruhnya dilengkapi dengan kendala dan solusi pemecahan masalah.

Solusi :

1. Melengkapi permintaan dokumen SAKIP sesuai jadwal yang ditentukan. (Kendala 1)
2. INOVASI untuk penguatan dokumen SAKIP. (Kendala 1)
3. Dalam rapat evaluasi kinerja telah dilakukan penggalian permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah setiap indikator kinerja utama dan indikator penunjang yang lebih intensif. (Kendala 2)
4. Mengikuti *Workshop* Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 pada tanggal 6 Juni 2023. (Kendala 2)
5. Menyusun Tim Kerja BPS Kota Surabaya pada saat Rapat Dinas pada triwulan I 2023, membuat Matriks Peran Hasil, serta melakukan penilaian SKP dan CKP pada Aplikasi (Kendala 2)
6. Penguatan Pemanfaatan TI untuk pengelolaan data kinerja Pendukung SAKIP Tahun 2023. (Kendala 2)

Rekomendasi Tahun Selanjutnya :

1. Menindaklanjuti seluruh catatan kelemahan dari LHE Implementasi SAKIP tahun 2023 untuk perbaikan peningkatan implementasi SAKIP.
2. Melakukan perubahan sistem kerja Tim SAKIP dengan menyeimbangkan beban kerja setiap anggota tim.
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas korespondensi, perlu disusun sebuah aplikasi persuratan yang mudah diakses oleh seluruh pegawai dan sesuai dengan SOP Kearsipan.

2. Persentase Kepuasan Pengguna Data Terhadap Sarana Dan Prasarana Pelayanan BPS

Indikator kedua dari sasaran tujuan keempat yaitu Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS. Sarana dan prasarana yang baik merupakan salah satu komponen dalam pelayanan. Oleh sebab itu SKD memasukkan komponen tersebut dalam daftar pertanyaan pada kuesioner SKD. Pertanyaan tersebut selanjutnya dihitung untuk mendapatkan capaian indikator kepuasan pengguna layanan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Kota Surabaya.

Pengukuran indikator Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS adalah sebagai berikut:

Formula=
(x/y)*100%

**x = Jumlah pengguna data yang puas terhadap sarana
dan prasarana pelayanan BPS Kota**

y = Jumlah pengguna data BPS Kota

Survei kepuasan konsumen terangkum dalam hasil survei SKD yang diselenggarakan oleh BPS Kota Surabaya dengan responden adalah para pengguna data yang mendapatkan pelayanan data. Pada tahun 2023 survei kepuasan konsumen berhasil mendapatkan nilai 100 melampaui target hingga 102,04 persen.

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	98	100	102,04

Kendala :

1. Banyak sarana prasana yang umur penggunaannya sudah lama sehingga perlu peremajaan.
2. Banyak pengunjung PST yang tidak mengisi buku kunjungan.
3. Kepuasan pengguna data pada hasil SKD dikhawatirkan tidak memenuhi target

Solusi :

1. Peremajaan Pelayanan Statistik Terpadu dan Lobi sehingga diharapkan memberikan rasa nyaman kepada pengunjung PST. (Kendala 1)
2. Penyediaan PC dan printer khusus pengunjung langsung PST. (Kendala 1)
3. BPS Kota Surabaya mengajukan belanja barang modal dalam aplikasi IPlan. (Kendala 1)

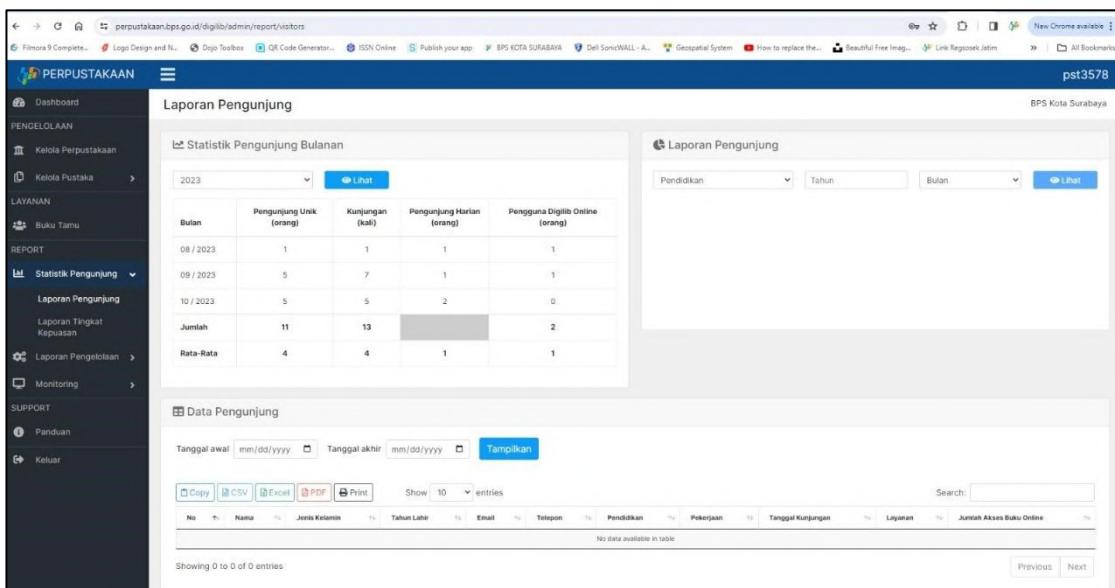
Nama Barang	Rincian Pengadaan	Satuan	2024			Nomor Prioritas	Isi TOR	Upload RAB & Dok Pendukung	Keterangan
			volume	Harga Satuan (Rp.)	Nilai				
EBB 951.052 Perangkap Pengolahan Data dan Komunikasi	Pengadaan / Pembelian Biasa	Buah	2	30.660.000	61.320.000	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Pilih File rab-3578-2024-3050105048-1.pdf	Tidak ada...ng dipilih
EBB 951.053 Peralatan Perkantoran	Pengadaan / Pembelian Biasa	Buah	1	123.750.000	123.750.000	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Pilih File rab-3578-2024-3050208008-1.pdf	Tidak ada...ng dipilih
Pengadaan Interior PST dan Loby	Pembelian	Paket	1	146.000.000	146.000.000	4	<input checked="" type="checkbox"/>	Pilih File rab-3578-2024-EBB 951.053-1.pdf	Tidak ada...ng dipilih
EBB 971.054 Gedung/Bangunan	Pertusakan	M2	720	8.375.056	6.030.040.000	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Pilih File rab-3578-2024-4010101001-9.pdf	Tidak ada...ng dipilih

[Submit Prioritas](#)

Gambar 14. Screenshot Pengusulan Belanja Barang Modal Melalui Web IPlan

4. BPS kota Surabaya telah mengaplikasikan sistem buku tamu *online* untuk pengunjung PST sejak bulan September 2023. (Kendala 2)





Gambar 15. *Screenshot Laporan Pengunjung Bulanan pada Aplikasi Pengunjung Tamu Online*

5. Untuk mencapai tingkat maksimum nilai hasil SKD, BPS Kota Surabaya menyediakan aplikasi Astabaya, yaitu aplikasi yang menyediakan data strategis di Kota Surabaya yang bisa diakses dari mana saja, tidak harus datang ke kantor BPS Kota Surabaya.(kendala 3)

Rekomendasi Tahun Selanjutnya :

1. Peningkatan setiap atribut baik sarana dan prasarana pekayanan perlu dilakukan, seperti: kemudahan informasi pelayanan, kemudahan prosedur, dan kemudahan akses data.
2. Menyebarluaskan informasi mengenai variasi layanan dan sarana pelayanan statistik BPS Kota Surabaya melalui media sosial.

3.1.5. Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2020 - 2023

Capaian kinerja yang dihasilkan dari proses kinerja yang dilakukan BPS Kota Surabaya perlu dilakukan pengamatan dari tahun ke tahun. Hal ini diperlukan sebagai monitoring dan evaluasi terhadap faktor-faktor apa saja yang harus ditingkatkan sehingga diperoleh capaian kinerja yang optimal.

Tabel 19. Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2020 - 2023

Perbandingan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)
Capaian Kinerja tujuan	99,88	83,97	97,92	104,37
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis	99,88	83,97	97,92	104,37

Dari tabel Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2020 – 2023 menunjukkan terjadi fluktuasi capaian kinerja dari tahun ke tahun. Secara umum capaian sudah menunjukkan tingkat yang mendekati optimal, namun demikian pada tahun 2021 terjadi penurunan kinerja yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dan sosialisasi dengan OPD-OPD pemerintah daerah sehingga rekomendasi statistik dan metadata sektoral masih belum terlaksana dengan baik pada tahun 2021. Sedangkan ditahun 2022 lebih terkait adanya kebijakan penundaan rilis publikasi oleh BPS sehingga berdampak tidak tercapainya kinerja di daerah. Upaya optimal yang dilakukan pada tahun 2023 untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 104,37 persen. Secara lebih rinci perbandingan capaian kinerja per sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20. Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2020,2021, 2022, dan 2023

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan		110.00	108.34	85.60	100.00
SS1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas		110.00	108.34	85.60	100.00
Percentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Per센	120,00	116,67	108,70	100,00
Percentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Per센	100*	100*	62,50	100,00
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN		50.00	76.67	96.15	110.00
SS2. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN		50.00	76.67	96.15	110.00
Percentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Per센	0*	33,33*	100	120,00
Percentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Per센	100*	120*	92,31	100,00
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN		92*	33,33*	108,33	107,69

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
SS3. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I		92*	33,33*	108,33	107,69
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Per센	92*	33,33*	108,33	107,69
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi		88.76	92.21	106.79	101.45
SS4. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan		88.76	92.21	106.79	101.45
Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Per센	77,52	96,92	107,77	100,86
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Per센	100,00	87,50	105,81	102,04

*) Nomenklatur dan formula penghitungan indikator kinerja berbeda antara tahun 2020-2021 dengan tahun 2022-2023

Pada tujuan pertama yang merupakan indikator kinerja sasaran strategis 2023 secara umum mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini terjadi karena tercapainya publikasi yang tepat waktu.

Pada tujuan kedua yang merupakan rata-rata indikator sasaran strategis pertama dan kedua, pada tahun 2023 mencapai 110,0 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Untuk capaian kinerja “persentase organisasi perangkat daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik” pada tahun 2023 mampu melampaui target mencapai 120 persen. Hal ini menunjukkan keberhasilan BPS Kota Surabaya untuk berupaya bergandengan tangan dengan OPD dalam mensosialisasikan rekomendasi statistik. Pada indikator “persentase organisasi perangkat daerah yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar pada tahun 2023 terpenuhi sebesar 100 persen

Pada tujuan ketiga yang merupakan rata-rata indikator sasaran strategis yang memiliki satu indikator yakni persentase organisasi perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan statistik pada tahun 2023 memiliki capaian kinerja sebesar 107,69 persen, sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 108,33. Meskipun demikian, tahun 2022 dan 2023 capaian kinerja diatas 100 persen.

Pada tujuan keempat yang merupakan rata-rata indikator sasaran strategis keempat tahun 2023 memiliki capaian kinerja sebesar 101,45 persen, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 106,79 persen. Apabila ditelaah per indikator, indikator “hasil penilaian implementasi sakip” tahun 2023 mampu meningkat 100,86 persen, dan tahun 2022 sebesar 107,77 persen. Sedangkan pada indikator “persentase kepuasan pengguna data terhadap

sarana dan prasarana BPS Kota Surabaya” tahun 2023 sebesar 102,04 persen, dan tahun 2022 sebesar 105,81 persen.

3.1.6. Realisasi Kinerja BPS Kota Surabaya dari Tahun 2023 sampai dengan tahun 2020

Realisasi Kinerja BPS Kota Surabaya dari Tahun 2023 sampai dengan tahun 2020 merupakan gambaran realisasi kinerja BPS Kota Surabaya dari tahun berjalan sampai dengan tahun pertama periode Renstra 2020-2024. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21. Realisasi Kinerja BPS Kota Surabaya dari Tahun 2023 sampai dengan tahun 2020

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator (1)	Satuan (2)	Realisasi			
		2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					
SS1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas					
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Per센	85.71	100	100	100
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Per센			62.5	100
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN					
SS2. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN					
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Per센			30.77	57.14
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Per센			46.15	53.85
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					
SS3. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I					
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Per센			100	100
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
SS4. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan					
Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	49.61	63	70.05	70.65
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	100	87,5	98.4	100

Realisasi kinerja pada tujuan pertama sasaran pertama pada indikator pertama “Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)” pada tahun 2020 sebesar 85.71 persen dan mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebesar 100 persen. Hal ini menunjukan bahwa data BPS semakin digunakan sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan sebagaimana didapat dari hasil SKD.

Sedangkan pada tujuan pertama sasaran pertama pada indikator kedua dan tujuan kedua serta tujuan ketiga tidak bisa dibandingkan antara tahun 2020-2021 dengan 2022-2023 karena adanya perbedaan nomenklatur dan formula penghitungan indikator kinerja antara tahun 2020-2021 dengan tahun 2022-2023.

Realisasi kinerja pada tujuan keempat sasaran keempat pada indikator pertama “Hasil Penilaian Implementasi SAKIP” pada tahun 2020 sebesar 49.61 persen dan mengalami peningkatan terus dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebesar 65 persen pada tahun 2021, 70.05 persen pada tahun 2022, dan 70.65 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukan bahwa SAKIP semakin diimplementasikan di BPS Kota Surabaya. Sedangkan pada indikator kedua “Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS” menunjukkan nilai yang konsisten 100 persen kecuali tahun 2022 sebesar 98.4 persen hal ini disebabkan karena adanya pemeliharaan beberapa sarana diantaranya AC dan Gedung.

3.1.7. Realisasi Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2023 Menurut IKU Terhadap Target Reviu Renstra Tahun 2023

Rencana strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Rencana strategis merupakan proses perencanaan jangka menengah (lima tahun) yang formal untuk mencapai tujuan organiasasi. Untuk mengetahui keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya pengukuran terhadap indikator-indikator yang mewakili pencapaian kedua hal tersebut.

Capaian kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2023 terhadap target Reviu Renstra 2023 merupakan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 terhadap target Reviu Renstra Tahun 2023. Capaian Kinerja 2023 terhadap Target Reviu Renstra 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 22. Capaian Kinerja 2023 terhadap Target Reviu Renstra 2023

Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Realisasi Kinerja 2023	Target Renstra 2023	Capaian Terhadap Target Renstra 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					103.76
SS1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas					103.76
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	100	93	107.53
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Persen	100	100,00	100.00
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN					125.05
SS2. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN					125.05
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	57,14	38,48	148.49
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	53,85	53	101.60
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					107.69
SS3. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I					107.69
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	100	92,86	107.69
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					105.14
SS4. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan					105.14
	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	70,65	68	103.90

Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Realisasi Kinerja 2023	Target Renstra 2023	Capaian Terhadap Target Renstra 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	100	94	106,38

Berdasarkan tabel diatas jika dibandingkan dengan target Renstra 2023, capaian kinerja tahun 2023 telah melampaui target Renstra 2023. Dari empat tujuan yang ditetapkan seluruhnya telah berhasil melampaui target Renstra 2023 dengan rata-rata capaian kinerja masing-masing tujuan secara berturut-turut sebesar 103,76 persen, 125,05 persen, 107,69 persen dan 105,14 persen.

Capaian kinerja tahun 2023 terhadap target Renstra 2023 pada masing-masing indikator kinerja sasaran dijelaskan sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan I | : Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan |
| Sasaran 1.1 | : Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas |
| Indikator Kinerja Sasaran 1.1.1 | : Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan Nasional |

Indikator Kinerja Sasaran Stategis pertama Sasaran Strategis Pertama Tujuan Pertama “**Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan**” pada Renstra Tahun 2023 ditargetkan sebesar 93 persen, dan telah terealisasi sebesar 100 persen pada tahun 2023. Sehingga capaian kinerja indikator tersebut terhadap target Renstra 2023 mencapai 107,53 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan capaian indikator ini telah melampaui target Renstra 2023

Kendala :

1. Respon target sampel survei SKD cenderung kurang responsif, dikarenakan kurangnya infomasi mengenai pelaksanaan SKD.
2. Belum semua stakeholder memahami dengan baik berbagai indikator yang dihasilkan oleh BPS dan pada sisi respon rate masih dibawah target.
3. Angka final perhitungan IHK yang dikirimkan BPS RI terlalu dekat dengan jadwal rillis. Selain itu, inflasi ini menjadi target sasaran oleh pemerintah kota lewat tim pengendali inflasi daerah.

4. Dalam pelaksanaan FKP Regsosek, karakteristik Masyarakat Surabaya yang heterogen, kritis, berpendidikan maju, namun memiliki waktu luang yang terbatas, sehingga informasi mengenai FKP tidak tersampaikan dengan baik yang menyebabkan kesalahpahaman dengan tokoh Masyarakat atau apparat lingkungan setempat.
5. Hasil PMT Pendataan Awal Regsosek masih ditemukan ketidaksesuaian kriteria keluarga miskin yaitu hasil PMT menunjukkan keluarga kriteria tidak miskin namun penilaian dari Ketua SLS mengkategorikan sebagai keluarga miskin.
6. Adanya penurunan pengunjung Website terutama di Bulan Agustus dan September.

Solusi :

1. Menjaga hubungan baik dengan pengguna data serta memberikan layanan responsif kepada pengguna data, baik secara *offline* pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) maupun *online* melalui media sosial. Sekaligus mendekati secara personal dalam survei SKD. (Kendala 1)
2. Pada saat pelaksanaan SKD dilakukan sosialisasi secara masif, baik dengan menghubungi pengguna data, *broadcast* dengan media sosial agar target responden tercapai (Kendala 1)
3. Kontak layanan permintaan data telah dioptimalkan. Dengan layanan *whatsapp* pengguna data dapat melakukan interaksi dua arah untuk mengkonsultasikan data tanpa harus berkunjung ke BPS Kota Surabaya. (Kendala 1)
4. Untuk menjawab tantangan keraguan *stakeholder* serta *respon rate* yang rendah. BPS kota Surabaya melakukan sosialisasi kegiatan mulai dari perekrutan mitra, pendataan, koordinasi, hingga diseminasi data dengan menggunakan media sosial.

Media sosial BPS Kota Surabaya yang selalu *update* untuk memberikan informasi kepada publik setiap harinya.(Kendala 2)

Facebook: https://www.facebook.com/bpssurabayakota/?locale=id_ID

Instagram : <https://www.instagram.com/bpskotasurabaya/>

Tiktok : <https://www.tiktok.com/@bpskotasurabaya>

Whatsapp: wa.me/6282140103578

https://api.whatsapp.com/send/?phone=6282140103578&text&type=phone_number&app_absent=0

Website : <https://surabayakota.bps.go.id/>

Email : bps3578@bps.go.id

Melalui media sosial, BPS Kota Surabaya menyampaikan aktivitas yang sedang dilakukan sehingga diharapkan mampu memberikan kepercayaan kepada pengguna data dan responden, bahwa kegiatan memang dilaksanakan secara resmi oleh BPS.

5. BPS Kota Surabaya membuat video yang menarik dalam rangka diseminasi data yang dipublish maupun kegiatan yang dilakukan oleh BPS, sehingga diharapkan masyarakat tertarik dengan proses maupun output yang dihasilkan oleh BPS Kota Surabaya. (Kendala 2)
6. Melakukan pembagian tugas ke anggota tim statistik harga meliputi pembuatan *Power Point*, BRS, Infografis dan *Upload Data BRS*. (Kendala 3)
7. Sosialisasi FKP dilaksanakan dengan mengadakan rekonsiliasi awal dengan tokoh masyarakat yang dijembatani oleh aparat kelurahan, kemudian membuat *leaflet* yang dapat disebarluaskan ke tokoh masyarakat dan aparat lingkungan setempat, sehingga anggota FKP mengerti tujuan dari diselenggarkannya kegiatan FKP tersebut. (Kendala 4)
8. Melakukan *Groundcheck* (pengecekan awal terhadap hasil PMT pendataan awal Regsosek) untuk memastikan data hasil pendataan awal regsosek sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. (Kendala 5)
9. Strategi yang dilakukan yaitu dengan menepati publikasi terbit tepat waktu, rilis data tepat waktu dan menjaga data *website* ter-update sekaligus memberikan keberagaman data pada *website* BPS. (Kendala 6)
10. Untuk mendongkrak pengunjung *website*, pengumuman yang bersifat penting juga ditautkan pada *website* BPS Kota Surabaya. (Kendala 6)
11. Seluruh pegawai BPS Kota Surabaya diwajibkan mempromosikan *website* dan media sosial BPS Kota Surabaya. (Kendala 6)

Tujuan 1 : Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

Sasaran 1.1 : Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Indikator kinerja sasaran 1.1.2 : Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)

Indikator Kinerja Sasaran Stategis Kedua Sasaran Strategis Pertama Tujuan Pertama “**Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi**” pada Renstra Tahun 2023 ditargetkan sebesar 100 persen, dan telah terealisasi sebesar 100 persen pada tahun 2023. Sehingga capaian kinerja indikator tersebut terhadap target Renstra 2023 mencapai 100 persen

pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan capaian indikator ini telah mencapai target Renstra 2023.

Kendala :

Proses pemeriksaan dan editing publikasi belum optimal, masih ditemukan beberapa kesalahan penulisan

Solusi :

1. Melibatkan pejabat fungsional statistisi pertama maupun muda untuk terlibat secara aktif dalam penyusunan publikasi sehingga publikasi bisa terbit tepat waktu.
2. Melibatkan seluruh pegawai untuk memeriksa hasil *draft* publikasi yang akan diterbitkan.

Tujuan 2 : Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN

Sasaran 2.1 : Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Indikator kinerja sasaran 2.1.1 : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)

Indikator Kinerja Sasaran Stategis Pertama Sasaran Strategis Kedua Tujuan Kedua “ Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik “ pada Renstra Tahun 2023 ditagetkan sebesar 38,48 persen, dan telah terealisasi sebesar 57,14 persen pada tahun 2023. Sehingga capaian kinerja indikator tersebut terhadap target Renstra 2023 mencapai 148,49 persen. Hal ini menunjukkan capaian indikator ini telah melampaui target Renstra 2023.

Kendala :

Sering terjadi pergantian atau perubahan PIC di instansi sektoral terutama yang menangani Satu Data Indonesia. Hal ini menghambat proses rekomendasi statistik selanjutnya karena PIC pengganti belum memahami proses bisnis penyelenggaraan statistik.

Solusi :

1. Membentuk Tim SDI yang menangani kegiatan pembinaan statistik sektoral, dimana satu orang menjadi *Liaison Officer* (LO) atau narahubung untuk 1 (satu) OPD tertentu. Koordinasi dilakukan dengan LO yang sama untuk beberapa kegiatan yang berkaitan dengan dinas, sehingga mempermudah koordinasi karena hanya menghubungi satu

orang LO yang tidak berubah-ubah.

2. BPS Kota Surabaya bersinergis dengan Diskominfo Kota Surabaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap OPD dalam mengisi pengajuan rekomendasi melalui romantik.web.bps.go.id.
3. BPS Kota Surabaya telah melaksanakan FGD Satu Data Indonesia terhadap 29 OPD pada tanggal 31 Oktober 2023. FGD ini bertujuan untuk mengenalkan kembali Satu Data Indonesia, peran BPS, peran pemerintah daerah dalam Satu data Indonesia, dan materi SDI lainnya. Pada acara ini, BPS Kota Surabaya melakukan pendampingan secara langsung kepada OPD untuk melaporkan kegiatan statistik sektoral yang dilakukan. BPS juga melakukan pendampingan terhadap OPD yang belum menyampaikan metadata statistik sektoral pada aplikasi Romantik dan Indah hub.

Tujuan 2	: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN
Sasaran 2.1	: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN
Indikator kinerja sasaran 2.1.2	: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)

Indikator Kinerja Sasaran Stategis Kedua Sasaran Strategis Kedua Tujuan Kedua “**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar**“ pada Renstra Tahun 2023 ditargetkan sebesar 53 persen, dan telah terealisasi sebesar 53,8 persen pada tahun 2023. Sehingga capaian kinerja indikator tersebut terhadap target Renstra 2022 mencapai 101,66 persen. Hal ini menunjukkan capaian indikator ini telah melampaui target Renstra 2023.

Kendala :

- a. OPD tidak langsung mengisi metadata sektoral karena kesibukan kegiatan pada instansi tersebut.
- b. Kurangnya pengetahuan tentang cara pengisian metadata statistik sektoral yang sesuai standar.

Solusi :

1. Membentuk Tim SDI yang menangani kegiatan pembinaan statistik sektoral, dimana satu orang menjadi *Liaison Officer* (LO) atau narahubung untuk 1 (satu) OPD tertentu. Koordinasi dilakukan dengan LO yang sama untuk beberapa kegiatan yang berkaitan dengan dinas, sehingga mempermudah koordinasi karena hanya menghubungi satu

- orang LO yang tidak berubah-ubah.
2. BPS Kota Surabaya telah melaksanakan FGD Satu Data Indonesia terhadap 29 OPD pada tanggal 31 Oktober 2023. FGD ini bertujuan untuk mengenalkan kembali Satu Data Indonesia, peran BPS, peran pemerintah daerah dalam Satu data Indonesia, dan materi SDI lainnya. Pada acara ini, BPS Kota Surabaya melakukan pendampingan secara langsung kepada OPD untuk melaporkan kegiatan statistik sektoral yang dilakukan. BPS juga melakukan pendampingan terhadap OPD yang belum menyampaikan metadata statistik sektoral pada aplikasi Romantik dan Indah hub.

Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Sasaran 3.1 : Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Indikator kinerja : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
sasaran 3.1.1 mendapatkan pembinaan statistik (%)

Indikator Kinerja Sasaran Stategis Pertama Sasaran Strategis Ketiga Tujuan Ketiga “**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik**“ pada Renstra Tahun 2023 ditagetkan sebesar 92,86 persen, dan telah terealisasi sebesar 100 persen pada tahun 2023. Sehingga capaian kinerja indikator tersebut terhadap target Renstra 2023 mencapai 107,69 persen. Hal ini menunjukkan capaian indikator ini telah melampaui target Renstra 2023.

Kendala :

1. Jadwal waktu pembinaan statistik sektoral antara BPS dan OPD yang belum selaras.
2. PIC Satu Data Indonesia pada OPD berubah karena adanya mutasi di lingkup pemerintah daerah sehingga diperlukan sosialisasi kembali mengenai pembinaan statistik sektoral.

Solusi :

1. Membentuk Tim SDI yang menangani kegiatan pembinaan statistik sektoral, dimana satu orang menjadi *Liaison Officer* (LO) atau narahubung untuk 1 (satu) OPD tertentu. Koordinasi dilakukan dengan LO yang sama untuk beberapa kegiatan yang berkaitan dengan dinas, sehingga mempermudah koordinasi karena hanya menghubungi satu orang LO yang tidak berubah-ubah.
2. Melakukan kunjungan atau jemput bola ke beberapa OPD dalam melakukan pembinaan.
3. BPS Kota Surabaya telah melaksanakan FGD Satu Data Indonesia terhadap 29 OPD

pada tanggal 31 Oktober 2023. FGD ini bertujuan untuk mengenalkan kembali Satu Data Indonesia, peran BPS, peran pemerintah daerah dalam Satu data Indonesia, dan materi SDI lainnya. Pada acara ini, BPS Kota Surabaya melakukan pendampingan secara langsung kepada OPD untuk melaporkan kegiatan statistik sektoral yang dilakukan. BPS juga melakukan pendampingan terhadap OPD yang belum menyampaikan metadata statistik sektoral pada aplikasi Romantik dan Indah hub.

Tujuan 4	: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi
Sasaran 4.1	: SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan
Indikator kinerja	: Hasil penilaian implementasi SAKIP
sasaran 4.1.1	

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pertama Sasaran Strategis Keempat Tujuan Keempat “**Hasil Penilaian Implementasi SAKIP**” pada Renstra Tahun 2023 ditargetkan sebesar 68 persen, dan telah terealisasi sebesar 70,65 persen pada tahun 2023. Sehingga capaian kinerja indikator tersebut terhadap target Renstra 2023 mencapai 103,90 persen. Hal ini menunjukkan capaian indikator ini telah melampaui target Renstra 2023.

Kendala :

1. Batas waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan dokumen SAKIP terbatas.
2. Evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja belum seluruhnya dilengkapi dengan kendala dan solusi pemecahan masalah.

Solusi :

1. Melengkapi permintaan dokumen SAKIP sesuai jadwal yang ditentukan. (Kendala 1)
2. INOVASI untuk penguatan dokumen SAKIP. (Kendala 1)
3. Dalam rapat evaluasi kinerja telah dilakukan penggalian permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah setiap indikator kinerja utama dan indikator penunjang yang lebih intensif. (Kendala 2)
4. Mengikuti *Workshop Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)* tahun 2023 pada tanggal 6 Juni 2023. (Kendala 2)
5. Menyusun Tim Kerja BPS Kota Surabaya pada saat Rapat Dinas pada triwulan I 2023, membuat Matriks Peran Hasil, serta melakukan penilaian SKP dan CKP pada Aplikasi (Kendala 2)
6. Penguatan Pemanfaatan TI untuk pengelolaan data kinerja Pendukung SAKIP Tahun

2023. (Kendala 2)

Tujuan 4	: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi
Sasaran 4.1	: SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan
Indikator kinerja sasaran 4.1.2	: Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kedua Sasaran Strategis Keempat Tujuan Keempat “**Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS**“ pada Renstra Tahun 2023 ditargetkan sebesar 94 persen, dan telah terealisasi sebesar 100 persen pada tahun 2023. Sehingga capaian kinerja indikator tersebut terhadap target Renstra 2023 mencapai 106,38 persen. Hal ini menunjukkan capaian indikator ini telah melampaui target Renstra 2023.

Kendala :

1. Banyak sarana prasana yang umur penggunaannya sudah lama sehingga perlu peremajaan.
2. Banyak pengunjung PST yang tidak mengisi buku kunjungan.
3. Kepuasan pengguna data pada hasil SKD dikhawatirkan tidak memenuhi target.

Solusi :

1. Peremajaan Pelayanan Statistik Terpadu dan Lobi sehingga diharapkan memberikan rasa nyaman kepada pengunjung PST. (Kendala 1)
2. Penyediaan PC dan printer khusus pengunjung langsung PST. (Kendala 1)
3. BPS Kota Surabaya mengajukan belanja barang modal dalam aplikasi IPlan (Kendala 1)
4. BPS kota Surabaya telah mengaplikasikan sistem buku tamu *online* untuk pengunjung PST sejak bulan September 2023. (Kendala 2)
5. Untuk mencapai tingkat maksimum nilai hasil SKD, BPS Kota Surabaya menyediakan aplikasi Astabaya, yaitu aplikasi yang menyediakan data strategis di Kota Surabaya yang bisa diakses dari mana saja, tidak harus datang ke kantor BPS Kota Surabaya. (Kendala 3)

3.1.8. Realisasi Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2023 Menurut IKU Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2020-2024

Capaian kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2023 terhadap target Renstra akhir tahun Renstra merupakan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 terhadap target Renstra 2024. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang telah dijalankan oleh BPS Kota Surabaya saat ini dan terhadap target yang akan diraih mendatang. Capaian Kinerja 2023 terhadap Target Renstra 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 23. Capaian Kinerja 2023 terhadap Target Akhir Renstra 2024

Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Realisasi Kinerja 2023	Target Renstra 2024	Capaian Terhadap Target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					102.63
SS1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas					102.63
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	100	95	105.26
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Persen	100	100	100.00
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN					108.33
SS2. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN					108.33
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	57,14	46,15	123.81
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	53,85	58	92.84
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					107.15
SS3. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I					107.15
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	100	93,33	107.15
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					103.10

Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Realisasi Kinerja 2023	Target Renstra 2024	Capaian Terhadap Target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS4. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan					103.10
	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	70,65	70	100.93
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	100	95	105.26

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan target Renstra 2024, capaian kinerja tahun 2023 telah melampaui target Renstra 2024. Dari empat tujuan yang ditetapkan seluruhnya telah berhasil melampaui target Renstra 2024 dengan rata-rata capaian kinerja masing-masing tujuan secara berturut-turut sebesar 102.63 persen, 108.33 persen, 107.15 persen dan 103.10 persen.

Namun demikian jika dilihat per indikator masih terdapat satu indikator yang belum tercapai yaitu Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%) yang capaiannya masih sebesar 92.84. Capaian kinerja tahun 2023 terhadap target Renstra 2024 pada masing-masing indikator kinerja sasaran dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan I : Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar Pembangunan

Sasaran 1.1 : Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Indikator kinerja sasaran 1.1.1 : Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan Nasional

Pada Renstra tahun 2024 indikator “Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan“ ditargetkan sebesar 95 persen. Pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar 100 persen. Sehingga capaian kinerja indikator tersebut terhadap target akhir Renstra 2020-2024

mencapai 105,26 persen. Hal ini menunjukkan capaian kinerja indikator tersebut telah melampaui target akhir Renstra 2020-2024.

Kendala :

1. Respon target sampel survei SKD cenderung kurang responsif, dikarenakan kurangnya infomasi mengenai pelaksanaan SKD.
2. Belum semua stakeholder memahami dengan baik berbagai indikator yang dihasilkan oleh BPS dan pada sisi respon rate masih dibawah target.
3. Angka final perhitungan IHK yang dikirimkan BPS RI terlalu dekat dengan jadwal rillis. Selain itu, inflasi ini menjadi target sasaran oleh pemerintah kota lewat tim pengendali inflasi daerah.
4. Dalam pelaksanaan FKP Regsosèk, karakteristik Masyarakat Surabaya yg heterogen, kritis, berpendidikan maju, namun memiliki waktu luang yang terbatas, sehingga informasi mengenai FKP tidak tersampaikan dengan baik yang menyebabkan kesalahpahaman dengan tokoh Masyarakat atau apparat lingkungan setempat.
5. Hasil PMT Pendataan Awal Regsosèk masih ditemukan ketidaksesuaian kreteria keluarga miskin yaitu hasil PMT menunjukkan keluarga kreteria tidak miskin namun penilaian dari Ketua SLS mengkategorikan sebagai keluarga miskin.
6. Adanya penurunan pengunjung Website terutama di Bulan Agustus dan September.

Solusi :

1. Menjaga hubungan baik dengan pengguna data serta memberikan layanan responsif kepada pengguna data, baik secara *offline* pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) maupun *online* melalui media sosial. Sekaligus mendekati secara personal dalam survei SKD. (kendala 1)
2. Pada saat pelaksanaan SKD dilakukan sosialisasi secara masif, baik dengan menghubungi pengguna data, *broadcast* dengan media sosial agar target responden tercapai (kendala 1)
3. Kontak layanan permintaan data telah dioptimalkan. Dengan layanan *whatsapp* pengguna data dapat melakukan interaksi dua arah untuk mengkonsultasikan data tanpa harus berkunjung ke BPS Kota Surabaya. (kendala 1)
4. Untuk menjawab tantangan keraguan *stakeholder* serta *respon rate* yang rendah. BPS kota Surabaya melakukan sosialisasi kegiatan mulai dari perekrutan mitra, pendataan, koordinasi, hingga diseminasi data dengan menggunakan media sosial.
Media sosial BPS Kota Surabaya yang selalu *update* untuk memberikan informasi kepada publik setiap harinya.(kendala 2)

Facebook: https://www.facebook.com/bpssurabayakota/?locale=id_ID

Instagram : <https://www.instagram.com/bpskotasurabaya/>

Tiktok : <https://www.tiktok.com/@bpskotasurabaya>

Whatsapp: wa.me/6282140103578

https://api.whatsapp.com/send/?phone=6282140103578&text&type=phone_number&app_absent=0

Website : <https://surabayakota.bps.go.id/>

Email : bps3578@bps.go.id

Melalui media sosial, BPS Kota Surabaya menyampaikan aktivitas yang sedang dilakukan sehingga diharapkan mampu memberikan kepercayaan kepada pengguna data dan responden, bahwa kegiatan memang dilaksanakan secara resmi oleh BPS.

5. BPS Kota Surabaya membuat video yang menarik dalam rangka diseminasi data yang dipublish maupun kegiatan yang dilakukan oleh BPS, sehingga diharapkan masyarakat tertarik dengan proses maupun output yang dihasilkan oleh BPS Kota Surabaya. (kendala 2)
6. Melakukan pembagian tugas ke anggota tim statistik harga meliputi pembuatan *Power Point*, BRS, Infografis dan *Upload Data BRS*. (kendala 3)
7. Sosialisasi FKP dilaksanakan dengan mengadakan rekonsiliasi awal dengan tokoh masyarakat yang dijembatani oleh aparat kelurahan, kemudian membuat *leaflet* yang dapat disebarluaskan ke tokoh masyarakat dan aparat lingkungan setempat, sehingga anggota FKP mengerti tujuan dari diselenggarakannya kegiatan FKP tersebut.(kendala 4)
8. Melakukan *Groundcheck* (pengecekan awal terhadap hasil PMT pendataan awal Regsosek) untuk memastikan data hasil pendataan awal regsosek sudah sesuai dengan keadaan di lapangan.(kendala 5)
9. Strategi yang dilakukan yaitu dengan menepati publikasi terbit tepat waktu, rilis data tepat waktu dan menjaga data *website* ter-update sekaligus memberikan keberagaman data pada *website* BPS. (kendala 6)
10. Untuk mendongkrak pengunjung *website*, pengumuman yang bersifat penting juga ditautkan pada *website* BPS Kota Surabaya.(kendala 6)
11. Seluruh pegawai BPS Kota Surabaya diwajibkan mempromosikan *website* dan media sosial BPS Kota Surabaya.(kendala 6)

Tujuan 1 : Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar Pembangunan

Sasaran 1.1	: Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas
Indikator kinerja sasaran 1.1.2	: Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring,dan evaluasi pembangunan nasional (%)

Indikator kinerja “Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi” pada Renstra tahun 2024 ditargetkan sebesar 100 persen. Diharapkan pada tahun 2024 seluruh publikasi yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi dapat menghasilkan publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran ini telah mencapai 100 persen. Sehingga Capaian kinerja terhadap target akhir renstra untuk indikator ini mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja terhadap target akhir renstra 2020-2024 untuk indikator ini sudah mencapai target.

Kendala :

Proses pemeriksaan dan editing publikasi belum optimal, masih ditemukan beberapa kesalahan penulisan

Solusi :

1. Melibatkan pejabat fungsional statistisi pertama maupun muda untuk terlibat secara aktif dalam penyusunan publikasi sehingga publikasi bisa terbit tepat waktu.
2. Melibatkan seluruh pegawai untuk memeriksa hasil *draft* publikasi yang akan diterbitkan.

Tujuan 2	: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN
Sasaran 2.1	: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN
Indikator kinerja sasaran 2.1.1	: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)

Indikator “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik“ pada Renstra tahun 2024 ditargetkan sebesar 46,15 persen. Pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar 57,14 persen. Sehingga capaian kinerja indikator ini terhadap target akhir renstra mencapai 123,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja terhadap target akhir renstra 2020-2024 untuk indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan.

Kendala :

Sering terjadi pergantian atau perubahan PIC di instansi sektoral terutama yang menangani Satu Data Indonesia. Hal ini menghambat proses rekomendasi statistik selanjutnya karena PIC pengganti belum memahami proses bisnis penyelenggaraan statistik.

Solusi :

1. Membentuk Tim SDI yang menangani kegiatan pembinaan statistik sektoral, dimana satu orang menjadi *Liaison Officer* (LO) atau narahubung untuk 1 (satu) OPD tertentu. Koordinasi dilakukan dengan LO yang sama untuk beberapa kegiatan yang berkaitan dengan dinas, sehingga mempermudah koordinasi karena hanya menghubungi satu orang LO yang tidak berubah-ubah.
2. BPS Kota Surabaya bersinergis dengan Diskominfo Kota Surabaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap OPD dalam mengisikan pengajuan rekomendasi melalui romantik.web.bps.go.id.
3. BPS Kota Surabaya telah melaksanakan FGD Satu Data Indonesia terhadap 29 OPD pada tanggal 31 Oktober 2023. FGD ini bertujuan untuk mengenalkan kembali Satu Data Indonesia, peran BPS, peran pemerintah daerah dalam Satu data Indonesia, dan materi SDI lainnya. Pada acara ini, BPS Kota Surabaya melakukan pendampingan secara langsung kepada OPD untuk melaporkan kegiatan statistik sektoral yang dilakukan. BPS juga melakukan pendampingan terhadap OPD yang belum menyampaikan metadata statistik sektoral pada aplikasi Romantik dan Indah hub.

Tujuan 2	: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN
Sasaran 2.1	: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN
Indikator kinerja sasaran 2.1.2	: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)

Indikator Kinerja Sasaran Stategis Kedua Sasaran Strategis Kedua Tujuan Kedua “**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar**“ pada Renstra tahun 2024 ditargetkan sebesar 58 persen. Tahun 2023 terealisasi sebesar 53,8 persen. Sehingga capaian kinerja terhadap target akhir renstra untuk indikator ini tercapai sebesar 92,84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja terhadap target akhir renstra 2020-2024 untuk indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan. BPS Kota Surabaya akan terus meningkatkan kinerja agar pada tahun 2024 capaian indikator kinerja sasaran ini dapat mencapai target yang diharapkan.

Kendala :

1. OPD tidak langsung mengisi metadata sektoral karena kesibukan kegiatan pada instansi tersebut.
2. Kurangnya pengetahuan tentang cara pengisian metadata statistik sektoral yang sesuai standar.

Solusi :

1. Membentuk Tim SDI yang menangani kegiatan pembinaan statistik sektoral, dimana satu orang menjadi *Liaison Officer* (LO) atau narahubung untuk 1 (satu) OPD tertentu. Koordinasi dilakukan dengan LO yang sama untuk beberapa kegiatan yang berkaitan dengan dinas, sehingga mempermudah koordinasi karena hanya menghubungi satu orang LO yang tidak berubah-ubah.
2. BPS Kota Surabaya telah melaksanakan FGD Satu Data Indonesia terhadap 29 OPD pada tanggal 31 Oktober 2023. FGD ini bertujuan untuk mengenalkan kembali Satu Data Indonesia, peran BPS, peran pemerintah daerah dalam Satu data Indonesia, dan materi SDI lainnya. Pada acara ini, BPS Kota Surabaya melakukan pendampingan secara langsung kepada OPD untuk melaporkan kegiatan statistik sektoral yang dilakukan. BPS juga melakukan pendampingan terhadap OPD yang belum menyampaikan metadata statistik sektoral pada aplikasi Romantik dan Indah hub.

Tujuan 3	: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
Sasaran 3.1	: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I
Indikator kinerja	: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)
sasaran 3.1.1	

Indikator Kinerja Sasaran Stategis “**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik**” pada Renstra tahun 2024 ditargetkan sebesar 93,33 persen. Pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar 100 persen. Sehingga capaian kinerja terhadap target akhir renstra untuk indikator ini tercapai sebesar 107,15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja terhadap target akhir renstra 2020-2024 untuk indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan.

Kendala :

1. Jadwal waktu pembinaan statistik sektoral antara BPS dan OPD yang belum selaras.
2. PIC Satu Data Indonesia pada OPD berubah karena adanya mutasi di lingkup pemerintah daerah sehingga diperlukan sosialisasi kembali mengenai pembinaan statistik sektoral.

Solusi :

1. Membentuk Tim SDI yang menangani kegiatan pembinaan statistik sektoral, dimana satu orang menjadi *Liaison Officer* (LO) atau narahubung untuk 1 (satu) OPD tertentu. Koordinasi dilakukan dengan LO yang sama untuk beberapa kegiatan yang berkaitan dengan dinas, sehingga mempermudah koordinasi karena hanya menghubungi satu orang LO yang tidak berubah-ubah.
2. Melakukan kunjungan atau jemput bola ke beberapa OPD dalam melakukan pembinaan.
3. BPS Kota Surabaya telah melaksanakan FGD Satu Data Indonesia terhadap 29 OPD pada tanggal 31 Oktober 2023. FGD ini bertujuan untuk mengenalkan kembali Satu Data Indonesia, peran BPS, peran pemerintah daerah dalam Satu data Indonesia, dan materi SDI lainnya. Pada acara ini, BPS Kota Surabaya melakukan pendampingan secara langsung kepada OPD untuk melaporkan kegiatan statistik sektoral yang dilakukan. BPS juga melakukan pendampingan terhadap OPD yang belum menyampaikan metadata statistik sektoral pada aplikasi rimantik dan indah hub.

Tujuan 4	: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi
Sasaran 4.1	: SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan
Indikator kinerja sasaran 4.1.1	: Hasil penilaian implementasi SAKIP

Indikator Kinerja “Hasil Penilaian Implementasi SAKIP “ pada Renstra tahun 2024 ditargetkan sebesar 70 persen. Pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar 70,05 persen. Sehingga capaian kinerja terhadap target akhir renstra untuk indikator ini tercapai sebesar 100,93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja terhadap target akhir renstra 2020-2024 untuk indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan.

Kendala :

1. Batas waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan dokumen SAKIP terbatas.
2. Evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja belum seluruhnya dilengkapi dengan kendala dan solusi pemecahan masalah.

Solusi :

1. Melengkapi permintaan dokumen SAKIP sesuai jadwal yang ditentukan (kendala 1)
2. INOVASI untuk penguatan dokumen SAKIP. (kendala 1)
3. Dalam rapat evaluasi kinerja telah dilakukan penggalian permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah setiap indikator kinerja utama dan indikator penunjang yang lebih intensif.(kendala 2)
4. Mengikuti *Workshop Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)* tahun 2023 pada tanggal 6 Juni 2023.(kendala 2)
5. Menyusun Tim Kerja BPS Kota Surabaya pada saat Rapat Dinas pada triwulan I 2023, membuat Matriks Peran Hasil, serta melakukan penilaian SKP dan CKP pada Aplikasi (kendala 2)
6. Penguatan Pemanfaatan TI untuk pengelolaan data kinerja Pendukung SAKIP Tahun 2023. (kendala 2)

Tujuan 4	: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi
Sasaran 4.1	: SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan
Indikator kinerja sasaran 4.1.2	: Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)

Indikator Kinerja Sasaran Stategis “**Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS**“ pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 95 persen. Pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar 100 persen. Sehingga capaian kinerja terhadap target akhir renstra untuk indikator ini tercapai sebesar 105,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja terhadap target akhir renstra 2020-2024 untuk indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan.

Kendala :

1. Banyak sarana prasana yang umur penggunaannya sudah lama sehingga perlu peremajaan.
2. Banyak pengunjung PST yang tidak mengisi buku kunjungan.
3. Kepuasan pengguna data pada hasil SKD dikhawatirkan tidak memenuhi target

Solusi :

1. Peremajaan Pelayanan Statistik Terpadu dan Lobi sehingga diharapkan memberikan rasa nyaman kepada pengunjung PST. (kendala1)
2. Penyediaan PC dan printer khusus pengunjung langsung PST. (kendala 1)
3. BPS Kota Surabaya mengajukan belanja barang modal dalam aplikasi IPlan (kendala 1)
4. BPS kota Surabaya telah mengaplikasikan sistem buku tamu *online* untuk pengunjung PST sejak bulan September 2023. (kendala 2)
5. Untuk mencapai tingkat maksimum nilai hasil SKD, BPS Kota Surabaya menyediakan aplikasi Astabaya, yaitu aplikasi yang menyediakan data strategis di Kota Surabaya yang bisa diakses dari mana saja, tidak harus datang ke kantor BPS Kota Surabaya.(kendala 3)

3.1.9. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja BPS Kota Surabaya ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan.

Tujuan 1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar Pembangunan, memerlukan dukungan kegiatan untuk menunjang pencapaian kinerja antara lain :

- a. Kegiatan 2896 Pengembangan Dan Analisis Statistik
- b. Kegiatan 2898 pelayanan dan pengembangan statistik neraca pengeluaran
- c. Kegiatan 2899 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi
- d. Kegiatan 2900 Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei
- e. Kegiatan 2902 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi

- f. Kegiatan 2903 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga
- g. Kegiatan 2904 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi
- h. Kegiatan 2905 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- i. Kegiatan 2906 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat
- j. Kegiatan 2907 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial
- k. Kegiatan 2908 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
- l. Kegiatan 2909 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
- m. Kegiatan 2910 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Dari kegiatan-kegiatan ini menghasilkan publikasi-publikasi yang dapat dimanfaatkan para pengguna data.

Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN didukung oleh kegiatan 2907 Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik pada rincian output 004 Laporan Diseminasi Dan Metadata Statistik, aktivitas yang dilakukan diantaranya adalah FGD data daerah dalam angka serta koordinasi dan kolaborasi dengan OPD terkait.

Tujuan 3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN didukung oleh kegiatan 2907 Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik pada rincian output 003 Laporan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN), aktifitas yang dilakukan adalah melakukan pembinaan statistik sektoral dengan OPD di pemerintahan kota.

Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi didukung Program 2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi dan kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan KRO RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Rincian output 004 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yaitu dengan pengadaan computer, scanner dan UPS yang dapat menambah sarana prasarana kantor untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

Selain itu BPS Kota Surabaya juga melakukan kegiatan-kegiatan lain untuk menunjang tercapainya kinerjanya diantaranya :

A. Layanan Pojok Statistik

BPS Kota Surabaya telah melaksanakan *launching* Pojok Statistik di Universitas PGRI Adi Buana pada tanggal 31 Agustus 2023. Adapun hingga akhir triwulan 4 tahun 2023 kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

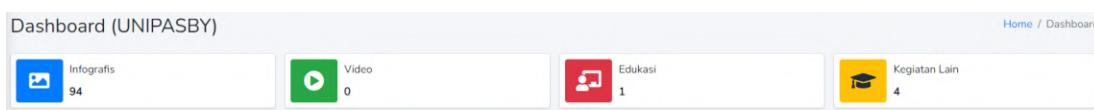
1. Promosi Statistik

Agar lebih dekat dengan kalangan akademisi, produk dan layanan BPS disebarluaskan melalui fisik Pojok Statistik yang berlokasi di kampus melalui peletakan publikasi, infografis, *standing banner* maupun *flyer*. Selain itu secara virtual juga terdapat layanan melalui *website* pojokstatistik.bps.go.id dimana pengguna dapat memilih kampus yang sudah terdapat layanan Pojok Statistik.



Gambar 16. Tampilan Fisik Pojok Statistik di Universitas PGRI Adi Buana

Pojok statistik Universitas PGRI Adi Buana sudah terdaftar di Pojok Statistik Virtual (PSV). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pojok Statistik juga di-*update* secara berkala melalui menu Edukasi dan Videografi. Para Agen Statistik yang sudah dilatih juga bertugas untuk meng-update koleksi infografis yang ada di Pojok Statistik Virtual dengan memanfaatkan data dari website BPS.



Gambar 17. Pojok Statistik Universitas PGRI Adi Buana sudah terdaftar di PSV

2. Konsultasi Statistik

Statistisi di BPS Kota Surabaya dijadwalkan untuk melayani konsultasi secara *offline* tiap hari Rabu bertempat di Pojok Statistik UNIPA, GKB II lantai 4. Konsultasi dibuka untuk seluruh civitas akademika di Universitas PGRI Adi Buana. Tema konsultasi adalah seputar pemanfaatan data BPS, cara mengakses data BPS dan tema lain yang relevan dengan fungsi BPS sebagai penyedia data statistik dasar.



Gambar 18. Aktivitas layanan konsultasi di Pojok Statistik UNIPA

Kegiatan konsultasi statistik ini telah dimanfaatkan bukan hanya oleh mahasiswa UNIPA namun juga oleh para dosen di lingkungan Universitas PGRI Adi Buana. Selain sebagai bentuk pelayanan pada publik, keberadaan layanan Pojok Statistik juga bermanfaat untuk meng-*upgrade* kemampuan para fungsional statistisi di BPS Kota Surabaya baik tentang pemahaman terhadap data yang dihasilkan oleh BPS maupun tentang ilmu analisis data yang diperlukan khususnya di kalangan akademisi. Hal ini penting untuk menambah pengetahuan tentang relevansi data BPS dengan kebutuhan pengguna data.

3. Edukasi Statistik

Selain kegiatan kuliah tamu yang dilaksanakan saat *launching* Pojok Statistik, hingga akhir triwulan 4 tahun 2023 tim Pojok Statistik BPS Kota Surabaya telah melaksanakan 1 (satu) jenis edukasi statistik yaitu:

a. Pemanfaatan Data Statistik untuk Pembuatan Infografis

Era digital telah menciptakan lonjakan jumlah data yang signifikan. Menurut data dari *International Data Corporation*, pada Tahun 2020 saja, jumlah data di seluruh dunia mencapai setidaknya 64 *zettabytes*, dimana 1 *zettabyte* setara dengan 1.000.000.000 *gigabytes*. Pada Tahun 2023, Statista memprediksi bahwa jumlah data dunia akan mencapai dua kali lipatnya dibandingkan tahun 2020, yaitu sekitar 120 *zettabytes*.

Dengan volume data yang sangat besar, visualisasi berfungsi sebagai jembatan antara data mentah dan pemahaman yang signifikan. Hal ini membuat informasi lebih mudah diakses dan dipahami oleh individu di berbagai bidang dan tingkat keahlian. Visualisasi data juga memungkinkan individu untuk dengan cepat dan efisien memahami pola, tren, dan hubungan dalam data, memberdayakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis, pendidikan, kesehatan, dan kebijakan publik.

Kenyataan ini mendorong semua pihak, termasuk akademisi, pemerintah, dan perusahaan, untuk memiliki individu dengan keterampilan visualisasi data agar dapat mengambil bagian aktif dalam era digital ini.



Gambar 19. Flyer Edukasi Statistik Pemanfaatan Data Statistik untuk Pembuatan Infografis

b. Bimbingan Teknis Agen Statistik

Bimbingan teknis untuk calon agen statistik bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa yang akan menjadi Agen Statistik. Elemen kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh para agen statistik diantaranya:

- 1) Menguasai pengetahuan dasar tentang Statistik
- 2) Mengetahui prosedur pelayanan statistik terpadu di BPS
- 3) Mengetahui dan menguasai prosedur permintaan data mikro melalui akun Silastik
- 4) Memiliki pengetahuan dasar tentang kegiatan pendataan yang dilakukan BPS, Berita Resmi Statistik dan Publikasi yang dihasilkan BPS
- 5) Memiliki pengetahuan dasar tentang metodologi survei/penelitian

Bimbingan teknis untuk calon agen statistik di UNIPA dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Januari 2023 dengan pemateri para statistisi dari BPS Kota Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh 17 (tujuh belas) orang calon Agen Statistik yang telah mengikuti rekrutmen.



Gambar 20. Pelaksanaan Briefing Agen Statistik

c. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Kegiatan Pojok Statistik di UNIPA juga diintegrasikan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dalam hal ini, BPS Kota Surabaya juga aktif berkolaborasi dengan UNIPA terkait Dosen Praktisi. Kegiatan yang akan dikolaborasikan adalah adanya 2 (dua) orang ASN BPS Kota Surabaya yang menjadi Dosen Praktisi untuk mata kuliah Desain Eksperimen. Selama triwulan IV tahun 2023 telah dilaksanakan 10 pertemuan dalam rangka koordinasi menyusun kegiatan MBKM tersebut.



Gambar 21. Pelaksanaan Dosen Praktisi

B. Pembinaan Desa Cinta Statistik (Cantik)

Penentuan Desa Cantik 2023

Pelaksanaan Program Desa Cantik 2023 dilaksanakan di 34 provinsi, dengan memilih 230 desa/kelurahan yang mewakili 34 provinsi di Indonesia. Pemilihan Desa Cantik 2023 dapat memilih desa/kelurahan yang sudah dibina pada tahun 2021 dan 2022 atau desa/kelurahan baru yang diusulkan oleh BPS Kabupaten/Kota. Pertimbangan dapat memilih desa/kelurahan yang telah dibina tahun sebelumnya karena mempertimbangkan terbatasnya waktu untuk kegiatan Desa Cantik di tahun ini dengan banyaknya agenda kegiatan pendataan lapangan di daerah yaitu FKP Regsosek dan Sensus Pertanian 2023.

BPS Kabupaten/Kota melalui BPS Provinsi dapat mengusulkan desa/kelurahan baru dengan memperhatikan beberapa kriteria seperti :

1. Desa yang dipilih untuk Desa Cantik diutamakan desa/kelurahan yang memiliki sinyal telepon kuat/sangat kuat dan sinyal internet minimal 4G.
2. Desa/Kelurahan memiliki fasilitas internet yang berfungsi di kantor desa/kelurahan.
3. Desa/Kelurahan memiliki komputer/PC/Laptop yang berfungsi di kantor desa/kelurahan.
4. Desa/Kelurahan memiliki kepala desa/lurah atau aparat desa/kelurahan dengan pendidikan minimal SMA/sederajat
5. Desa/Kelurahan memiliki aparat desa/kelurahan yang mampu mengoperasikan komputer (excel, google chrome, dll).

Selanjutnya nama desa/kelurahan yang diusulkan untuk menjadi Desa Cantik 2023 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 469 tahun 2023.

Pada tahun 2023 BPS Kota Surabaya menentukan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dengan alamat di Jl. Kalidami no 41 Surabaya (60285), dengan no telepon (031) 5939721 untuk dilakukan pembinaan sebagai Kelurahan Cinta Statistik (Cantik)

Sosialisasi/Pencanangan Desa/Kelurahan Cantik

Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan program pembinaan desa cantik tahun 2023, tim desa cantik BPS Kota Surabaya harus melakukan kegiatan sosialisasi yang terstruktur dan massive. Terutama sosialisasi awal dilakukan di tingkat atas Pemkot Surabaya. Pada tanggal 4 September 2023 kepala BPS kota Surabaya bertemu dengan Sekda kota Surabaya dan jajarannya, dalam pertemuan itu Kepala BPS kota Surabaya menyampaikan tentang Program Desa Cantik tahun 2023 serta meminta bantuan dan dukungan penuh dari Pemkot Surabaya supaya pelaksanaan desa cantik 2023 di tingkat kelurahan berjalan baik dan lancar. Dalam diskusi tersebut ditindaklanjuti dengan kunjungan dan pertemuan-pertemuan berikutnya kepada

BPS Kota Surabaya ke Pemkot Surabaya dengan mensosialisasikan program desa cantik tahun 2023.



Gambar 22. Pertemuan Kepala BPS Kota Surabaya dengan Sekda Kota Surabaya Terkait Kegiatan Desa Cantik Tahun 2023

Kegiatan sosialisasi juga dilakukan secara masif di tingkat kelurahan Mojo. Tahapan sosialisasi berikutnya yaitu dilakukan pencanangan kelurahan Mojo sebagai kelurahan cantik yaitu pada tanggal 15 September, bertempat di aula balai RW IX Kelurahan Mojo. Pada kegiatan pencanangan tersebut dihadiri oleh Jajaran pemerintah Kota Surabaya yang diwakili oleh Dinas Kominfo, Bappeko, Camat, Lurah sekecamatan Gubeng, seluruh aparat kelurahan Mojo, ketua SLS dan teman teman mitra statistik kelurahan Mojo serta Kepala BPS Kota Surabaya dan Tim Desa cantik.

Pada kegiatan Pencanangan tersebut disampaikan paparan tujuan dan manfaat program desa cantik 2023 di kelurahan Mojo, kecamatan Gubeng. Sesuai tema program desa cantik tahun ini yaitu pemanfaatan data regsosek untuk mengentaskan kemiskinan, maka dalam kegiatan pencanangan tersebut disampaikan juga materi mengenai Regsosiek. Serta dikukuhkan Agen Statistik kelurahan Mojo yang nantinya akan menerima bimbingan pembinaan dari tim Pembina desa cantik BPS Kota Surabaya.



Gambar 23. Penganangan Kelurahan Mojo Sebagai Kelurahan Cantik Tahun 2023

Seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi dan penganangan kelurahan cantik Mojo tahun 2023 ini diberitakan di media sosial BPS Kota Surabaya yaitu melalui Instagram. Supaya masyarakat luas mengetahu program desa cantik ini, serta ikut turun berperan dalam mensukseskan kegiatan desa cantik tahun 2023.

Kegiatan Pembinaan

Tahapan berikutnya yaitu melaksanakan kegiataan pembinaan dan pendampingan terhadap agen statistik sesuai dengan rancangan kegiatan yang disusun mengacu pada hasil identifikasi permasalahan. Pembinaan pertama kali dilakukan pada tanggal 18 September 2023 di kantor kelurahan Mojo secara tatap muka. Pada pembinaan ini dihadiri oleh agen statistik dan seluruh perangkat kelurahan Mojo. Untuk memudahkan komunikasi dalam pembinaan Kelurahan Mojo dibentuk *WA Group*.

Tema Pembinaan pada tanggal 18 September 2023 yaitu menjelaskan tentang Statistik dasar dan metode penyajian data. *Output* dan manfaat yang diharapkan pada pembinaan pertama ini yaitu Agen statistik mampu menyusun tabel, diagram dan analisis sederhana pada tampilan data monografi kelurahan Mojo.

Sesuai dengan tema desa cantik tahun ini yaitu pemanfaatan Data Regsosek untuk pengentasan kemiskinan. Pada tanggal 21 September 2023 tim Pembina memberikan

pembinaan dan pendampingan dengan tema penjelasan Regsosek serta data dan indikator apa saja yang dicakup dalam Regsosek. Serta memberikan penjelasan pemanfaatan hasil pendataan Regsosek untuk berbagai program pengentasan kemiskinan.

Hasil Pembinaan Statistik yang Diterapkan oleh Desa

Sejumlah rangkaian kegiatan pembinaan dan pendampingan serta rekomendasi yang diberikan ke Kelurahan Mojo diharapkan membawa perbaikan dan perubahan signifikan terhadap identifikasi permasalahan yang ada di kelurahan Mojo. Secara umum Output dari pembinaan dan pendampingan di Kelurahan Mojo yaitu :

3. Meningkatkan literasi, kesadaran dan peran aktif perangkat desa/kelurahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik
4. Standardisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik
5. Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan di desa/kelurahan tepat sasaran
6. Membentuk agen-agen statistik pada level desa/kelurahan

Kendala dan Solusi

Selama melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan, tim Desa cantik mengalami beberapa kendala dan hambatan. Selanjutnya kendala dan hambatan yang terjadi selama kegiatan pembinaan dijadikan bahan evaluasi dan monitoring, sebagai bahan mitigasi resiko untuk Menyusun Solusi Perbaikan supaya untuk pembinaan berikutnya berjalan lancar sesuai dengan rencana yang sudah di rancang.

Kendala-kendala dan solusi yang terjadi selama kegiatan pembinaan dan pendampingan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 24. Kendala dan Solusi Kegiatan Desa Cantik Kota Surabaya Tahun 2023

No	Kendala	Solusi
1	Bulan September-Okttober Perangkat kelurahan mendapatkan tugas pekerjaan yang banyak dari pemkot Surabaya, sehingga pada awal sosialisasi program desa cantik pihak kelurahan belum sepenuhnya memberikan dukungan.	Melakukan sosialisasi ke Pemkot Surabaya tentang Program Desa Cantik, supaya mendapatkan dukungan penuh dari Pemkot Surabaya, yaitu Pemkot Surabaya memberikan instruksi kepada Kelurahan Mojo untuk berkoordinasi dan mendukung penuh setiap kegiatan pembinaan. Serta Dukungan dari instansi terkait seperti Bappeda dan Diskominfo

No	Kendala	Solusi
2	Ketika kegiatan pembinaan berlangsung dan pada saat yang bersamaan Kelurahan Mojo ada kegiatan lainnya, menyebabkan pihak kelurahan kekurangan tenaga dalam melakukan pelayanan	Melakukan Diskusi dan Koordinasi untuk menentukan Jadwal pembinaan yang sesuai dan tidak mengganggu aktifitas perangkat kelurahan dalam bekerja
3	Jadwal pembinaan bentrok dengan jadwal kegiatan perangkat kelurahan	Melakukan Diskusi dan Koordinasi untuk menentukan Jadwal pembinaan yang sesuai dan tidak mengganggu aktifitas perangkat kelurahan dalam bekerja

3.2. Prestasi dan Inovasi BPS Kota Surabaya Tahun 2023

3.2.1. Prestasi BPS Kota Surabaya Tahun 2023

Selama tahun 2023 BPS Kota Surabaya mendapat beberapa penghargaan sebagai berikut :

- Penghargaan Terbaik Pertama Pencacahan Lapangan Sensus Pertanian 2023 UTP Kategori Kecil RTUP kurang dari sama dengan 50.000



Gambar 24. Piagam Penghargaan Terbaik Pertama Pencacahan Lapangan Sensus Pertanian 2023 UTP Kategori Kecil RTUP kurang dari sama dengan 50.000

2. Penghargaan Terbaik Kedua dalam pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan Desa Cantik Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur



Gambar 25. Penghargaan Terbaik Kedua dalam pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan Desa Cantik Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

3. Penghargaan atas kepatuhan penyampaian LHKPN dan SPT tahun 2022



Gambar 26. Penghargaan atas kepatuhan penyampaian LHKPN dan SPT tahun 2022

3.2.2. Inovasi BPS Kota Surabaya Tahun 2023

1. Doa dan *Briefing* Pagi dan Sore

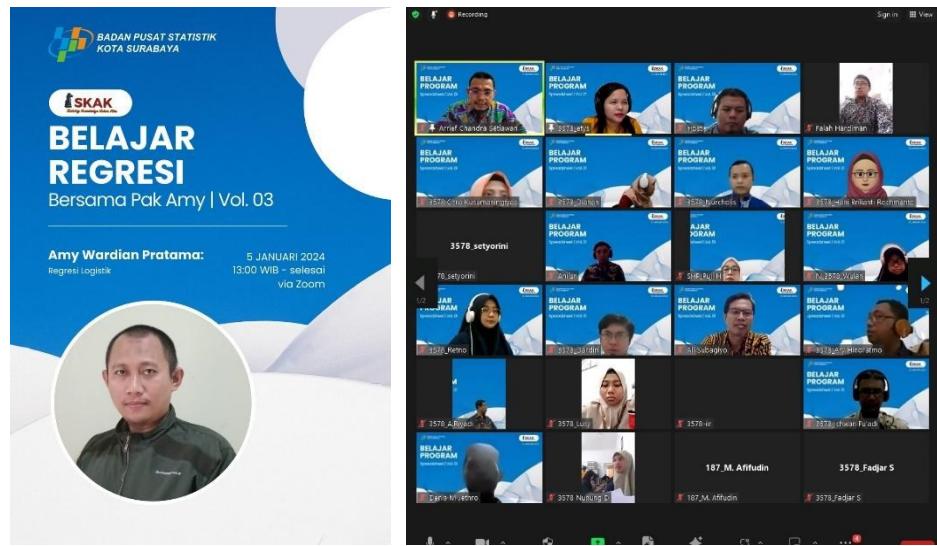
Pada Tahun 2023 BPS Kota Surabaya selain melaksanakan kegiatan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja organisasi, juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbasis kebijakan lokal di antaranya penyelenggaraan peningkatan kapasitas pegawai melalui penyelenggaraan kegiatan doa dan *briefing* setiap pagi dan sore. Di dalam kegiatan ini kami saling memberikan informasi kegiatan, dan koordinasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari tersebut, maupun memberikan arahan kebijakan yang bersifat *urgent* untuk setiap kendala yang dihadapi. Kecepatan dalam mengambil informasi dan koordinasi yang cepat dan tanggap menjadi salah satu bentuk mengaplikasikan pilar pola pikir dalam reformasi birokrasi.



Gambar 27. Kegiatan Doa dan Briefing Pagi dan Sore di BPS Kota Surabaya

2. SKAK (*Sharing Knowledge* Antar Kita)

Selain itu di tahun 2023, BPS Kota Surabaya terus menyelenggarakan peningkatan kapasitas pegawai dengan menyelenggarakan SKAK (*Sharing Knowledge* Antar Kita). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai tentang data-data dan metode statistik terkini, serta kemampuan dalam menyajikan data-data BPS untuk masyarakat maupun *stakeholder*.



Gambar 28. Screenshot Pelaksanaan *Sharing Knowledge* Antar Kita (SKAK)

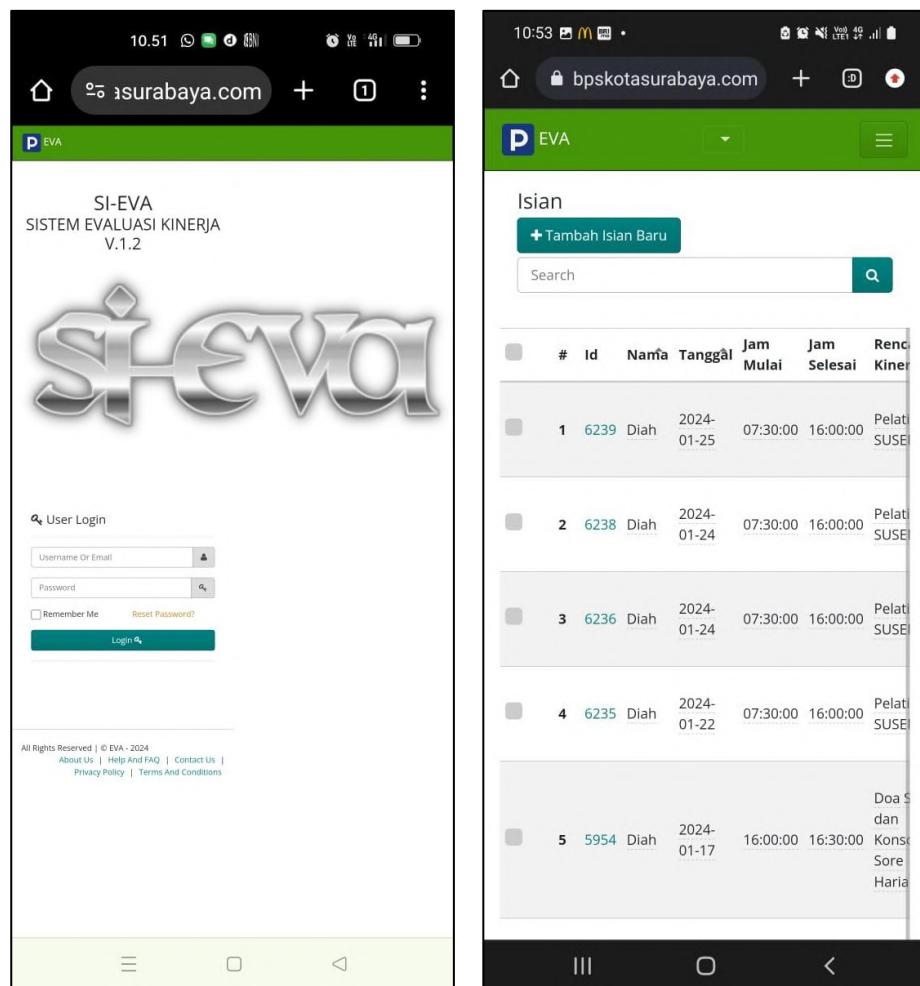
Selain itu, juga menyelenggarakan webinar bersama dengan mahasiswa yang menjadi wawasan yang lebih mengenai statistik. Seminar ini merupakan bagian dari pembinaan dan edukasi pada program pojok statistik. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan kegiatan statistik kepada masyarakat luas terutama mahasiswa.



Gambar 29. Seminar Inflasi dan Perekonomian pada FMIPA Unesa pada tanggal 6 Oktober 2023

3. Aplikasi Sieva (Sistem Evaluasi Kinerja)

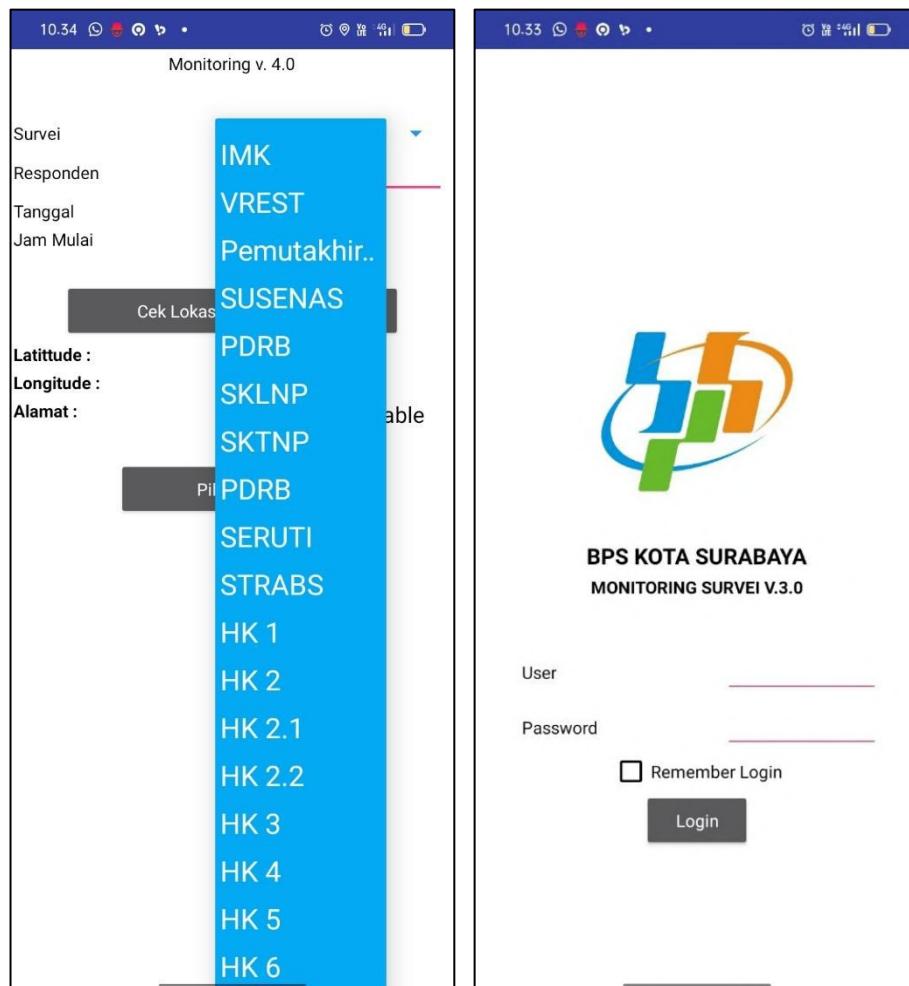
Aplikasi Sieva (sistem evaluasi kinerja) dibuat agar kinerja pegawai bisa dipantau per hari atau secara real time, yang selama ini belum bisa diakomodir oleh aplikasi KipApp. Keunggulan Aplikasi sieva memudahkan pegawai dalam pengisian KipApp. Aplikasi ini juga memudahkan Kepala dan ketua tim mengontrol kegiatan pegawai (anggota tim).



Gambar 30. Tampilan Aplikasi SIEVA

4. Aplikasi SIMOVIE (Monitoring Survei)

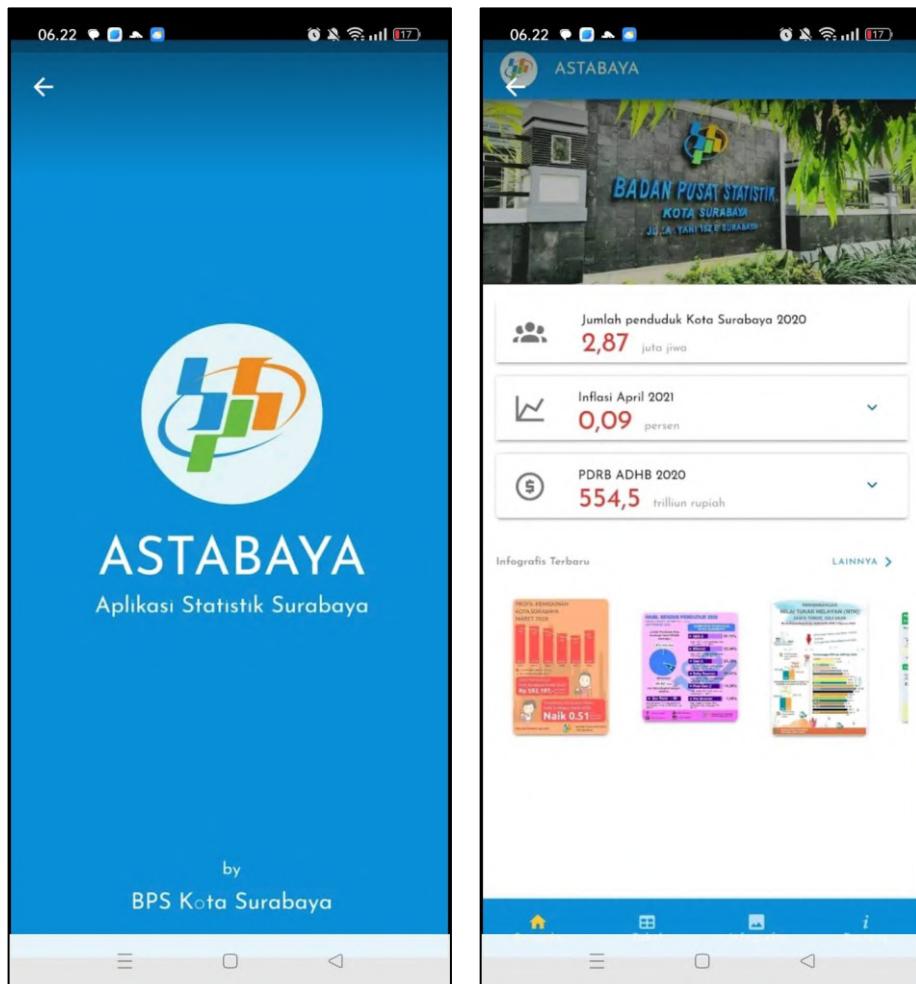
Aplikasi SIMOVIE bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan akuntabilitas petugas di lapangan. Aplikasi SIMOVIE dapat mentracking keberadaan petugas saat mendata, dan menghitung berapa lama petugas melakukan pendataan. Selain itu aplikasi ini juga dapat mendeteksi dini beberapa indikator survei.



Gambar 31. Tampilan Aplikasi SIMOVIE

5. Aplikasi ASTABAYA (Monitoring Survei)

Aplikasi ini menyediakan ringkasan data Kota Surabaya terkini. Tujuan aplikasi ini untuk memudahkan pengguna data mendapatkan data dalam genggaman. Aplikasi Astabaya dapat diunduh pada *Google Play*.



Gambar 32. Tampilan Aplikasi ASTABAYA

3.3. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023

3.3.1. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program

Pagu awal anggaran BPS Kota Surabaya untuk menjalankan fungsi pemerintahan selama tahun 2023 adalah sebesar Rp. 26.464.535.000,-, yang terbagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen (Dukman), dan (2) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Terdapat empat belas kali revisi anggaran yang merubah pagu anggaran, sehingga pada revisi terakhir pagu menjadi sebesar Rp. 20.075.123.000,-. Realisasi anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 18.730.089.773,- atau sebesar 93,30 persen. Realisasi anggaran menurut program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program

Sasaran	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Percentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
S1.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	12.996.727.000	11.760.576.101	90,49
S2.1 Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	30.016.000	27.282.000	90,89
S3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	3.000.000	3.000.000	100
S4.1 SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Program Dukungan Manajemen (Dukman)	6.815.780.000	6.711.261.672	98,47
	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	229.600.000	227.970.000	99,29
Total	Program Dukungan Manajemen (Dukman)	6,815,780,000	6,711,261,672	98,47
	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	13,259,343,000	12,018,828,101	90,64
		20.075.123.000	18.730.089.773	93,30

Berdasarkan tabel di atas realisasi anggaran program Dukman adalah sebesar 98,47 persen dari pagu anggaran program Dukman dan realisasi anggaran program PPIS adalah sebesar 90,64 persen dari pagu anggaran program PPIS. Penyerapan anggaran BPS Kota Surabaya secara keseluruhan adalah sebesar 93,30 persen dari total pagu.

3.3.2. Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Program dan Sasaran

Untuk menjalankan tujuan dan sasaran kinerja disediakan anggaran yang diambilkan Program Dukungan Manajemen (Dukman) dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Tabel 26. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Program dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Kegiatan/Output	Capaian Kinerja	Pagu 2023	Realisasi 2023	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	T.1 Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan		100	12.996.727.000	11.760.576.101	90,49
	S1.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas		100	12.996.727.000	11.760.576.101	90,49
	2896.BMA Data Dan Informasi Publik			2.400.000	2.400.000	
	2898.BMA Data Dan Informasi Publik			38.722.000	35.772.000	
	2898.QMA Data Dan Informasi Publik			18.041.000	11.495.400	
	2899.BMA Data Dan Informasi Publik			51.227.000	49.827.500	
	2900.BMA Data Dan Informasi Publik			158.731.000	158.617.000	
	2902.BMA Data Dan Informasi Publik			56.325.000	42.130.585	
	2903.BMA Data Dan Informasi Publik			737.041.000	633.022.500	
	2904.BMA Data Dan Informasi Publik			560.877.000	552.539.700	
	2905.BMA Data Dan Informasi Publik			262.024.000	233.851.500	
	2906.BMA Data Dan Informasi Publik			645.764.000	631.204.488	
	2907.BMA Data Dan Informasi Publik			21.422.000	19.322.000	
	2907.QMA Data Dan Informasi Publik			7.077.883.000	6.134.991.995	
	2908.BMA Data Dan Informasi Publik			256.157.000	200.970.500	
	2908.QMA Data Dan Informasi Publik			5.468.000	4.718.000	
	2909.BMA Data Dan Informasi Publik			2.312.000	2.030.000	
	2910.BMA Data Dan Informasi Publik			5.271.000	0	
	2910.QMA Data Dan Informasi Publik			3.097.062.000	3.047.682.933	
	T.2 Meningkatnya kolaborasi. integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN		110	30.016.000	27.282.000	90,89
	S2.1 Meningkatnya kolaborasi. integrasi. dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN		110	30.016.000	27.282.000	90,89
	2897.BMA Data Dan Informasi Publik			30.016.000	27.282.000	

Tujuan	Sasaran	Kegiatan/Output	Capaian Kinerja	Pagu 2023	Realisasi 2023	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	T.3 Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN		107,69	3.000.000	3.000.000	100
	S3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I		107,69	3.000.000	3.000.000	100
		2897.Bdb Fasilitas Dan Pembinaan Lembaga		3.000.000	3.000.000	
	T.4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi		101,45	7.045.380.000	6.939.231.672	98,49
	S4.1 SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan		101,45	7.045.380.000	6.939.231.672	98,49
		2910.RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi		229.600.000	227.970.000	
		Seluruh Program Dukungan Manajemen		6.815.780.000	6.711.261.672	

Menurut sasaran kinerja anggaran terbesar teralokasikan pada sasaran pertama Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas dengan pagu Rp. 12.996.727.000 dan terealisasi sebesar Rp. 11.760.576.101 atau 90,49 %. Hal ini menunjukan penggunaan anggaran yang efektif dengan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100 persen..

Untuk sasaran kedua Meningkatnya kolaborasi. integrasi. dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN dengan pagu Rp. 30.016.000 dan terealisasi sebesar Rp. 27.282.000 atau 90,89 %. Penggunaan anggaran ini sangat efektif dengan menghasilkan capaian kinerja sebesar 110 persen.

Untuk sasaran ketiga Penguatan statistik sektoral K/L/D/I dengan pagu sebesar Rp. 3.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.000.000 atau sebesar 100%. Hal ini menunjukan penggunaan anggaran yang efektif dengan menghasilkan capaian kinerja sebesar 107,69 persen.

Pada sasaran keempat SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan dengan pagu sebesar Rp. 7.045.380.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.939.231.672 atau sebesar 98,49%. Hal ini menunjukan penggunaan anggaran yang efektif dengan menghasilkan capaian kinerja sebesar 101,45 persen.

3.3.3. Upaya Efisiensi Anggaran dan Nilai Efisiensi Anggaran

Upaya efisiensi yang dilakukan BPS Kota Surabaya selama tahun 2023 diantaranya:

1. Pada sisi penganggaran juga dilakukan efisiensi dengan melakukan penghematan anggaran untuk memenuhi *Automatic Adjustment*. Pada tahun 2023 BPS Kota Surabaya melakukan 14 kali revisi DIPA dengan perubahan pagu untuk menyesuaikan dengan

kegiatan. Terdapat pengurangan pagu anggaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran kegiatan sehingga akan terpenuhi prinsip efektif-efisien dari Rp. 26.464.535.000.- menjadi Rp. 20.075.123.000.- dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 27. Riwayat Revisi DIPA BPS Kota Surabaya Selama Tahun 2023

Revisi DIPA ke	Tanggal	Dasar Hukum / Kewenangan	Pagu	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	28 Desember 2022	Revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), berupa Automatic Adjustment belanja kementerian/lembaga TA 2023, sebagaimana dijelaskan surat Kepala BPS No B-507/01000/PR.440/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022	26.464.715.000	Anggaran secara jumlah keseluruhan tidak mengalami perubahan. hanya mengalami pergeseran antar tiap outputnya.
II	3 Februari 2023	Revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dijelaskan surat KPA BPS Kota Surabaya No B-056/35781/PR.620/02/2023 tanggal 3 Februari 2023	26.464.715.000	Anggaran secara keseluruhan tidak mengalami perubahan. hanya mengalami pergeseran antar tiap outputnya.
III	27 Februari 2023	Revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), berupa Revisi Anggaran dalam rangka penyesuaian kegiatan tahun 2023, sebagaimana dijelaskan surat Sekretaris Utama BPS No B-235/02100/PR.400/02/2023 tanggal 10 Februari 2023	23.483.451.000	Pada revisi ketiga ini anggaran mengalami penurunan sebesar Rp 2.981.084.000.
IV	24 Maret 2023	Revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dijelaskan surat KPA BPS Kota Surabaya No B-056/35781/PR.620/02/2023 tanggal 24 Maret 2023	23.483.451.000	Pada revisi keempat ini anggaran secara jumlah keseluruhan tidak mengalami perubahan dari revisi ketiga. hanya mengalami pergeseran antar tiap outputnya

Revisi DIPA ke	Tanggal	Dasar Hukum / Kewenangan	Pagu	Penjelasan
V	6 April 2023	Revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dijelaskan surat Sestama BPS No B-444/02100/PR.400/03/2023 tanggal 21 Maret 2023	23.517.111.000	Anggaran naik hanya pada program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (GG) pada kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (2910) yaitu sebesar Rp 33.660.000.
VI	17 April 2023	Revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dijelaskan surat KPA BPS Kota Surabaya No B-206/35781/PR.620/04/2023 tanggal 14 April 2023	23.517.111.000	Pada revisi keenam ini anggaran secara jumlah keseluruhan tidak mengalami perubahan dari revisi keenam. hanya mengalami pergeseran antar tiap outputnya
VII	23 Mei 2023	Revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dijelaskan surat KPA BPS Kota Surabaya No B-256/35781/PR.620/05/2023 tanggal 25 Mei 2023	23.517.111.000	Anggaran secara jumlah keseluruhan tidak mengalami perubahan dari Revisi keenam. hanya mengalami pergeseran antar tiap outputnya.
VIII	30 Mei 2023	Revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dijelaskan surat KPA BPS Provinsi Jawa Timur No B-039/35511/PR.400/05/2023 tanggal 26 Mei 2023	23.573.008.000	Pada revisi kedelapan ini secara keseluruhan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp 55.887.000 menjadi Rp 23.572.998.000.
IX	11 Juli 2023	Revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), berupa revisi anggaran untuk mengakomodir Penyesuaian Kegiatan Tahun 2023, sebagaimana dijelaskan surat Sekretaris Utama BPS No B - 981/02100/PR.440/06/2023 tanggal 21 Juni 2023	21.757.133.000	Pada revisi kesembilan ini anggaran berkurang sebesar Rp 1.815.875.000.

Revisi DIPA ke	Tanggal	Dasar Hukum / Kewenangan	Pagu	Penjelasan
X	17 Juli 2023	Revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), berupa Revisi Anggaran dalam rangka penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment tahun anggaran 2023, sebagaimana dijelaskan surat Sekretaris Utama BPS No B-848/02000/PR.400/07/2023 tanggal 11 Juli 2023	21.365.929.000	Pada revisi kesepuluh ini anggaran berkurang sebesar Rp 391.204.000.
XI	6 Oktober 2023	Revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), berupa Revisi DIPA tahun 2023, sebagaimana dijelaskan surat Sekretaris Utama BPS No B-1740/02100/PR.400/09/2023 tanggal 22 September 2023	20.761.861.000	Pada revisi kesebelas ini anggaran berkurang sebesar Rp 582.575.000. Pengurangan anggaran merupakan penyesuaian untuk detil belanja yang merupakan blokir <i>Automatic Adjustment</i>
XII	21 Oktober 2023	Revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), berupa Revisi DIPA tahun 2023, sebagaimana dijelaskan surat Sekretaris Utama BPS No B-1179/02000/PR.440/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023	20.175.686.000	Pada revisi keduabelas ini anggaran bertambah sebesar Rp 604.068.000. pada revisi ini perubahan yang signifikan terjadi pada anggaran belanja modal berupa pengadaan sarana prasarana teknologi informasi pada pos KRO 2910.RAN
XIII	2 Desember 2023	Revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dijelaskan surat KPA BPS Provinsi Jawa Timur No S-111/35511/PR.440/11/2023 tanggal 27 November 2023	20.075.123.000	Pada revisi ketigabelas ini anggaran Dukman berkurang sebesar Rp 100.563.000. Penyesuaian berfokus pada anggaran belanja pegawai yang mengalami pengurangan akibat dari mutasi dan pemberhentian pegawai

Revisi DIPA ke	Tanggal	Dasar Hukum / Kewenangan	Pagu	Penjelasan
XIV	27 Desember 2023	Revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dijelaskan surat KPA BPS Kota Surabaya No B-886/35781/PR.620/12/2023 tanggal 27 Desember 2023	20.075.123.000	Pada revisi keempatbelas ini DIPA tidak mengalami pengurangan atau penambahan. Terdapat perubahan pada anggaran langganan daya dan jasa serta penambahan untuk pos kegiatan <i>paket meeting</i> yang diselenggarakan pada akhir tahun.

2. Dari segi penggunaan sumber daya lainnya. BPS Kota Surabaya juga melakukan upaya penghematan penggunaan energi.

- Upaya penghematan energi listrik diantaranya
 - berupa memasang himbauan-himbauan kampanye hemat energi.



Gambar 33. Himbauan Kampanye Hemat Energi

- Melakukan perawatan AC secara rutin
- Kampanye terus menerus untuk hemat energi pada saat acara Doa Pagi dan Sore
- Memanfaatkan cahaya matahari untuk penerangan siang hari
- Upaya penghematan penggunaan air
 - Menggunakan tandon penampungan air di atas sehingga jam operasional tidak terus menerus.
 - Menggunakan air secukupnya dan segera mematikan kran air setelah digunakan
 - Menggunakan air dari sumur untuk keperluan menyiram tanaman jadi akan mengurangi pembayaran air PDAM

Efisiensi anggaran BPS Kota Surabaya dapat dilihat dari anggaran penggunaan daya jasa (Listrik, telpon dan air). Pada tahun 2023 realisasi listrik sebesar Rp. 102,453,676.00 dari pagu Rp. 102,500,000.00 atau sebesar 99.95 persen sehingga ada efisiensi sebesar 0.05 persen. Untuk penggunaan air realisasi sebesar Rp. 5,225,180.00 dari pagu Rp. 5,269,000.00 atau sebesar 99.17 persen sehingga ada efisiensi sebesar 0.83 persen. Untuk penggunaan telepon realisasi sebesar Rp. 55,336.00 dari pagu Rp. 664,000.00 atau sebesar 8.33 persen sehingga ada efisiensi sebesar 91.67 persen karena penggunaan telpon menggunakan kuota yang ada di internet. Secara ringkas pagu dan realisasi anggaran daya jasa pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 28. Efisiensi Realisasi Anggaran Penggunaan Daya Jasa Tahun 2023

Jasa	Pagu	Realisasi	Realisasi (%)	Efisiensi (%)
Listrik	102,500,000.00	102,453,676.00	99.95	0.05
Air	5,269,000.00	5,225,180.00	99.17	0.83
Telepon	664,000.00	55,336.00	8.33	91.67

Jika dibandingkan dengan dengan tahun 2022 realisasi daya jasa mengalami penurunan untuk penggunaan air tahun 2022 sebesar Rp. 6,049,660.00 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp. 5,225,180.00 terdapat efisiensi sebesar 13.63%. Penggunaan telepon tahun 2022 sebesar Rp. 662,604.00 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp. 55,336.00 terdapat efisiensi sebesar 91.65%. sedangkan penggunaan Listrik tahun 2022 sebesar Rp. 84,875,802.00 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp. 102,453,676.00 atau ada penambahan sebesar 20.71 persen. Penambahan ini terjadi karena adanya penambahan pemasangan komputer baru sebanyak 10 unit untuk memenuhi *one man one PC* yang digunakan untuk menunjang kinerja pegawai. Perbandingan realisasi penggunaan anggaran daya jasa tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat berikut ini.

Tabel 29. Perbandingan Efisiensi Realisasi Anggaran Penggunaan Daya Jasa Tahun 2023 terhadap Tahun 2022

Jasa	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Selisih	Persentase Realisasi tahun 2023 terhadap 2022	Efisiensi (%)
Listrik	84,875,802.00	102,453,676.00	17,577,874.00	120.71	(20.71)
Air	6,049,660.00	5,225,180.00	(824,480.00)	86.37	13.63
Telepon	662,604.00	55,336.00	(607,268.00)	8.35	91.65

Nilai efisiensi dalam pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja yang didapat BPS Kota Surabaya selama tahun 2023 berdasarkan capaian kinerja menurut anggaran tujuan dan sasaran dengan realisasi anggaran 93,30 persen adalah sebesar 68,06%.

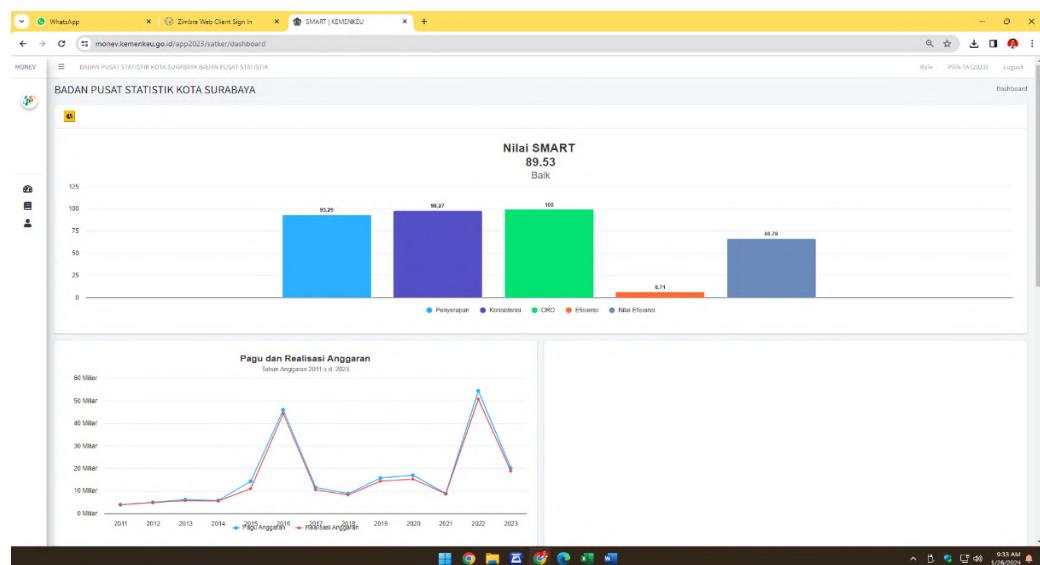
Tabel 30. Nilai Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja Dan Nilai Sasaran BPS Kota Surabaya Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kegiatan/Output	Capaian Kinerja	Pagu 2023	Realisasi 2023	Realisasi (%)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
T.1 Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			100	12.996.727.000	11.760.576.101	90,49	73.78
	S1.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas		100	12.996.727.000	11.760.576.101	90,49	
T.2 Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			110	30.016.000	27.282.000	90,89	93.43
	S2.1 Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN		110	30.016.000	27.282.000	90,89	
T.3 Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			107,69	3.000.000	3.000.000	100	67.86
	S3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I		107,69	3.000.000	3.000.000	100	
T.4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			101,45	7.045.380.000	6.939.231.672	98,49	57.28
	S4.1 SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan		101,45	7.045.380.000	6.939.231.672	98,49	

Dari tabel tersebut bisa dilihat nilai efisiensi pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja per tujuan. Pada tujuan 1 “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar Pembangunan” dengan capaian kinerja 100 persen menggunakan anggaran sebesar 90,49 persen dari pagu Rp. 12.996.727.000, telah melakukan efisiensi sebesar 73.78 persen. Pada tujuan 2 “**Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN**” dengan capaian kinerja 110 persen menggunakan anggaran sebesar 90,89 persen dari pagu Rp. 30.016.000, telah melakukan efisiensi sebesar 93.43 persen. Pada tujuan 3 “**Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN**” dengan capaian

kinerja 107.69 persen menggunakan anggaran sebesar 100 persen dari pagu Rp. 3.000.000, telah melakukan efisiensi sebesar 67.86 persen. Pada tujuan 4 “**Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi**” dengan capaian kinerja 101.45 persen menggunakan anggaran sebesar 94.49 persen dari pagu Rp. 7.045.380.000, telah melakukan efisiensi sebesar 57.28 persen.

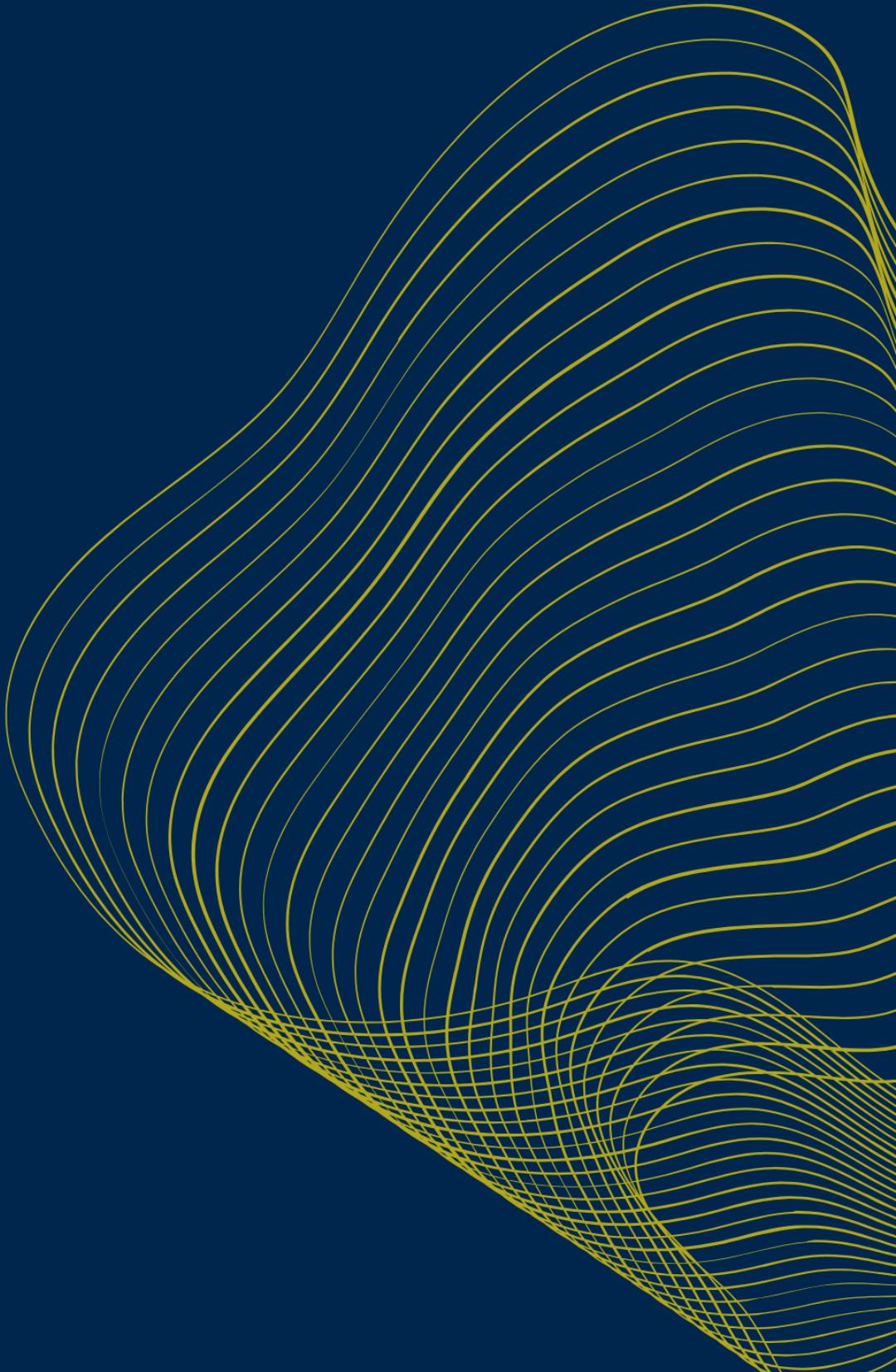
Nilai efisiensi juga bisa dilihat dari hasil pengukuran yang dilakukan Kementerian Keuangan melalui Sistem Aplikasi SMART di *web* monev.kemenkeu.go.id bahwa pencapaian nilai kinerja menunjukkan kinerja sebesar 89,53, penyerapan 93,29, tingkat konsistensi sebesar 98,27, efisiensi 6,71 dan nilai efisiensi sebesar 66,78



Gambar 34. *Screenshot* Aplikasi SMART pada *web* monev.kemenkeu.go.id

BAB IV

PENUTUP



BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

BPS Kota Surabaya senantiasa berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS. Dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan BPS Kota Surabaya telah bersinergi antar fungsi dibawah koordinasi pimpinan.

Terdapat 4 (empat) tujuan strategis yang telah dicapai BPS Kota Surabaya pada tahun 2023. yaitu:

- b. Tujuan pertama yaitu “Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” dengan sasaran strategis ”Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas” rata-rata capaian kinerja sebesar 100 persen;
- c. Tujuan kedua yaitu “Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN” dengan sasaran strategis “Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN” rata-rata capaian kinerja sebesar 110 persen;
- d. Tujuan ketiga “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN” dengan sasaran strategis “Penguatan statistik sektoral K/L/D/I” rata-rata capaian kinerja sebesar 107,69 persen; dan
- e. Tujuan keempat “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi” dengan sasaran strategis ”SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan” rata-rata capaian kinerja sebesar 101,45 persen.

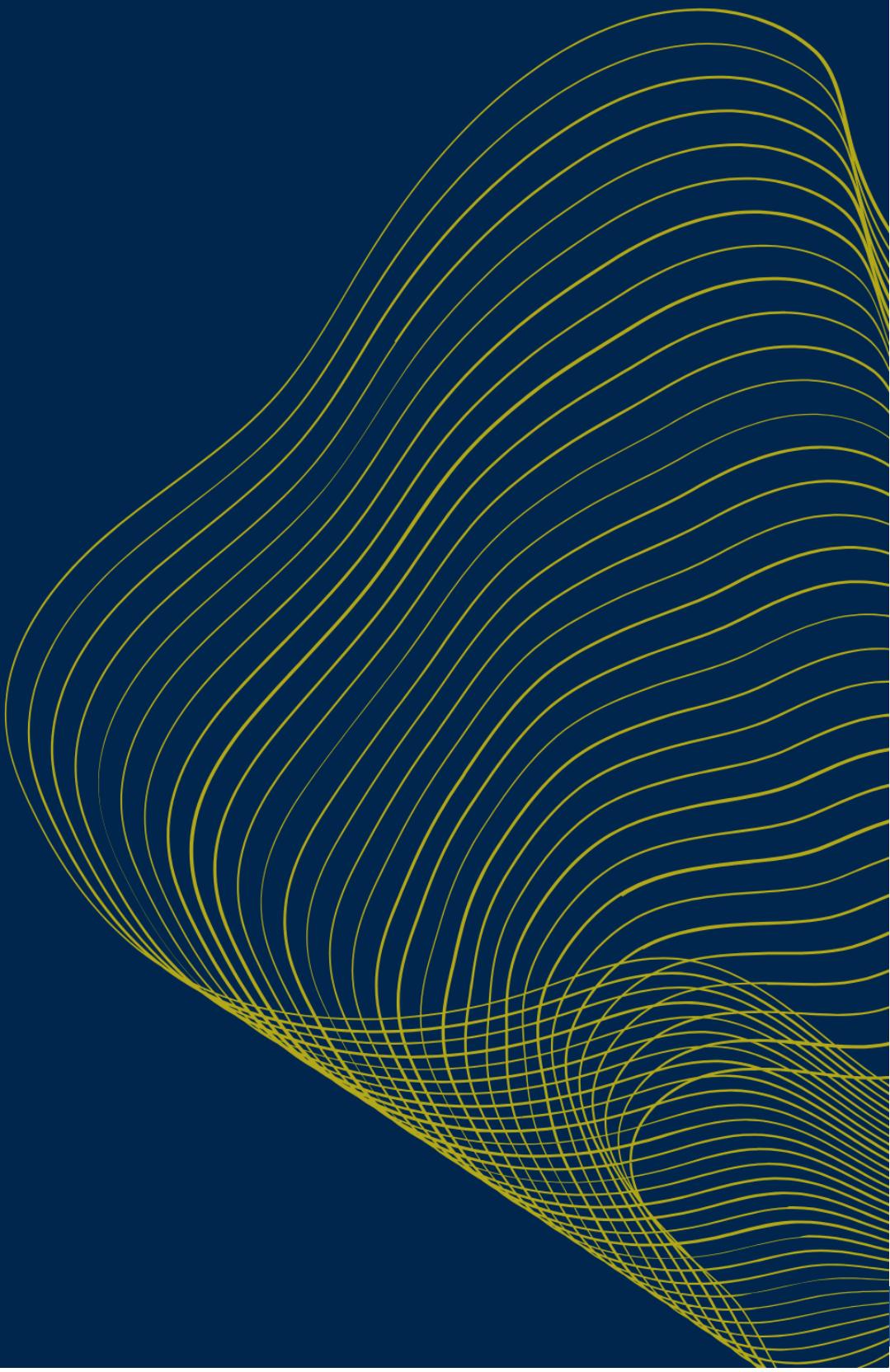
4.2. Rencana Tindak Lanjut

Capaian kinerja BPS Kota Surabaya di tahun 2023 masih banyak kekurangan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk memenuhi capaian kinerja dari setiap tujuan dan sasaran. Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:

1. Meningkatkan pelayanan statistik secara lebih dekat dan intensif melalui pembangunan Aplikasi layanan statistik yang mudah diakses oleh pengguna data.
2. Menambah jumlah publikasi yang dihasilkan oleh BPS Kota Surabaya agar menjangkau pengguna data yang lebih luas.

3. Menambahkan jumlah publikasi yang menerapkan standar akurasi pada rencana penerbitan publikasi BPS Kota Surabaya tahun 2024.
4. BPS Kota Surabaya selaku pembina statistik sektoral akan menambah jumlah OPD yang menjadi target pembinaan statistik.
5. Pembinaan dan koordinasi akan dilakukan dengan lebih intens. Salah satunya dengan melaksanakan semacam sosialisasi, workshop, atau FGD untuk OPD.
6. BPS Kota Surabaya juga berencana memberikan pembinaan secara personal kepada OPD agar keberlanjutan pelaporan romantik dapat terus berlangsung.
7. Menindaklanjuti seluruh catatan kelemahan dari LHE Implementasi SAKIP tahun 2023 untuk perbaikan peningkatan implementasi SAKIP.
8. Melakukan perubahan sistem kerja Tim SAKIP dengan menyeimbangkan beban kerja setiap anggota tim.
9. Untuk meningkatkan akuntabilitas korespondensi, perlu disusun sebuah aplikasi persuratan yang mudah diakses oleh seluruh pegawai dan sesuai dengan SOP Kearsipan.
10. Peningkatan setiap atribut baik sarana dan prasarana pekayanan perlu dilakukan, seperti: kemudahan informasi pelayanan, kemudahan prosedur, dan kemudahan akses data.
11. Menyebarluaskan informasi mengenai variasi layanan dan sarana pelayanan statistik BPS Kota Surabaya melalui media sosial.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2023

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURABAYA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Budi Santoso, SE
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Dadang Hardiwan, SSi.,MSi.
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

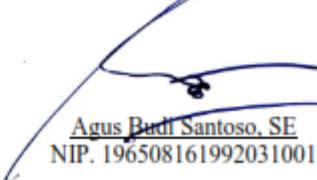
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Dr. Dadang Hardiwan, SSi.,MSi.
NIP. 197206091994121001

Surabaya, 27 Januari 2023

Pihak Pertama


Agus Budi Santoso, SE
NIP. 196508161992031001

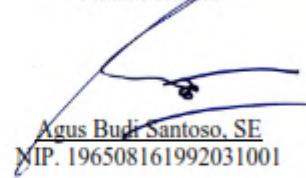
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURABAYA

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Persen	100
Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	42,86
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	53,85
Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	92,86
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	70,05
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	98

Kegiatan	Anggaran	
1. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp.	19.081.397.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp.	7.383.318.000,-
Jumlah	Rp.	26.464.715.000,-

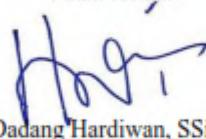
Surabaya, 27 Januari 2023

Pihak Pertama



Agus Budi Santoso, SE
NIP. 196508161992031001

Pihak Kedua



Dr. Dadang Hardiwan, SSi.,MSi.
NIP. 197206091994121001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN UMUM
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURABAYA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Subagiyo, ST, MM
Jabatan : Kepala Subbagian Umum Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

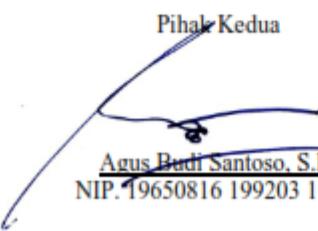
Nama : Agus Budi Santoso, S.E.
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surabaya
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Agus Budi Santoso, S.E.
NIP. 19650816 199203 1 001

Surabaya, 27 Januari 2023

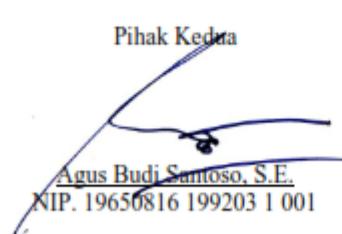
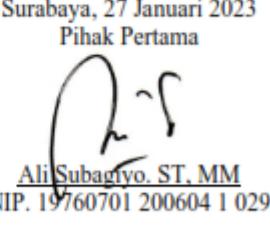
Pihak Pertama


Ali Subagiyo, ST, MM
NIP. 19760701 200604 1 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUBBAGIAN UMUM
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURABAYA

Indikator Kinerja	Satuan	Target
(2)	(3)	(4)
Jumlah Laporan Dukungan Manajemen yang terbit tepat waktu	Laporan	7
Persentase realisasi anggaran terhadap pagu	Persen	98
Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	70,05
Persentase data kepegawaian yang di update	Persen	100
Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	Persen	64,44
Persentase usulan mutasi pegawai yang ditindaklanjuti	Persen	100
Persentase penyusunan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar	Persen	100
Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang tepat waktu	Persen	100
Persentase Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kondisi Baik	Persen	76,62
Persentase Sarana Prasarana Lainnya dalam Kondisi Baik	Persen	98,06
Persentase penyelesaian pengadaan barang dan jasa	Persen	100

Kegiatan	Anggaran
I. Dukungan Manajemen	Rp. 7.383.318.000,-
Jumlah	Rp. 7.383.318.000,-

<p style="margin: 0;">Pihak Kedua</p>  <p style="margin: 0;">Agus Budi Santoso, S.E. NIP. 19650816 199203 1 001</p>	<p style="margin: 0;">Surabaya, 27 Januari 2023</p> <p style="margin: 0;">Pihak Pertama</p>  <p style="margin: 0;">Ali Subagiyo, ST, MM NIP. 19760701 200604 1 029</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lampiran 2. Revisi Perjanjian Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2023

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURABAYA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Budi Santoso, S.E
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Zulkipli M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Ir. Zulkipli M.Si
NIP. 196807031994011001

Surabaya, 31 Juli 2023
Pihak Pertama

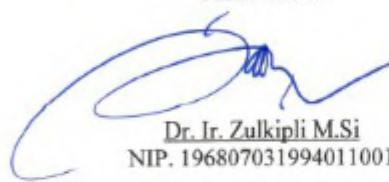
Agus Budi Santoso, S.E
NIP. 196508161992031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURABAYA

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Persen	100
Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	42,86
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	53,85
Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	92,86
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	70,05
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	98

Program	Anggaran
1. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp. 14.521.619.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 6.844.310.000,-
Jumlah	Rp. 21.365.929.000,-

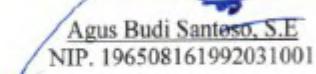
Pihak Kedua



Dr. Ir. Zulkipli M.Si
NIP. 196807031994011001

Surabaya, 31 Juli 2023

Pihak Pertama



Agus Budi Santoso, S.E.
NIP. 196508161992031001

Lampiran 3. Revisi Kedua Perjanjian Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2023

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SURABAYA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Arrief Chandra Setiawan S.ST, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Zulkipli, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Ir. Zulkipli, M.Si.
NIP. 196807031994011001

Surabaya, 1 September 2023

Pihak Pertama

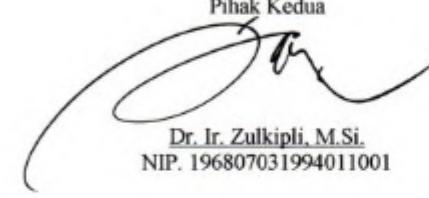
Dr. Arrief Chandra Setiawan S.ST, M.Si
NIP. 197712252000121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURABAYA

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Persen	100
Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	42,86
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	53,85
Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	92,86
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	70,05
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	98

Kegiatan	Anggaran	
1. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp.	14.521.619.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp.	6.844.310.000,-
Jumlah	Rp.	21.365.929.000,-

Pihak Kedua



Dr. Ir. Zulkipli, M.Si.
NIP. 196807031994011001

Surabaya, 1 September 2023

Pihak Pertama



Dr. Arrief Chandra Setiawan S.ST, M.Si
NIP. 197712252000121002

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BPS Kota Surabaya
Jl. A. Yani 152-E, Kota Surabaya
Website: <http://surabayakota.bps.go.id>
Email: bps3578@bps.go.id

BerAKHLAK >
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif